

# LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO & PERMODALAN

DESEMBER 2023

II. C. UMUM - Ukuran Utama (Key metrics- KM1) secara Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	2023				2022
		Des	Sep	Jun (Audited)	Mar	Des
	<b>Modal yang Tersedia (nilai)</b>					
1	Modal Inti Utama (CET1)	283,949,415	280,082,364	266,050,064	254,831,619	273,812,411
2	Modal Inti (Tier 1)	283,949,415	280,082,364	266,050,064	254,831,619	273,812,411
3	Total Modal	296,449,008	292,278,196	277,477,516	266,001,509	285,081,674
	<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)</b>					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	1,086,957,749	1,063,581,211	1,041,315,641	1,065,054,675	1,116,250,682
	<b>Rasio Modal berbasis Risiko sebagai persentase dari ATMR</b>					
5	Rasio CET1 (%)	26.12%	26.33%	25.55%	23.93%	24.53%
6	Rasio Tier 1 (%)	26.12%	26.33%	25.55%	23.93%	24.53%
7	Rasio Total Modal (%)	27.27%	27.48%	26.65%	24.98%	25.54%
	<b>Tambahan modal yang berfungsi sebagai buffer sebagai persentase dari ATMR</b>					
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank D-SIB (1% - 2.5%) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
11	Total tambahan modal sebagai penyangga (buffer) (Baris 8 + Baris 9 dan Baris 10)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
12	Komponen modal inti utama (Common Equity Tier 1) setelah memenuhi pemenuhan tambahan modal (buffer)	21.12%	21.33%	20.55%	18.93%	19.53%
	<b>Rasio pengungkit sesuai Basel III</b>					
13	Total Eksposur	1,945,448,102	1,819,226,497	1,805,661,747	1,783,542,641	1,774,631,093
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	14.60%	15.40%	14.73%	14.29%	15.43%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	14.60%	15.40%	14.73%	14.29%	15.43%
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	14.60%	15.40%	14.73%	14.29%	15.43%

II. C. UMUM - Ukuran Utama (Key metrics- KM1) secara Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Deskripsi	2023				2022
		Des	Sep	Jun (Audited)	Mar	Des
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	14.60%	15.40%	14.73%	14.29%	15.43%
	<b>Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)</b>					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	356,403,626	320,997,995	347,490,202	443,724,560	392,740,787
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (net cash outflow)	219,377,946	213,466,528	209,374,792	211,958,158	196,958,116
17	Rasio Kecukupan Likuiditas (%)	162.46%	150.37%	165.97%	209.35%	199.40%
	<b>Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)</b>					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	1,308,204,666	1,257,052,107	1,216,284,922	1,207,644,292	1,235,022,766
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	967,868,864	945,294,879	897,924,107	849,641,368	867,750,299
20	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (%)	135.16%	132.98%	135.46%	142.14%	142.32%

## LAPORAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO PENGUNGKIT

Periode : Des-23

(Dalam Juta Rupiah)

No	Item	Bank	Konsol
1	Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi. (nilai gross sebelum dikurangi CKPN).	1,914,908,501	2,029,422,345
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada Bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	(43,694,582)	(2,667,643)
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada laporan posisi keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	-	0
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	-	0
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit.	-	0
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-	0
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi cash pooling yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	0
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif	1,327,579	1,327,579
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur SFT sebagai contoh transaksi reverse repo.	1,224,500	1,224,500
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur TRA yang telah dikalikan dengan FKK.	115,508,302	115,567,846
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang modal dan CKPN.	(239,816,636)	(199,426,525)
12	Penyesuaian lainnya.	-	-
<b>13</b>	<b>Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit</b>	<b>1,749,457,664</b>	<b>1,945,448,102</b>

## LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Periode : Des-23

(Dalam Juta Rupiah)

No	Item	Bank	Konsolidasi
		Dec-23	Dec-23
<b>Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan</b>			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	1,756,095,259	1,924,115,590
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan	0	0
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	0	0
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	0	0
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan)	(79,659,770)	(88,367,391)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(63,983,537)	(27,364,538)
<b>7</b>	<b>Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6</b>	<b>1,612,451,952</b>	<b>1,808,383,661</b>
<b>Eksposur Transaksi Derivatif</b>			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	519,035	519,035
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivative	1,327,579	1,327,579
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	N.A	N.A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	N.A	N.A
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	N.A	N.A
<b>13</b>	<b>Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12</b>	<b>1,846,614</b>	<b>1,846,614</b>
<b>Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)</b>		<b>0</b>	
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	20,303,958	20,303,958
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	0	0
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	1,224,500	1,224,500
17	Eksposur sebagai agen SFT	0	0
<b>18</b>	<b>Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17</b>	<b>21,528,458</b>	<b>21,528,458</b>
<b>Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)</b>		<b>0</b>	
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	205,929,966	206,077,978
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(86,182,438)	(86,270,841)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(6,116,888)	(6,117,768)
<b>22</b>	<b>Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21</b>	<b>113,630,640</b>	<b>113,689,369</b>
<b>Modal dan Total Eksposur</b>		<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>Modal Inti</b>	<b>238,956,599</b>	<b>283,949,415</b>
<b>24</b>	<b>Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22</b>	<b>1,749,457,664</b>	<b>1,945,448,102</b>

## LAPORAN PERHITUNGAN RASIO PENGUNGKIT

Periode : Des-23

(Dalam Juta Rupiah)

No	Item	Bank	Konsolidasi
		Dec-23	Dec-23
	<b>Rasio Pengungkit (<i>Leverage</i>)</b>	0	
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	13.66%	14.60%
25.a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	13.66%	14.60%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3.00%	3.00%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Pengungkit	N/A	N/A
	<b>Pengungkapan Nilai Rata-Rata</b>	0	
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	10,151,979	10,151,979
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	20,303,958	20,303,958
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	113,630,640	113,689,369
30.a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	113,630,640	113,689,369
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	13.66%	14.60%
31.a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	13.66%	14.60%

**LAPORAN PERHITUNGAN  
NET STABLE FUNDING RATIO**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Bulan Laporan : Desember 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Komponen ASF	Nilai Tertecat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	
<b>1</b>	<b>Modal</b>								<b>311,667,821</b>
1.1	Modal Bagi Bank Umum berkantor pusat di Indonesia	0		0		0		0	
1.1.1	Modal Inti (Tier 1)	299,999,117	100%	0	n.a	0	n.a	0	n.a
1.1.2	Modal Pelengkap (Tier 2)	11,668,704	100%	0	0%	0	0%	0	100%
1.2	Modal bagi KCBA	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%
1.3	Instrumen modal lainnya	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%
<b>2</b>	<b>Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan :</b>								<b>610,471,048</b>
2.1	Simpanan Stabil	0		0		0		0	
2.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	483,461,513	95%	0	n.a	0	n.a	0	n.a
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	78,275,528	95%	5,304,332	95%	869,903	100%
2.2	Simpanan Kurang Stabil	0		0		0		0	
2.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	23,964,169	90%	0	n.a	0	n.a	0	n.a
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	43,828,033	90%	9,967,630	90%	927,993	100%
<b>3</b>	<b>Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil :</b>								<b>46,024,881</b>
3.1	Simpanan Stabil	0		0		0		0	
3.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	39,415,505	95%	0	n.a	0	n.a	0	n.a
3.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	2,783,209	95%	384,853	95%	83,118	100%
3.2	Simpanan Kurang Stabil	0		0		0		0	
3.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	4,698,516	90%	0	n.a	0	n.a	0	n.a
3.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)	0	n.a	1,242,699	90%	128,562	90%	24,575	100%
<b>4</b>	<b>Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi :</b>								<b>321,819,372</b>
4.1	Simpanan operasional	319,465,092	50%	0	50%	0	50%	0	100%
4.2	Simpanan non - operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari:	0		0		0		0	
4.2.1	perusahaan non-keuangan	0	0%	169,499,577	50%	54,446,480	50%	1,919,103	100%
4.2.2	Pemerintah Indonesia	0	0%	140,000	50%	34,500	50%	0	100%
4.2.3	pemerintah negara lain	0	0%	0	50%	0	50%	0	100%
4.2.4	entitas sektor publik	0	0%	18,790,908	50%	8,314,932	50%	147,196	100%
4.2.5	bank pembangunan multilateral	0	0%	28,718	50%	0	50%	0	100%
4.2.6	Bank Indonesia	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%
4.2.7	bank sentral negara lain	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%
4.2.8	lembaga keuangan	0	0%	51,510,779	0%	10,798,302	50%	9,958,301	100%
4.2.9	Lainnya	0	0%	7,698,500	0%	8,035,450	50%	15,017,791	100%
<b>5</b>	<b>Liabilitas yang memiliki hubungan ketergantungan dengan aset tertentu</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>6</b>	<b>Liabilitas dan ekuitas lainnya:</b>								<b>10,720,794</b>
6.1	NSFR Liabilitas Derivatif	0		0		0		0%	
6.2	Liabilitas pajak Tangguhan	0	100%	14,196,379	0%	0	50%	0	100%
6.3	kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (Tier 1)	0	100%	0	0%	0	50%	0	100%
6.4	Utang tanggal perdagangan (trade date payable)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6.5	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu*	63,747,501	0%	22,104,442	0%	2,867,894	50%	9,286,847	100%
<b>7</b>	<b>Total ASF</b>								<b>1,300,703,916</b>

**LAPORAN PERHITUNGAN  
NET STABLE FUNDING RATIO**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Bulan Laporan : Desember 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Komponen ASF	Nilai Tertecat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	
Komponen RSF	Nilai Tertecat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	
<b>Aset Pada Neraca</b>									
<b>1</b>	<b>Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR</b>								<b>10,174,021</b>
1.1	HQLA Level 1								10,070,923
1.1.1	kas dan setara kas	376,236,737		16,661,436		1,551,000		21,161,019	
1.1.2	penempatan pada Bank Indonesia	30,858,125	0%	0	n.a	0	n.a	0	n.a
1.1.3	HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0%	345,378,612	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	16,661,436		1,551,000		21,161,019	
1.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	0	n.a	7,720,736	5%	0	5%	13,367,019	5%
1.2	HQLA Level 2A	0		8,940,700	5%	1,551,000	50%	7,794,000	100%
1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	244,000		80,000		327,190	
1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	0	n.a	244,000	15%	80,000	15%	327,190	15%
1.3	HQLA Level 2B	0		0		0		10,839	
1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	50%	0	50%	10,839	50%
1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%
<b>2</b>	<b>Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional</b>								<b>11,728,574</b>
2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	23,457,149	50%	0	50%	0	50%	0	100%
2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0	
2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	50%	0	50%	0	50%	0	100%
2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	50%	0	50%	0	50%	0	100%
2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%
<b>3</b>	<b>Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default)</b>								<b>821,658,979</b>
<b>3.1</b>	<b>Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) yang diberikan kepada:</b>								<b>812,521,187</b>
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan	0		14,261,942		0		0	1,426,194
3.1.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	14,261,942	10%	0	50%	0	100%
3.1.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0	
3.1.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	10%	0	50%	0	100%
3.1.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%
3.1.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin oleh non-HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan	0		0		0		0	
3.1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%
3.1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0	
3.1.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%
3.1.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%
3.1.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional	0		0		0		0	
3.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	15%	0	15%	0	50%	0	100%
3.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0	
3.1.3.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%
3.1.3.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%
3.1.3.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain, yang diantaranya:	0		80,298,479		90,885,636		766,507,242	737,047,496
3.1.4.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	0		802,081		0		378,586	647,122
3.1.4.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	802,081	50%	0	50%	378,586	65%
3.1.4.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0	
3.1.4.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%
3.1.4.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%
3.1.4.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%
3.1.4.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar	0		79,496,398		90,885,636		766,128,656	736,400,374
3.1.4.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	79,496,398	50%	90,885,636	50%	766,128,656	85%
3.1.4.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0	
3.1.4.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%
3.1.4.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%
3.1.4.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%



## LAPORAN NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) INDIVIDU

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (Individu)

Bulan Laporan : Desember 2023

### Analisis

(Dalam Juta Rupiah)

Rasio	Komponen	September 2023	Desember 2023
<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	<i>Available Stable Funding (ASF)</i>	1.250.203.468	1.300.703.916
	<i>Required Stable Funding (RSF)</i>	940.633.464	962.302.075
<b>NSFR</b>		<b>132,91%</b>	<b>135,17%</b>

*Net Stable Funding Ratio (NSFR)* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk posisi bulan Desember 2023 sebesar 135,17% mengalami peningkatan sebesar 2,26% dibandingkan posisi bulan September 2023 sebesar 132,91%. Peningkatan tersebut disebabkan persentase peningkatan komponen *Available Stable Funding (ASF)* yang lebih tinggi dibandingkan persentase peningkatan komponen *Required Stable Funding (RSF)*.

Komponen *Available Stable Funding (ASF)* mengalami peningkatan sebesar Rp50,50 T atau sebesar 4,04% sedangkan komponen *Required Stable Funding (RSF)* mengalami peningkatan sebesar Rp21,67 T atau sebesar 2,30%.

**LAPORAN PERHITUNGAN  
NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) BULANAN**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)  
Bulan Laporan : Desember 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

1	Komponen ASF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
		Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	
1	<b>Modal</b>									<b>315,157,201</b>
1.1	Modal Bagi Bank Umum berkantor pusat di Indonesia									0
1.1.1	Modal Inti (Tier 1)	303,419,698	100%		n.a		n.a	0	n.a	303,419,698
1.1.2	Modal Pelengkap (Tier 2)	11,737,503	100%	0	0%	0	0%	0	100%	11,737,503
1.2	Modal bagi KCBA	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	
1.3	Instrumen modal lainnya	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	
2	<b>Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan :</b>									<b>611,715,107</b>
2.1	Simpanan Stabil									
2.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	484,077,346	95%		n.a		n.a		n.a	459,873,479
2.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	78,355,848	95%	5,305,830	95%	871,170	100%	80,349,764
2.2	Simpanan Kurang Stabil									
2.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	24,304,492	90%		n.a		n.a		n.a	21,874,042
2.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	44,131,847	90%	9,967,630	90%	928,293	100%	49,617,822
3	<b>Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil :</b>									<b>47,631,346</b>
3.1	Simpanan Stabil									
3.1.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	39,632,609	95%		n.a		n.a		n.a	37,650,978
3.1.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	2,806,200	95%	386,913	95%	83,118	100%	3,116,576
3.2	Simpanan Kurang Stabil									
3.2.1	Simpanan Tanpa Jangka waktu (Giro, Tabungan)	4,719,723	90%		n.a		n.a		n.a	4,247,751
3.2.2	Simpanan dengan jangka waktu (deposito)		n.a	2,733,144	90%	146,262	90%	24,575	100%	2,616,041
4	<b>Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi :</b>									<b>322,980,217</b>
4.1	Simpanan operasional	320,508,273	50%	0	50%	0	50%	0	100%	160,254,136
4.2	Simpanan non - operasional dan/atau liabilitas lainnya yang bersifat non-operasional yang berasal dari:									162,726,081
4.2.1	perusahaan non-keuangan	0	0%	170,670,389	50%	54,446,480	50%	1,919,103	100%	114,477,538
4.2.2	Pemerintah Indonesia	0	0%	140,000	50%	34,500	50%	0	100%	87,250
4.2.3	pemerintah negara lain	0	0%	0	50%	0	50%	0	100%	0
4.2.4	entitas sektor publik	0	0%	18,892,007	50%	8,314,932	50%	147,196	100%	13,750,666
4.2.5	bank pembangunan multilateral	0	0%	28,718	50%	0	50%	0	100%	14,359
4.2.6	Bank Indonesia	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%	0
4.2.7	bank sentral negara lain	0	0%	0	0%	0	50%	0	100%	0
4.2.8	lembaga keuangan	0	0%	52,365,900	0%	10,798,302	50%	9,958,301	100%	15,357,452
4.2.9	Lainnya	0	0%	9,593,699	0%	8,042,050	50%	15,017,791	100%	19,038,816
5	<b>Liabilitas yang memiliki hubungan ketergantungan dengan aset tertentu</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>
6	<b>Liabilitas dan ekuitas lainnya:</b>									<b>10,720,794</b>
6.1	NSFR Liabilitas Derivatif				0			0%		0
6.2	Liabilitas pajak Tangguhan	0	100%	14,196,379	0%	0	50%	0	100%	0
6.3	kepentingan non-pengendali yang tidak memenuhi persyaratan untuk diperhitungkan sebagai modal inti utama (Tier 1)	0	100%	0	0%	0	50%	0	100%	0
6.4	Utang tanggal perdagangan (trade date payable)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6.5	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas, termasuk liabilitas lainnya tanpa jangka waktu	64,214,340	0%	22,475,739	0%	2,867,894	50%	9,286,847	100%	10,720,794
7	<b>Total ASF</b>									<b>1,308,204,666</b>

**LAPORAN PERHITUNGAN  
NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) BULANAN**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)  
Bulan Laporan : Desember 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Komponen ASF	Nilai Tertecat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	Nilai Tertecat	Faktor ASF	
Komponen RSF	Nilai Tertecat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang
	Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun		
	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	Nilai Tertecat	Faktor RSF	
<b>Aset Pada Neraca</b>									
<b>1</b>	<b>Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR</b>								<b>10,458,776</b>
1.1	HQLA Level 1								10,256,769
1.1.1	kas dan setara kas								0
1.1.2	penempatan pada Bank Indonesia								0
1.1.3	HQLA Level 1 tidak termasuk aset yang mendapatkan faktor RSF 0%								0
1.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)								1,240,234
1.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset								9,016,535
1.2	HQLA Level 2A								196,588
1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)								196,588
1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset								0
1.3	HQLA Level 2B								5,420
1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)								5,420
1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered), berdasarkan sisa jangka waktu pengikatan aset								0
<b>2</b>	<b>Simpanan atau penempatan dana pada lembaga keuangan lain untuk aktivitas operasional</b>								<b>11,802,122</b>
2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)								11,802,122
2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)								0
2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan								0
2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun								0
2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun								0
<b>3</b>	<b>Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default)</b>								<b>826,058,044</b>
3.1	Pinjaman kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) yang diberikan kepada:								816,920,252
3.1.1	Lembaga keuangan yang dijamin oleh HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan								1,450,700
3.1.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)								1,450,700
3.1.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)								0
3.1.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan								0
3.1.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun								0
3.1.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun								0
3.1.2	Lembaga keuangan yang dijamin oleh non-HQLA Level 1 yang memenuhi persyaratan								0
3.1.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)								0
3.1.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)								0
3.1.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan								0
3.1.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun								0
3.1.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun								0
3.1.3	Lembaga keuangan dan tanpa agunan, termasuk penempatan dana (tanpa jangka waktu dan dengan jangka waktu) pada lembaga keuangan lain dan bukan untuk aktivitas operasional								0
3.1.3.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)								0

**LAPORAN PERHITUNGAN  
NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR) BULANAN**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)  
Bulan Laporan : Desember 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

Komponen ASF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu								Total Nilai Tertimbang	
	Tanpa Jangka Waktu		< 6 bulan		6 bulan - < 1 tahun		≥ 1 tahun			
	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF	Nilai Tercatat	Faktor ASF		
3.1.3.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.3.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	15%	0	50%	0	100%	0
3.1.3.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	100%	0
3.1.3.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.4	Perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain , yang diantaranya:									740,973,953
3.1.4.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									775,999
3.1.4.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	802,081	50%	0	50%	576,859	65%	775,999
3.1.4.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.4.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.4.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.4.2	dikenakan bobot risiko > 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									740,197,954
3.1.4.2.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	80,251,333	50%	91,652,038	50%	769,701,493	85%	740,197,954
3.1.4.2.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.4.2.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.4.2.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	85%	0
3.1.4.2.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.5	Tagihan (termasuk pinjaman) kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun selain surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain									0
3.1.5.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	0%	0	50%			0
3.1.5.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0				0
3.1.5.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	0%	0	50%			0
3.1.5.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%			0
3.1.5.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%			0
3.1.6	Tagihan kepada Bank Indonesia dan bank sentral negara lain (contoh: surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan bank sentral negara lain)									0
3.1.6.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	0	0%	0	5%	0	5%	0
3.1.6.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.6.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	0%	0	5%	0	5%	0
3.1.6.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	50%	0
3.1.6.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0
3.1.7	Kredit beragun rumah tinggal, yang diantaranya :									74,495,599
3.1.7.1	dikenakan bobot risiko ≤ 35% dalam perhitungan ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar									24,802,809
3.1.7.1.1	bebas dari segala klaim (unencumbered)	0	n.a	6,086,939	50%	8,755,045	50%	26,741,258	65%	24,802,809
3.1.7.1.2	tidak bebas dari segala klaim (encumbered)	0		0		0		0		0
3.1.7.1.2.1	sisa jangka waktu pengikatan aset < 6 bulan	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.7.1.2.2	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 6 bulan s.d < 1 tahun	0	n.a	0	50%	0	50%	0	65%	0
3.1.7.1.2.3	sisa jangka waktu pengikatan aset ≥ 1 tahun	0	n.a	0	100%	0	100%	0	100%	0



## ANALISIS KUALITATIF NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Konsolidasi)  
Bulan Laporan : Desember 2023

### Analisis

(Dalam Juta Rupiah)

Rasio	Komponen	September 2023	Desember 2023
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	<i>Available Stable Funding</i> (ASF)	1.257.052.107	1.308.204.666
	<i>Required Stable Funding</i> (RSF)	945.294.879	967.868.864
<b>NSFR</b>		<b>132,98%</b>	<b>135,16%</b>

*Net Stable Funding Ratio* (NSFR) secara Konsolidasi posisi bulan Desember 2023, NSFR BRI Konsolidasi tercatat sebesar 135,16% mengalami peningkatan sebesar 2,18% dibandingkan posisi bulan September 2023 sebesar 132,98%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan komponen *Available Stable Funding* (ASF) sebesar Rp51,15 T atau 4,07% dan peningkatan komponen *Required Stable Funding* (RSF) sebesar Rp22,57 T atau 2,39%.

**LAPORAN PERHITUNGAN**  
**KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN**

Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.  
Posisi Laporan : Triwulan IV 2023

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Komponen	Individual				Konsolidasi			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
1	Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		92 hari		92 hari		92 hari		92 hari
<b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b>									
2	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		351,342,966		316,035,475		356,403,626		320,997,995
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>									
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	603,604,751	34,238,797	597,331,363	33,770,169	605,773,609	34,409,909	599,526,286	33,940,880
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	522,433,561	26,121,678	519,259,342	25,962,967	523,349,033	26,167,452	520,234,968	26,011,748
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	81,171,190	8,117,119	78,072,021	7,807,202	82,424,575	8,242,458	79,291,318	7,929,132
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	541,386,176	176,306,736	505,656,921	168,003,655	545,054,594	178,033,997	508,768,329	169,489,916
	a. Simpanan operasional	286,139,700	70,964,901	254,488,843	63,070,354	287,103,998	71,193,042	255,187,685	63,236,131
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	255,087,648	105,183,006	248,825,530	102,590,752	257,791,767	106,682,126	251,238,096	103,911,236
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	158,829	158,829	2,342,548	2,342,548	158,829	158,829	2,342,548	2,342,548
5	Pendanaan dengan agunan (secured funding)	6,484,306	838,982	16,710,649	1,977,271	6,668,534	838,982	16,917,784	1,977,271
6	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:	310,133,572	32,961,162	296,310,182	31,386,340	310,438,865	33,136,699	296,481,173	31,410,875
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	16,807,160	16,807,160	12,433,827	12,433,827	16,807,160	16,807,160	12,433,827	12,433,827
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	112,222,694	10,173,264	111,997,279	10,077,859	112,376,628	10,198,048	112,167,995	10,102,387
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	0	0	0	0	150,735	150,735	0	0
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	180,539,155	5,416,175	168,045,797	5,041,374	180,539,780	5,416,193	168,046,071	5,041,382
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	564,563	564,563	3,833,280	3,833,280	564,563	564,563	3,833,280	3,833,280
7	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)</b>		244,345,678		235,137,435		246,419,587		236,818,942
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>									
8	Pinjaman dengan agunan Secured lending	9,487,289	0	4,404,225	0	9,487,289	0	4,404,225	0
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty)	13,928,134	6,964,175	13,543,863	6,772,045	14,025,297	7,016,451	13,650,064	6,828,530
10	Arus kas masuk lainnya	20,016,159	20,016,159	16,515,058	16,515,058	20,034,220	20,025,190	16,532,711	16,523,884
11	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>		26,980,334		23,287,103		27,041,641		23,352,414
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE<sup>1</sup></b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE<sup>1</sup></b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE<sup>1</sup></b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE<sup>1</sup></b>
12	<b>TOTAL HQLA</b>		351,342,966		316,035,475		356,403,626		320,997,995
13	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>		217,365,343		211,850,332		219,377,946		213,466,528
14	<b>LCR (%)</b>		161.64%		149.18%		162.46%		150.37%

Keterangan:

<sup>1</sup>Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

**Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi <sup>1)</sup>
<b>Common Equity Tier I Capital : Instruments and reserves)</b>		<b>Modal Inti Utama (Common Equity Tier I) / CET 1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor</b>		
1.	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	Saham biasa (termasuk <i>stock surplus</i> )	79,816,756	e.
2.	Retained earnings	Laba ditahan	207,901,625	g.
3.	Accumulated other comprehensive income (and	Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya (dan cadangan lain)	20,467,566	f.
4.	<i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET 1	N/A	N/A
5.	<i>Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)</i>	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	454,832	d.
6.	<b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>CET 1 sebelum <i>regulatory adjustment</i></b>	<b>308,640,779</b>	
<b>Common Equity Tier 1 capital : regulatory adjustments</b>		<b>CET 1 : Faktor Pengurang (<i>Regulatory Adjustment</i>)</b>		
7.	Prudential valuation adjustments	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam	-	
8.	Goodwill (net of related tax liability)	<i>Goodwill</i>	- 806,416	b.
9.	Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	Aset tidak berwujud lain (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i> )	- 3,945,602	
10.	Deffered tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	N/A
11.	Cash-flow hedge reserve	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	N/A
12.	Shortfall of provisions to expected losses	<i>Shortfall of provisions to expected losses</i>	N/A	N/A
13.	Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework)	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14.	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	Peningkatan / penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	
15.	Defined-benefit pension fund net assets	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	N/A
16.	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di neraca)	N/A	N/A
17.	Reciprocal cross-holdings in common equity	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	

**Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi <sup>1)</sup>
18.	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
19.	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah diatas batasan 10%)	N/A	N/A
20.	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	
21.	Deffered tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10% net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
22.	Amount exceeding the 15% threshold	Jumlah melebihi batasan 15% dari :	N/A	N/A
23.	of which : significant investments in the common stock of financials	investasi signifikan pada saham biasa financials	N/A	N/A
24.	of which : mortgage servicing	<i>Mortgage servicing rights</i>	N/A	N/A
25.	of which : deferred tax assets arising from temporary	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	N/A
26.	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	- 19,939,346	
26a.		Seilisi PPA dan CKPN	-	
26b.		PPA atas aset non produktif	- 61,213	
26c.		Aset Pajak Tangguhan	- 15,076,800	c.
26d.		Penyertaan	- 2,667,643	a.
26e.		Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
26.f.		Eksposur sekuritisasi	-	
26.g.		Lainnya	- 2,133,690	
27.	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangannya.	-	
28.	<b>Total regulatory adjustments to Common Equity Tier 1</b>	<b>Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET 1</b>	<b>- 24,691,364</b>	
29.	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang</b>	<b>283,949,415</b>	
	<b>Additional Tier 1 capital :</b>	<b>Modal Inti Tambahan (AT 1) : instrumen</b>		
30.	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i> )	-	
31.	of which : classified as equity under applicable accounting	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	

**Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi <sup>1)</sup>
32.	of which : classified as liabilities under applicable accounting standards	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33.	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT 1	N/A	N/A
34.	Additional Tier 1 instruments (and CET 1 instruments not included in roe 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35.	<i>of which : instrumets issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Instrumen yang diterbitkan entitas anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
36.	<b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>Jumlah AT 1 sebelum regulatory adjustment</b>	-	
	<b>Additional Tier 1 capital : regulatory adjutments</b>	<b>Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)</b>		
37.	Investments in own Additional Tier 1 instruments	Investasi pada instrumen AT1 sendiri		
38.	Resiprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain.		
39.	Investemnts in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
40.	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan ( <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diiperkenakan)	N/A	N/A
41.	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
41.a		Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42.	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2to cover	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	
43.	<b>Total Regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	<b>Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustmen t) terhadap AT 1</b>	-	
44.	<b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	<b>Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang</b>	-	
45.	<b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)</b>	<b>Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)</b>	<b>283,949,415</b>	
	<b>Tier 2 capital : Instruments and provisions</b>	<b>Modal Pelengkap (Tier 2) : Instrumen dan cadangan</b>		
46.	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i> )	-	
47.	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> Tier 2	N/A	N/A

**Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi <sup>1)</sup>
48.	Tier 2 Instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in row 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	458,333	d.
49.	<i>of which : instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Modal yng diterbitkan entitas anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
50.	Provisions	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR Risiko	12,041,260	
51.	<b>Tier 2 capital before rugulatory adjustments</b>	<b>Jumlah Modal Pelengkap (Tier2) sebelum faktor pengurang</b>	<b>12,499,593</b>	
	<b>Tier 2 capital : regulatory adjustments</b>	<b>Modal Pelengkap (Tier 2) : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)</b>		
52.	Investemnts in own Tier 2 instruments	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri	N/A	N/A
53.	Resiprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier 2</i> pada entitas lain	-	
54.	Instruments in the capital of banking, financial and insurnce entities that are outside the scope of regulatory consolidations, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entiatas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	N/A
55.	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entitites that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short posistions)	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan ( <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diiperkenakan)	N/A	N/A
56.	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
56.a		<i>Sinking Fund</i>	-	
56.b		Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain	-	
57.	<b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>	<b>Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap</b>	<b>-</b>	
58.	<b>Tier 2 capital (T2)</b>	<b>Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah regulatory adjustment</b>	<b>12,499,593</b>	
59.	<b>Total capital (TC = T1 + T2)</b>	<b>Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)</b>	<b>296,449,008</b>	
60.	<b>Total risk weighted assets</b>	<b>Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)</b>	<b>1,086,957,749</b>	
	<b>Capital ratios and buffers</b>	<b>Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)</b>		
61.	<b>Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)</b>	<b>Rasio Modal Inti Utama (CET 1) - persentase terhadap ATMR</b>	<b>26.12%</b>	
62.	<b>Tier 1 (as a percentage of risk weighted assest)</b>	<b>Rasio Modal Inti (Tier 1) - prosentase terhadap ATMR</b>	<b>26.12%</b>	
63.	<b>Total capital as percentage of risk weighted assets</b>	<b>Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR</b>		

**Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi <sup>1)</sup>
64.	<b>Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted</b>	<b>Tambahan modal (<i>buffer</i>) - persentase terhadap ATMR</b>	27.27%	
65.	<i>of which : capital conservation buffer requirement</i>	<i>Capital conservation Buffer</i>	2.50%	
66.	<i>of which : bank spesific countercyclical buffer</i>	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%	
67.	<i>of which : G-SIB buffer requirement</i>	<i>Capital surcharge untuk D-SIB</i>	2.50%	
68.	<b>Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets) National minimum (if differernt from Basel 3)</b>	<b>Untuk bank umum konvensional : Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (<i>Buffer</i>) - persentase terhadap ATMR) <i>National minimal (jika berbeda dari Basel 3)</i></b>		
69.	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from basel 3)	Rasio minimal CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
70.	National Tier 1 minimum ratio (if different from basel 3 minimum)	Rasio minimal <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	N/A
71.	National total capital minimum ratio (if different from Basel 3	Rasio minimal total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
	<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighted assets)</b>	<b>Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)</b>		
72.	Non-significant investments in the capital of other financials	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain	N/A	N/A
73.	Significant investments in the common stock of financials	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	N/A
74.	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
75.	Deffered tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	N/A
	<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier</b>	<b>Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2</b>		
76.	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A	N/A
77.	Cap on inclusion in Tier 2 under standardised approach	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar	N/A	N/A
78.	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan <i>cap</i> )	N/A	N/A
79.	Cap of inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan IRB	N/A	N/A

**Tabel G. Permodalan - Komposisi Permodalan (CC1)  
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	No. Ref yang berasal dari Neraca Konsolidasi <sup>1)</sup>
	<b>Capital instruments subject to phase out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)</b>	<b>Instrumen Modal yang termasuk <i>phase out</i> (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 sd 1 Jan 2022)</b>		
80.	Current cap on CET1 instruments subject to phase out	Cap pada CET1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
81.	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i> )	N/A	N/A
82.	Current cap on AT1 instruments subject to phase out	<i>Cap</i> pada AT 1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
83.	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i> )	N/A	N/A
84.	Current cap on T2 instruments subject to phase out	<i>Cap</i> pada <i>Tier 2</i> yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	N/A
85.	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i> )	N/A	N/A

Tabel H. *Permodalan* - Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Laporan Publikasi posisi keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No. Referensi
		Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan	
	<b>ASET</b>			
1.	Kas	31,515,572	31,603,784	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	149,831,968	150,797,288	
3.	Penempatan pada bank lain	37,080,603	38,637,594	
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	905,573	911,683	
5.	Surat berharga yang dimiliki	339,067,362	364,682,750	
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	20,303,958	20,303,958	
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	33,350,175	33,595,231	
8.	Tagihan akseptasi	10,217,408	10,217,408	
9.	Kredit yang diberikan	1,146,082,506	1,197,752,706	
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-	13,668,220	
11.	Piutang Sewa Pembiayaan	-	55,008,321	
12.	Penyertaan modal	49,254,757	4,637,848	
	Penyertaan sebagai Faktor Pengurang di CET 1		2,667,643	a.
13.	Aset keuangan lainnya	15,414,895	21,900,160	
14.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-			
	a. Surat berharga yang dimiliki	- 2,389,290	- 2,405,426	
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	- 77,009,890	- 81,017,973	
	c. Lainnya	- 260,590	- 4,959,749	
15.	Aset tidak berwujud	-	806,416	b.
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	
16.	Aset tetap dan inventaris	59,583,105	81,463,777	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	- 16,550,584	- 21,785,658	
17.	Aset non produktif	-	-	
	a. Properti terbengkalai	17,356	17,356	
	b. Agunan yang diambil alih	56,502	59,347	
	c. Rekening tunda	-	-	
	d. Aset antarkantor	-	-	
18.	Aset lainnya			
	a. Aset Pajak Tangguhan	12,139,962	19,063,006	
	Diakui dalam Tier 1		15,076,800	c.
	b. Aset lainnya	26,637,383	12,304,540	
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>1,835,248,731</b>	<b>1,965,007,030</b>	

Tabel H. Permodalan - Rekonsiliasi Permodalan (CC2)

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Laporan Publikasi posisi keuangan	Laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No. Referensi
		Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan	
<b>LIABILITAS DAN EKUIT AS</b>				
1.	Giro	346,654,593	346,124,372	
2.	Tabungan	526,514,556	527,945,550	
3.	Deposito	479,513,851	484,258,839	
4.	Uang Elektronik	518,049	518,049	
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	69,254	69,254	
6.	Liabilitas kepada bank lain	12,066,959	11,958,319	
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	918,194	925,210	
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	19,079,458	19,079,458	
9.	Liabilitas akseptasi	10,217,408	10,217,408	
10.	Surat berharga yang diterbitkan	30,239,610	49,637,581	
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	42,131,148	98,873,574	
	Diakui dalam Tier 1		458,333	d.
12.	Setoran jaminan	12,713	12,713	
13.	Liabilitas antarkantor	-	-	
14.	Liabilitas lainnya	68,575,779	98,456,228	
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>1,536,511,572</b>	<b>1,648,534,888</b>	
<b>EKUITAS</b>				
15.	Modal disetor			
	a. Modal dasar	15,000,000	15,000,000	e.
	b. Modal yang belum disetor -/-	- 7,422,050	- 7,422,050	e.
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	- 3,614,321	- 3,614,321	e.
16.	Tambahan modal disetor			
	a. Agio	76,245,954	75,853,127	e.
	b. Disagio -/-	-	-	
	c. Dana setoran modal	-	-	
	d. Lainnya	342,251	2,100,831	
17.	Penghasilan komprehensif lain			
	a. Keuntungan	19,969,293	226,680	
	Diakui dalam Tier 1		20,118,055	f.
	b. Kerugian -/-	- 4,665,950	- 7,283,362	
	Diakui dalam Tier 1		2,673,174	f.
18.	Cadangan			
	a. Cadangan umum	3,022,685	-	
	Diakui dalam Tier 1		3,022,685	f.
	b. Cadangan tujuan	-	-	
19.	Laba/rugi			
	a. Tahun-tahun Lalu	146,706,039	2,104,484	
	Diakui dalam Tier 1		148,484,390	g.
	b. Tahun Berjalan	53,153,258	682,628	
	c. Diakui dalam Tier 1		59,417,235	g.
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	-	
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>		<b>298,737,159</b>	<b>311,363,556</b>	
20.	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	4,653,754	
			454,832	h.
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>298,737,159</b>	<b>316,472,142</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>1,835,248,731</b>	<b>1,965,007,030</b>	

Pengungkapan Kualitas Kredit atas Aset (CR1)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	a	b		d	e		
1	Kredit	137,986,390	1,008,096,116	77,009,890	57,924,952	19,084,938	1,069,072,616
2	Surat Berharga	0	290,676,869	65,374	0	65,374	290,611,495
3	Transaksi Rekening Administratif	8,804,892	197,125,074	5,386,903	4,239,226	1,147,677	200,543,063
4	<b>Total</b>	<b>146,791,282</b>	<b>1,495,898,059</b>	<b>82,462,167</b>	<b>62,164,178</b>	<b>20,297,989</b>	<b>1,560,227,174</b>

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

	Nilai Tercatat Bruto		CKPN	CKPN		CKPN (Pendekatan IRB)	Nilai Bersih (a+b-c)
	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Tagihan yang Belum Jatuh Tempo		Stage 2 dan Stage 3	Stage 1		
	a	b		d	e		
1	Kredit	142,339,380	1,132,170,905	87,538,517	63,521,233	24,017,284	1,186,971,768
2	Surat Berharga	0	296,328,506	66,795	0	66,795	296,261,711
3	Transaksi Rekening Administratif	8,816,218	197,261,760	5,386,968	4,239,291	1,147,677	200,691,010
4	<b>Total</b>	<b>151,155,598</b>	<b>1,625,761,171</b>	<b>92,992,280</b>	<b>67,760,524</b>	<b>25,231,756</b>	<b>1,683,924,489</b>

3) Pengungkapan Tambahan

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi.

Pengungkapan Mutasi Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo (CR2)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	157,791,847
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	36,108,904
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	17,068,875
4	Nilai hapus buku	16,204,327
5	Perubahan lain	-22,641,159
6	<b>Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)</b>	137,986,390

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

		a
1	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada periode pelaporan terakhir	163,823,954
2	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo sejak periode pelaporan terakhir	37,486,143
3	Kredit dan Surat Berharga yang kembali menjadi tagihan yang belum jatuh tempo	19,101,898
4	Nilai hapus buku	16,549,471
5	Perubahan lain	-23,319,348
6	<b>Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Tempo pada akhir periode pelaporan (1+2-3-4+5)</b>	142,339,380

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023										
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah										
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
a	b	c	d	e	f	g	f	i	j	k	l	
1	Tagihan kepada Pemerintah	406,510,805	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,001	407,717,806
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	89,613,901	749,987	0	0	6,631,633	1,882	666,841	1,763,030	0	0	99,427,274
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tagihan kepada Bank	63,815,228	2,805	0	0	5,076	2,906	2,283	0	0	0	63,828,298
5	Tagihan berupa Covered Bond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	2,682,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,595
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lain	5,560,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,560,175
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	12,238,116	21,327,795	8,235,359	4,120,161	15,235,886	18,957,698	19,385,793	24,097,718	0	0	123,598,526
9	Kredit Beragun Properti Komersial	3,776,565	5,147,960	2,060,976	1,336,583	5,837,216	2,622,677	5,455,095	7,708,663	0	0	33,945,735
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	1,900,894	3,748,578	703,073	68,677	152,725	2,294,804	279,555	608,508	0	0	9,756,815
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	9,559,254	36,995,284	12,100,139	10,780,419	18,682,474	10,818,992	12,531,402	25,391,590	0	0	136,859,554
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	103,055,001	54,962,483	75,417,509	32,565,302	13,589,473	82,304,455	86,339,094	68,684,162	7,853,317	524,770,796	
13	Tagihan kepada Korporasi	136,814,743	14,369,731	2,706,404	2,682,446	12,285,277	7,264,781	12,409,380	15,640,558	15,408,510	219,581,829	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	12,837,462	12,781,888	6,160,041	2,119,814	16,458,776	10,811,566	10,364,498	10,559,118	325,037	82,418,200	
15	Aset Lainnya	49,190,485	9,325,491	4,673,910	2,970,423	7,726,633	9,068,768	7,098,440	11,028,537	2,442,739	103,525,425	
	<b>TOTAL</b>	<b>897,555,223</b>	<b>159,412,002</b>	<b>112,057,410</b>	<b>56,643,825</b>	<b>96,605,169</b>	<b>144,148,530</b>	<b>154,532,381</b>	<b>165,481,884</b>	<b>27,236,604</b>	<b>1,813,673,028</b>	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023										
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah										
		Jakarta	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Indonesia Timur	Jawa Barat	Jawangah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
a	b	c	d	e	f	g	f	i	j	k	l	
1	Tagihan kepada Pemerintah	410,961,590	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,456	412,202,046
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	90,208,788	749,987	0	0	6,631,633	1,882	666,841	1,763,030	3,380	100,025,541	
3	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tagihan kepada Bank	67,566,541	65,394	16,247	0	21,653	22,992	27,074	36,034	626	67,756,562	
5	Tagihan berupa Covered Bond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	2,682,595	0	0	0	0	0	0	0	579,289	3,261,884	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lain	7,513,064	5,039	1,308	0	1,335	1,617	1,996	2,901	50	7,527,310	
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	12,371,192	21,339,449	8,235,359	4,120,161	15,240,599	18,963,002	19,403,953	24,237,698	0	123,911,411	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	4,098,047	5,149,249	2,060,976	1,336,583	5,837,640	2,622,677	5,462,613	7,756,967	0	34,324,753	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	1,900,894	3,757,579	703,073	68,677	152,725	2,294,804	279,555	608,508	0	9,765,816	
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	10,245,686	36,996,975	12,100,139	10,780,419	18,682,989	10,819,462	12,532,515	25,502,737	0	137,660,921	
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	117,627,492	82,538,434	80,695,689	32,565,302	30,570,942	94,470,835	102,379,199	93,359,473	8,060,254	642,267,619	
13	Tagihan kepada Korporasi	140,267,309	14,569,394	2,756,655	2,682,446	12,340,446	7,383,467	12,491,701	15,865,202	15,623,809	223,980,430	
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	14,972,194	13,100,146	6,234,048	2,119,814	16,545,302	10,907,898	10,510,452	10,942,171	332,406	85,664,433	
15	Aset Lainnya	59,533,442	14,065,397	5,904,306	2,970,423	8,982,068	10,589,908	8,976,299	13,757,421	3,028,636	127,807,899	
	<b>TOTAL</b>	<b>939,948,835</b>	<b>192,337,042</b>	<b>118,707,799</b>	<b>56,643,825</b>	<b>115,007,331</b>	<b>158,078,545</b>	<b>172,732,199</b>	<b>193,832,142</b>	<b>28,868,906</b>	<b>1,976,156,624</b>	

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)  
 2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

i) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)																
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	f	i	j	k	l	m	n	o	p	q
<b>31 Desember 2023</b>																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	3.178.392	-	-	-	-	-	13.330.853	2.891.967	21.427	70.512	129.733.902	26.062.864	9.890.490	-
2	Pertambangan dan Pengolahan	-	1.827.782	-	-	-	-	-	914.070	281.666	38.659	1.969	3.469.333	19.403.852	213.743	-
3	Industri Pengolahan	-	19.508.873	-	-	-	-	-	8.378.200	3.409.854	1.780.503	18.327	52.667.192	33.026.692	6.284.426	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	16.553.650	-	-	-	-	-	384.183	120.465	1.479.759	1.177	10.217.563	10.780.671	221.983	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	268.412	96.131	-	576	431.816	61.883	109.711	-
6	Konstruksi	-	13.976.385	-	-	-	-	-	5.300.790	975.166	5.488.067	2.348	2.100.416	12.439.804	5.980.898	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	15.469.102	-	-	-	-	-	80.293.960	21.635.326	107.300	180.166	183.156.757	23.809.261	39.021.474	-
8	Pengangkutan dan Perjudian	-	5.234.811	-	-	-	-	-	1.820.037	336.655	7.271	10.212	5.048.795	7.376.637	1.854.483	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	33.267	-	-	-	-	-	2.845.305	1.091.871	860	22.740	13.241.424	1.927.466	2.905.647	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	957.082	-	-	-	-	-	706.006	113.244	1.571	1.037	246.176	413.383	64.142	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	10.997.808	-	58.889.157	-	2.481.022	-	103.004	96.010	-	815	254.905	2.780.823	49.436	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	848.551	344.197	10.468	10.543	2.145.467	421.673	529.327	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	310.515	86.298	-	288	126.032	66.681	72.786	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perijinan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	4.175	-	-	-	-	-	1.447.169	463.440	7.611	7.902	2.052.769	1.644.076	675.850	-
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	406.510.805	-	-	-	-	-	-	40.620	130.598	-	310	4.824	388.275	2.805	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	183.901	115.146	-	1.274	252.917	201.360	81.094	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	778.305	460.408	-	5.878	877.239	545.972	262.116	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	129.344	31.617	-	798	372.401	34.988	404.214	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	7.246.567	-	-	-	-	-	4.776.380	1.145.387	812.694	3.237.607	50.457.135	15.544.379	5.628.601	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	251.957	42.183	-	705	353.031	122.905	170.069	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	99	-	-	-	-	-	448.916	72.343	-	133.263.047	65.500.940	17.803.539	7.950.178	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1.207.001	4.439.278	-	4.939.141	-	201.673	5.560.175	39.048	5.764	-	1.180	486	213	-	-
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	2.069.063	44.714.473	-	2.069.063	44.714.473	45.025	103.525.425	-
<b>TOTAL</b>		<b>407.717.906</b>	<b>99.427.272</b>	-	<b>63.828.298</b>	-	<b>2.682.595</b>	<b>5.560.175</b>	<b>123.598.528</b>	<b>33.945.736</b>	<b>9.756.816</b>	<b>136.859.553</b>	<b>524.770.796</b>	<b>219.581.829</b>	<b>82.418.200</b>	<b>103.525.425</b>

ii) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)																
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Kecil	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
a	b	c	d	e	f	g	f	i	i	k	l	m	n	o	p	q
<b>31 Desember 2023</b>																
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	3.378.664	-	-	-	-	-	13.355.302	13.893.102	21.427	70.512	130.112.101	27.127.275	10.959.449	-
2	Pertambangan dan Pengolahan	-	1.827.782	-	-	-	-	-	914.949	282.417	38.659	1.969	3.675.012	19.490.298	213.705	-
3	Industri Pengolahan	-	19.508.873	-	-	-	-	-	8.387.069	4.497.791	1.780.503	18.327	53.802.817	33.614.130	6.284.947	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	16.553.650	-	-	-	-	-	384.183	120.657	1.479.759	1.177	10.234.574	10.800.360	224.273	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	-	-	-	-	-	-	268.433	96.131	-	576	431.887	61.883	110.511	-
6	Konstruksi	-	13.976.385	-	-	-	-	-	5.322.276	1.303.215	5.496.074	2.348	2.509.754	12.527.872	6.372.186	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	15.469.102	-	-	-	-	-	80.369.880	6.913.167	107.300	180.166	184.584.971	24.002.841	39.220.231	-
8	Pengangkutan dan Perjudian	-	5.234.811	-	-	-	-	-	1.822.057	337.430	7.271	10.700	5.437.216	7.533.023	1.884.956	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	33.267	-	-	-	-	-	2.846.234	1.092.332	860	22.740	13.366.944	1.927.466	2.924.606	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	957.082	-	-	-	-	-	872.686	115.985	1.571	299.007	326.842	413.383	163.695	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.729.737	10.997.808	-	59.656.683	-	2.481.022	1.949.673	106.739	97.956	-	331.892	825.360	2.816.051	52.724	188.437
12	Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	850.329	344.197	10.468	10.543	2.200.253	421.673	636.382	-
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	314.633	88.420	-	288	559.437	147.507	85.510	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perijinan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	4.175	-	-	-	-	-	1.447.414	464.440	7.611	7.902	2.754.545	1.751.541	791.626	-
15	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	406.510.805	-	-	-	-	-	-	40.620	130.598	-	310	4.824	388.275	2.805	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	183.964	115.146	-	1.274	363.491	201.360	81.740	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	782.744	460.865	-	5.878	1.112.062	550.373	271.205	-
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	128.344	31.617	-	798	373.050	34.988	405.164	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	7.246.567	-	-	-	-	-	4.776.558	3.041.612	812.694	3.237.607	50.528.570	15.544.379	5.628.612	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	252.636	42.183	-	705	431.070	122.905	171.781	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-	-	-
22	Rumah Tangga	-	99	-	-	-	-	-	448.916	75.084	-	133.263.047	65.500.940	17.803.539	8.049.732	-
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2.961.504	4.839.274	-	8.099.879	-	780.862	5.577.636	41.051	980.128	92	23.249	111.909.977	46.676.863	1.243.886	127.619.462
24	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	2.295	274	-	169.904	1.218.089	22.246	6.395	-
<b>TOTAL</b>		<b>412.202.046</b>	<b>100.025.540</b>	-	<b>67.756.561</b>	-	<b>3.261.884</b>	<b>7.527.309</b>	<b>123.911.411</b>	<b>34.324.753</b>	<b>9.765.816</b>	<b>137.660.919</b>	<b>642.267.619</b>	<b>223.980.430</b>	<b>85.664.433</b>	<b>127.807.899</b>

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

3) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan Kepada Pemerintah	35,487,606	65,165,251	42,987,809	58,918,211	205,158,929	407,717,806
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	29,652,067	6,869,468	1,104,147	1,564,992	60,236,598	99,427,273
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	1,429,277	778,878	725,808	2,730,903	58,163,432	63,828,298
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	0	0	0	0	0	0
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1,507,634	1,137,548	36,658	754	0	2,682,594
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lain	0	0	0	0	5,560,175	5,560,175
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	70,462,431	29,556,138	21,229,038	2,243,116	107,802	123,598,526
9	Kredit Beragun Properti Komersial	18,677,230	6,445,734	5,945,709	2,867,050	10,014	33,945,736
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4,935,918	883,343	1,856,455	859,879	1,221,221	9,756,816
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	1,344,904	9,569,896	16,985,334	108,958,298	1,121	136,859,553
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	80,451,453	219,951,008	126,902,772	60,933,540	36,532,023	524,770,796
13	Tagihan kepada Korporasi	87,424,992	27,426,827	16,312,520	33,531,902	54,885,588	219,581,829
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	21,892,947	25,544,089	16,467,327	10,156,653	8,357,183	82,418,200
15	Aset Lainnya	0	0	0	0	103,525,425	103,525,425
	<b>TOTAL</b>	<b>353,266,459</b>	<b>393,328,181</b>	<b>250,553,578</b>	<b>282,765,298</b>	<b>533,759,512</b>	<b>1,813,673,027</b>

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan Kepada Pemerintah	37,013,795	65,823,151	43,578,731	60,593,985	205,192,383	412,202,046
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	29,949,139	6,969,010	1,104,147	1,763,265	60,239,978	100,025,540
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0
4	Tagihan Kepada Bank	2,352,449	830,388	733,739	2,730,903	61,109,083	67,756,561
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	0	0	0	0	0	0
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1,507,634	1,137,548	36,658	754	579,290	3,261,884
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lain	78	0	0	1,949,673	5,577,558	7,527,309
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	70,578,398	29,579,952	21,246,331	2,399,593	107,137	123,911,411
9	Kredit Beragun Properti Komersial	18,740,532	6,449,953	5,953,050	3,171,205	10,014	34,324,753
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	4,944,918	883,343	1,856,455	859,879	1,221,221	9,765,816
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	1,820,336	9,763,733	17,023,637	109,052,093	1,121	137,660,919
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	81,344,500	222,379,779	130,582,942	61,614,235	146,346,163	642,267,619
13	Tagihan kepada Korporasi	88,287,185	28,143,238	17,098,071	33,802,372	56,649,565	223,980,430
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	22,398,051	25,937,649	16,617,292	11,432,391	9,279,049	85,664,433
15	Aset Lainnya	815,395	7,605	993,712	5,710	125,985,476	127,807,899
	<b>TOTAL</b>	<b>359,752,410</b>	<b>397,905,350</b>	<b>256,824,766</b>	<b>289,376,057</b>	<b>672,298,040</b>	<b>1,976,156,622</b>

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)  
4) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2023									
		Wilayah									
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Tagihan	957,020,452	60,268,286	118,681,061	157,337,642	167,099,510	180,051,516	173,655,823	119,104,996	28,805,938	1,962,025,225
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	30,020,242	3,167,934	33,486,056	17,657,389	15,996,958	17,671,263	19,954,389	8,241,426	619,436	146,815,093
	a. Belum Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Telah jatuh Tempo	30,020,242	3,167,934	33,486,056	17,657,389	15,996,958	17,671,263	19,954,389	8,241,426	619,436	146,815,093
3	CKPN - Stage 1	2,093,224	595,363	2,817,001	2,944,119	2,719,316	3,841,283	3,414,215	1,203,365	664,521	20,292,407
4	CKPN - Stage 2	10,045,625	456,065	12,554,569	2,865,633	2,050,348	2,629,077	3,060,761	1,282,105	37,003	34,981,187
5	CKPN - Stage 3	7,382,247	521,096	4,308,229	3,412,385	3,176,894	4,031,749	3,555,185	533,764	267,023	27,188,572
6	Tagihan yang hapus buku	3,550,190	1,008,777	7,097,888	4,318,633	5,025,546	5,804,146	4,830,500	1,454,740	-	33,090,420

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2023									
		Wilayah									
		Jakarta	Indonesia Tengah & Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Bali & Nusa Tenggara	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Tagihan	1,002,516,282	85,839,500	138,541,896	172,203,504	184,494,742	207,054,295	181,470,286	125,482,169	32,590,895	2,130,193,568
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	38,717,845	4,336,552	34,366,873	18,294,025	16,851,121	19,629,049	20,253,892	8,386,488	619,436	161,455,279
	a. Belum Jatuh Tempo	6,253,780	542,572	621,661	425,939	611,595	1,461,810	244,897	113,616	-	10,275,870
	b. Telah jatuh Tempo	32,464,065	3,793,980	33,745,212	17,868,086	16,239,526	18,167,239	20,008,995	8,272,871	619,436	151,179,409
3	CKPN - Stage 1	2,856,233	1,275,672	3,409,040	3,338,863	3,219,040	4,682,190	3,589,729	1,318,250	664,521	24,353,536
4	CKPN - Stage 2	12,393,401	509,064	12,985,739	3,093,584	2,370,831	3,246,713	3,221,989	1,387,157	37,003	39,245,482
5	CKPN - Stage 3	7,891,438	624,311	4,477,154	3,503,617	3,300,509	4,292,706	3,601,936	561,930	267,023	28,520,623
6	Tagihan yang hapus buku	4,222,631	1,103,991	7,489,129	4,531,415	5,340,899	6,296,679	4,966,643	1,544,059	-	35,495,447

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)  
5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

**i) Bank secara Individu**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum jatuh tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>31 Desember 2023</b>							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	202.253.310	-	19.008.964	3.781.594	3.734.647	4.470.482	140.688
2	Pertambangan dan Penggalian	29.955.212	-	2.766.070	169.684	883.331	1.607.217	18.465
3	Industri pengolahan	142.639.757	-	17.609.600	1.453.558	7.014.841	4.324.496	99.205
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	41.672.822	-	236.522	213.733	46.911	13.982	19.994
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	1.056.067	-	154.673	18.224	21.525	19.942	916
6	Konstruksi	53.400.664	-	10.140.722	244.184	4.144.547	672.381	36.543
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	400.187.630	-	59.839.758	7.293.621	8.218.697	10.842.644	488.625
8	Pengangkutan dan Pergudangan	24.518.010	-	3.374.247	277.117	1.500.192	258.415	14.417
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	24.842.159	-	4.734.293	494.973	1.148.877	545.564	22.109
10	Informasi dan Komunikasi	2.694.991	-	141.856	31.376	11.539	62.182	1.573
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	79.178.714	-	72.179	66.782	6.292	16.949	37.806
12	Real Estat	4.740.432	-	776.198	89.879	126.753	96.996	4.522
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	728.368	-	107.270	11.567	14.665	18.705	2.432
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	6.861.793	-	953.637	112.315	133.190	126.051	6.862
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	425.921.096	-	3.166	197.887	533	163	200.568
16	Pendidikan	908.670	-	115.648	18.773	15.615	17.650	445
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.186.072	-	383.012	61.310	56.559	60.251	2.064
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	2.069.903	-	1.463.100	13.933	971.536	40.572	1.834
19	Aktivitas Jasa Lainnya	99.370.268	-	12.189.031	1.696.219	4.968.131	1.208.462	96.552
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.058.759	-	249.210	15.318	32.521	39.595	1.484
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	223	-	-	4	-	0	0
22	Rumah Tangga	239.827.846	-	12.437.481	3.428.389	1.686.736	2.544.446	424.380
23	Bukan Lapangan Usaha	1.945	-	0	20	0	0	1
24	Lainnya	174.950.514	-	58.459	601.948	243.549	201.425	31.468.923
	<b>TOTAL</b>	<b>1,962,025,225</b>	<b>-</b>	<b>146,815,093</b>	<b>20,292,407</b>	<b>34,981,187</b>	<b>27,188,572</b>	<b>33,090,420</b>

**ii) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum jatuh tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>31 Desember 2023</b>							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219.746.966	3.217.834	19.259.934	4.688.265	4.120.763	4.595.214	483.391
2	Pertambangan dan Penggalian	30.323.168	89.535	2.767.949	176.863	911.674	1.608.588	42.080
3	Industri pengolahan	145.646.713	715.071	17.679.831	1.505.964	7.035.777	4.371.502	574.215
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	41.738.324	14.702	238.553	215.171	46.978	14.715	20.134
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	1.064.760	1.560	156.175	18.564	22.326	21.127	1.229
6	Konstruksi	55.039.744	993.721	10.187.242	261.041	4.273.565	705.771	55.764
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	446.273.362	2.465.050	60.737.068	9.088.786	9.588.650	11.351.726	1.641.779
8	Pengangkutan dan Pergudangan	25.293.471	48.841	3.391.152	287.057	1.501.609	279.145	28.884
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	24.992.602	25.040	4.736.773	495.621	1.149.344	547.522	23.783
10	Informasi dan Komunikasi	2.797.735	26.144	142.004	31.759	11.758	62.440	2.064
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	100.757.495	441.732	264.504	72.946	6.656	210.806	97.254
12	Real Estat	4.804.001	14.228	776.214	90.164	127.071	97.609	27.113
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	1.265.663	57.013	109.656	13.502	15.515	22.389	7.019
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	7.814.219	141.306	973.615	117.054	137.586	150.928	15.154
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	425.921.096	-	3.166	197.887	533	163	200.568
16	Pendidikan	1.020.513	1.354	116.121	19.151	15.669	18.155	568
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.681.946	51.730	393.765	71.747	85.120	67.773	9.954
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	2.071.514	962	1.463.100	13.952	971.536	40.572	1.834
19	Aktivitas Jasa Lainnya	101.058.900	114.033	12.217.958	1.762.412	5.042.067	1.228.611	141.901
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.737.205	573.600	277.784	19.519	36.829	58.819	1.599
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	223	-	-	4	-	0	0
22	Rumah Tangga	239.827.846	-	12.437.481	3.428.389	1.686.736	2.544.446	424.380
23	Bukan Lapangan Usaha	1.447.067	239.352	11.626	7.251	2.637	22.903	14.136
24	Lainnya	245.869.033	1.043.063	2.837.736	1.770.468	2.455.084	499.700	31.680.645
	<b>TOTAL</b>	<b>2,130,193,568</b>	<b>10,275,870</b>	<b>151,179,409</b>	<b>24,353,537</b>	<b>39,245,482</b>	<b>28,520,623</b>	<b>35,495,447</b>

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

5) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

i) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum jatuh tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>31 Desember 2023</b>							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	202,253,310	-	19,008,964	3,781,594	3,734,647	4,470,482	140,698
2	Pertambangan dan Penggalian	29,955,212	-	2,766,070	169,684	883,331	1,607,217	18,465
3	Industri pengolahan	142,639,757	-	17,609,600	1,453,558	7,014,841	4,324,496	99,205
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	41,672,822	-	236,522	213,733	46,911	13,982	19,994
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	1,056,067	-	154,673	18,224	21,525	19,942	916
6	Konstruksi	53,400,664	-	10,140,722	244,184	4,144,547	672,381	36,543
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	400,187,630	-	59,839,758	7,293,621	8,218,697	10,842,644	488,625
8	Pengangkutan dan Pergudangan	24,518,010	-	3,374,247	277,117	1,500,192	258,415	14,417
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	24,842,159	-	4,734,293	494,973	1,148,877	545,564	22,109
10	Informasi dan Komunikasi	2,694,991	-	141,856	31,376	11,539	62,182	1,573
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	79,178,714	-	72,179	66,782	6,292	16,949	37,806
12	Real Estat	4,740,432	-	776,198	89,879	126,753	96,996	4,522
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	728,368	-	107,270	11,567	14,665	18,705	2,432
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	6,861,793	-	953,637	112,315	133,190	126,051	6,862
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	425,921,096	-	3,166	197,887	533	163	200,568
16	Pendidikan	908,670	-	115,648	18,773	15,615	17,650	445
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3,186,072	-	383,012	61,310	56,559	60,251	2,064
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	2,069,903	-	1,463,100	13,933	971,536	40,572	1,834
19	Aktivitas Jasa Lainnya	99,370,268	-	12,189,031	1,696,219	4,968,131	1,208,462	96,552
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1,058,759	-	249,210	15,318	32,521	39,595	1,484
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	223	-	-	4	-	0	0
22	Rumah Tangga	239,827,846	-	12,437,481	3,428,389	1,686,736	2,544,446	424,380
23	Bukan Lapangan Usaha	1,945	-	0	20	0	0	1
24	Lainnya	174,950,514	-	58,459	601,948	243,549	201,425	31,468,923
	<b>TOTAL</b>	<b>1,962,025,225</b>	<b>-</b>	<b>146,815,093</b>	<b>20,292,407</b>	<b>34,981,187</b>	<b>27,188,572</b>	<b>33,090,420</b>

## ii) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum jatuh tempo	Telah jatuh tempo				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>31 Desember 2023</b>							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219,746,966	3,217,834	19,259,934	4,688,265	4,120,763	4,595,214	483,391
2	Pertambangan dan Penggalian	30,323,168	89,535	2,767,949	176,863	911,674	1,608,588	42,080
3	Industri pengolahan	145,646,713	715,071	17,679,831	1,505,964	7,035,777	4,371,502	574,215
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	41,738,324	14,702	238,553	215,171	46,978	14,715	20,134
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	1,064,760	1,560	156,175	18,564	22,326	21,127	1,229
6	Konstruksi	55,039,744	993,721	10,187,242	261,041	4,273,565	705,771	55,764
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	446,273,362	2,465,050	60,737,068	9,088,786	9,588,650	11,351,726	1,641,779
8	Pengangkutan dan Pergudangan	25,293,471	48,841	3,391,152	287,057	1,501,609	279,145	28,884
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	24,992,602	25,040	4,736,773	495,621	1,149,344	547,522	23,783
10	Informasi dan Komunikasi	2,797,735	26,144	142,004	31,759	11,758	62,440	2,064
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	100,757,495	441,732	264,504	72,946	6,656	210,806	97,254
12	Real Estat	4,804,001	14,228	776,214	90,164	127,071	97,609	27,113
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	1,265,663	57,013	109,656	13,502	15,515	22,389	7,019
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	7,814,219	141,306	973,615	117,054	137,586	150,928	15,154
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	425,921,096	-	3,166	197,887	533	163	200,568
16	Pendidikan	1,020,513	1,354	116,121	19,151	15,669	18,155	568
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3,681,946	51,730	393,765	71,747	85,120	67,773	9,954
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	2,071,514	962	1,463,100	13,952	971,536	40,572	1,834
19	Aktivitas Jasa Lainnya	101,058,900	114,033	12,217,958	1,762,412	5,042,067	1,228,611	141,901
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1,737,205	573,600	277,784	19,519	36,829	58,819	1,599
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	223	-	-	4	-	0	0
22	Rumah Tangga	239,827,846	-	12,437,481	3,428,389	1,686,736	2,544,446	424,380
23	Bukan Lapangan Usaha	1,447,067	239,352	11,626	7,251	2,637	22,903	14,136
24	Lainnya	245,869,033	1,043,063	2,837,736	1,770,468	2,455,084	499,700	31,680,645
	<b>TOTAL</b>	<b>2,130,193,568</b>	<b>10,275,870</b>	<b>151,179,409</b>	<b>24,353,537</b>	<b>39,245,482</b>	<b>28,520,623</b>	<b>35,495,447</b>

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

6) Pengungkapan Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan

**(1) Bank secara Individu**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3,876,487	7,228,262	126,881,641	137,986,390
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3,876,487</b>	<b>7,228,262</b>	<b>126,881,641</b>	<b>137,986,390</b>

**(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Eksposur	31 Desember 2023			
		Tagihan Berdasarkan Hari Tunggakan			
		> 90 hari s.d. 120 hari	> 120 hari s.d. 180 hari	> 180 hari	Total
a	b	c	d	e	f
1	Kredit yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4,606,426	7,698,198	130,034,756	142,339,380
2	Surat Berharga yang termasuk dalam Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4,606,426</b>	<b>7,698,198</b>	<b>130,034,756</b>	<b>142,339,380</b>

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

1) Pengungkapan Aset *Performing* dan *Non Performing*

(1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i> (Kualitas KL, D, M)					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
						Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f	g	h		
1	Surat Berharga	290,676,869	65,374	0	0	0	0	0	0
2	Kredit	1,110,309,367	49,912,359	35,773,138	27,097,530	0	0	0	0
	a. Korporasi	195,582,404	16,332,543	7,678,995	7,678,995	0	0	0	0
	b. Ritel	421,954,125	13,930,294	15,179,926	9,932,529	0	0	0	0
	c. Mikro	492,772,838	19,649,522	12,914,217	9,486,006	0	0	0	0
3	Transaksi Rekening Administratif	197,125,074	1,147,677	8,804,892	4,239,226	0	0	0	0

(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

		<i>Performing</i> (Kualitas L dan DPK)		<i>Non Performing</i>					
				Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Tagihan yang Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Memiliki Tunggakan > 90 Hari		Memiliki Tunggakan ≤ 90 Hari	
						Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
a	b	c	d	e	f	g	h		
1	Surat Berharga	296,328,506	66,795	0	0	0	0	0	0
2	Kredit	1,237,758,319	58,792,813	36,751,966	28,745,704	0	0	0	0
	a. Korporasi	261,966,783	19,523,079	7,720,902	7,936,191	0	0	0	0
	b. Ritel	431,368,590	15,043,169	15,551,934	10,510,175	0	0	0	0
	c. Mikro	544,422,945	24,226,565	13,479,130	10,299,339	0	0	0	0
3	Transaksi Rekening Administratif	197,273,086	1,147,742	8,804,892	4,239,226	0	0	0	0

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

2) Pengungkapan Aset Restrukturisasi *Performing* dan *Non Performing*

**(1) Bank secara Individu**

(dalam jutaan Rupiah)

		<i>Performing</i>		<i>Non Performing</i>		<i>Stage 1</i>		<i>Stage 2</i>		<i>Stage 3</i>	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	g	h
1	Surat Berharga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredit	82,844,236	26,206,689	19,663,897	16,238,600	0	0	83,780,712	27,123,416	18,727,421	15,321,872
	a. Korporasi	20,402,087	15,183,037	6,718,800	6,718,800	0	0	21,275,229	16,056,179	5,845,658	5,845,658
	b. Ritel	33,200,597	4,926,515	5,849,825	3,855,598	0	0	33,268,294	4,973,664	5,782,128	3,808,449
	c. Mikro	29,241,552	6,097,137	7,095,272	5,664,202	0	0	29,237,189	6,093,573	7,099,635	5,667,765
3	Transaksi Rekening Administrat	1,835,339	1,089,143	170,406	99,040	0	0	1,835,338	27,123,416	170,406	15,321,873

**(2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak**

(dalam jutaan Rupiah)

		<i>Performing</i>		<i>Non Performing</i>		<i>Stage 1</i>		<i>Stage 2</i>		<i>Stage 3</i>	
		Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN	Nilai Tercatat Bruto	CKPN
		a	b	c	d	e	f	g	h	g	h
1	Surat Berharga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kredit	85,429,359	26,881,505	19,839,043	16,346,331	0	0	86,417,172	27,798,284	18,902,515	15,429,551
	a. Korporasi	20,938,014	15,301,391	6,718,800	6,718,800	0	0	21,862,441	16,174,533	5,845,658	5,845,658
	b. Ritel	35,209,857	5,482,101	6,010,259	3,954,527	0	0	35,277,554	5,529,250	5,942,562	3,907,378
	c. Mikro	29,281,488	6,098,013	7,109,984	5,673,004	0	0	29,277,177	6,094,501	7,114,295	5,676,515
3	Transaksi Rekening Administrat	1,835,339	1,089,143	170,406	99,040	0	0	1,835,338	27,123,416	170,406	15,321,873

Pengungkapan Kuantitatif terkait Teknik MRK (CR3)

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	746,634,920	322,437,696	11,377,558	311,060,138	
2	Surat Berharga	290,611,495	0	0	0	
3	<b>Total</b>	1,037,246,415	322,437,696	11,377,558	311,060,138	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Te	75,743,441	4,317,997	27,821	4,290,176	

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

		Tagihan yang Tidak Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Teknik MRK	Tagihan yang Dijamin dengan Agunan	Tagihan yang Dijamin dengan Garansi, Penjaminan dan/atau Asuransi Kredit	Tagihan yang Dijamin dengan Derivatif Kredit
		a	b	c	d	e
1	Kredit	760,954,279	426,017,489	65,233,324	360,784,165	
2	Surat Berharga	296,261,711	0	0	0	
3	<b>Total</b>	1,057,215,990	426,017,489	65,233,324	360,784,165	
4	Kredit dan Surat Berharga yang Telah Jatuh Te	78,971,860	4,331,296	39,118	4,292,179	

1) Bank secara Individu

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	a	b	c	d	e	f
1 Tagihan kepada Pemerintah	407,717,806	0	407,717,806	0	0	0.00%
2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	55,373,510	91,464,928	55,303,632	44,053,763	49,143,799	49.46%
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0.00%
4 Tagihan kepada Bank	60,233,378	3,594,920	60,233,378	3,594,920	32,630,248	51.12%
Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>1)</sup>	2,610,161	72,434	2,610,161	72,434	992,335	36.99%
5 Tagihan berupa Covered Bond	0	0	0	0	0	0.00%
6 Tagihan kepada Korporasi - Ekspor Korporasi Umum <sup>2)</sup>	151,936,838	63,076,967	142,755,468	48,001,581	182,237,117	95.53%
Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0.00%
Ekspor Pembiayaan Khusus <sup>4)</sup>	18,847,820	1,988,976	18,004,685	795,590	21,395,443	113.80%
7 Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	5,560,175	0	5,560,175	0	13,900,438	250.00%
8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	515,413,419	18,691,586	295,264,021	9,357,377	248,538,179	81.59%
9 Kredit Beragun Properti	151,635,045	14,773,042	125,596,295	5,909,217	77,049,550	58.59%
Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Proper	119,262,252	10,840,684	96,918,214	4,336,274	53,602,369	52.94%
Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	0	0	0	0	0	0.00%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Pro	32,372,793	3,932,358	28,678,082	1,572,943	23,447,180	77.51%
Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	0	0	0	0	0	0.00%
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	8,372,395	3,461,053	7,889,220	1,384,421	12,969,127	139.85%
Kredit Pegawai/Pensiunan	136,859,086	1,168	136,859,086	467	68,429,777	50.00%
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	80,079,668	4,565,666	76,619,706	2,338,532	88,406,197	111.97%
11 Aset Lainnya	103,525,425	0	103,525,425	0	72,038,101	69.58%
12 Total	1,698,164,726	201,690,740	1,437,939,058	115,508,302	867,730,308	55.86%

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Sebelum Penerapan FKK dan Teknik MRK		Tagihan Bersih Setelah penerapan FKK dan Teknik MRK		ATMR dan Rata-Rata Bobot Risiko	
	Laporan Posisi Keuangan	TRA	Laporan Posisi Keuangan	TRA	ATMR	Rata-Rata Bobot Risiko (e/(c+d))
	a	b	c	d	e	f
1 Tagihan kepada Pemerintah	412,202,046	0	412,202,046	0	0	0.00%
2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	55,971,777	91,464,928	55,901,899	44,053,763	49,324,467	49.35%
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0	0	0	0.00%
4 Tagihan kepada Bank	64,161,641	3,594,920	63,945,742	3,594,920	33,416,849	49.48%
0 Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>1)</sup>	3,189,450	72,434	2,610,161	72,434	992,335	36.99%
5 Tagihan berupa Covered Bond	0	0	0	0	0	0.00%
6 Tagihan kepada Korporasi - Ekspor Korporasi Umum <sup>2)</sup>	156,331,008	63,088,045	146,837,507	48,006,012	186,242,517	95.59%
0 Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0.00%
0 Ekspor Pembiayaan Khusus <sup>4)</sup>	18,847,820	1,988,976	18,004,685	795,590	21,395,443	113.80%
7 Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	7,527,309	0	7,527,309	0	18,800,890	249.77%
8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	632,873,918	18,781,482	332,769,293	9,393,701	282,308,612	82.51%
9 Kredit Beragun Properti	152,312,674	14,808,727	126,273,924	5,923,491	77,612,869	58.71%
0 Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Proper	119,567,415	10,859,992	97,223,377	4,343,997	53,845,417	53.01%
0 Kredit Beragun Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	0	0	0	0	0	0.00%
0 Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Pro	32,745,259	3,948,736	29,050,548	1,579,494	23,767,452	77.60%
0 Kredit Beragun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti	0	0	0	0	0	0.00%
0 Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	8,381,395	3,461,053	7,889,220	1,384,421	12,982,627	139.86%
0 Kredit Pegawai/Pensiunan	137,660,452	1,168	137,660,452	467	68,830,460	50.00%
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	83,321,386	4,576,954	79,848,785	2,343,047	91,149,389	110.90%
11 Aset Lainnya	127,807,899	0	127,807,899	0	95,667,869	74.85%
12 Total	1,860,588,776	201,838,687	1,519,287,923	115,567,846	938,724,325	57.42%

3) Pengungkapan Tambahan

Eksposur TRA dikonversi menjadi ekuivalen eksposur kredit menggunakan FKK. FKK paling kecil yang digunakan Bank adalah sebesar 20% untuk eksposur TRA dalam bentuk kewajiban komitmen berupa L/C, FKK 40% diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk kewajiban komitmen (kelonggaran tarik) sedangkan FKK 100% diberikan untuk eksposur TRA dalam bentuk jaminan yang diterbitkan dalam rangka pengambilalihan risiko gagal bayar. CKPN yang diperhitungkan untuk perhitungan tagihan bersih merupakan CKPN atas aset yang teridentifikasi mengalami penurunan nilai, yaitu CKPN pada stage 2 dan stage 3. Teknik Mitigasi Risiko Kredit yang digunakan oleh Bank adalah agunan dan penjaminan/asuransi kredit, agunan berupa cash collateral, sedangkan penjaminan/asuransi kredit merupakan perusahaan asuransi berstatus BUMN. Kredit yang dijamin oleh

Pengungkapan Eksposur berdasarkan Kelas Aset dan Bobot Risiko (CR5)

																						(dalam jutaan rupiah)						
1) Bank secara Individu																						Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK						
Kategori Portofolio	0%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65 <sup>(3)</sup>	70%	75%	80%	85%	90%	100%	105%	110%	130%	150%	250%	400 <sup>(3)</sup>	1250 <sup>(3)</sup>	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK	
1	Tagihan kepada Pemerintah	407,717,806			0					0								0								0	407,717,806	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik				1,782,994					97,644,273								0								0	99,357,395	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0			0					0								0								0	0	
4	Tagihan kepada Bank				0					1,087,957								0								0	63,828,298	
	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>(1)</sup>				0					2,280,159								0								0	2,682,595	
5	Tagihan berupa Covered Bond				0					0								0								0	0	
6	Tagihan kepada Korporasi Umum <sup>(2)</sup>				0					3,252,649								0								0	190,757,049	
	Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain <sup>(1)</sup>				0					0								0								0	0	
	Eksposur Pembiayaan Khusus <sup>(1)</sup>				0					0								0								0	18,800,275	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya																	0								0	5,560,175	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel									2,494,984								464,584,412								47,399,994	10,291,406	304,621,398
9	Kredit Beracun Properti	0			0					0								0								0	0	
	Kredit Beracun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				16,912,137					6,791,567								0								0	101,254,487	
	tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>(3)</sup>				0					0								0								0	0	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>(3)</sup>				0					0								0								0	0	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>(3)</sup>				0					0								0								0	0	
	Kredit Beracun Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung secara Material pada Arus Kas Properti				0					0								0								0	0	
	Kredit Beracun Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				0					0								0								0	0	
	tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>(3)</sup>				0					0								0								0	30,251,025	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>(3)</sup>				0					0								0								0	0	
	dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>(3)</sup>				0					0								0								0	0	
	Kredit Beracun Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Arus Kas Properti				0					0								0								0	0	
	Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <sup>(3)</sup>									0								0								0	0	
																		2,050,967								0	9,273,641	
																										0	7,705,849	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo									10,736,393								38,443,172								0	33,238,634	
11	Aset Lainnya	31,515,575			0													71,953,348								0	56,502	
																										0	103,523,425	

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA (sebelum pengenaan FKK)	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih (Setelah pengenaan FKK dan Teknik MRK)
1	< 40%	486,951,516	6,258,676	2,503,470	478,414,463
2	40% - 70%	332,754,958	98,801,832	4,488,661	370,287,868
3	75%	488,732,062	5,136,702	573,177	288,647,838
4	85%	96,089,142	26,000,197	2,080,016	104,367,114
5	90% - 100%	238,871,075	62,004,401	3,082,558	279,722,376
6	100% - 130%	6,521,092	653,028	263,211	8,650,557
7	150%	39,684,717	2,830,904	329,067	37,796,969
8	250%	5,560,175	0	0	5,560,175
9	400%	0	0	0	0
10	1250%	0	0	0	0
11	<b>Total Tagihan Bersih</b>	<b>1,698,164,726</b>	<b>201,690,740</b>	<b>14,330,159</b>	<b>1,553,447,360</b>

2) Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Portofolio	0%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	60%	65 <sup>(3)</sup>	70%	75%	80%	85%	90%	100%	105%	110%	130%	150%	250%	400 <sup>(3)</sup>	1250 <sup>(3)</sup>	Lainnya	Tagihan Bersih Setelah FKK dan Teknik MRK
1 Tagihan kepada Pemerintah	412.202,046			0						0									0							0	412.202,046
2 Tagihan kepada Entitas Sektor Publik				2.177,801						97.847,659									0							0	99.955,662
3 Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0			0		0				0									0							0	0
4 Tagihan kepada Bank Tagihan kepada perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lain <sup>(1)</sup>				3.781,169		1.087,957				59.880,556				2.278,998					727,881							0	67.540,662
5 Tagihan berupa Covered Bond				0		0		0		0									0							0	0
6 Tagihan kepada Korporasi Umum <sup>(2)</sup> Tagihan kepada perusahaan efek dan lembaga jasa keuangan lain <sup>(3)</sup> Eksposur Pembiayaan Khusus <sup>(3)</sup>				23.121						3.362,292				112.252					45.877,699							145.468,156	194.843,520
7 Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya																							17,384	7.509,926	0	0	7.527,309
8 Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel										2.494,984																0	342.164,533
9 Kredit Beraturan Properti	0 <sup>(4)</sup>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredit Beraturan Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Anus Kas Properti	0			16.912,137	6.791,587	21.366,792			19.907,101	16.257,822				29.046,645	7.815,196				627,969							5.386,184	101.567,373
tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>(5)</sup>	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>(6)</sup>	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (tidak dijamin) <sup>(7)</sup>	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
Kredit Beraturan Properti Rumah Tinggal yang Pembayaranannya Bergantung secara Material pada Anus Kas Properti	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
Kredit Beraturan Properti Komersial yang Pembayaranannya Tidak Bergantung Secara Material pada Anus Kas Properti	0			0	0	0			0	4.753,212				17.830,948					11.519,419							221,175	30.630,042
tanpa pendekatan pembagian kredit <sup>(5)</sup>	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (dijamin) <sup>(6)</sup>	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
dengan menggunakan pendekatan pembagian kredit (tidak dijamin) <sup>(7)</sup>	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
Kredit Beraturan Properti Komersial yang Pembayaranannya Bergantung Secara Material pada Anus Kas Properti	0			0	0	0			0	0				0	0				0							0	0
Kredit Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi <sup>(8)</sup>	0			0	0	0			0	0				0	0				0							2.050,967	7.714,849
10 Tagihan yang Telah Jatuh Tempo										11.730,277																0	82.191,832
11 Aset Lainnya	32.169,703			0																						0	127.807,899

No	Bobot Risiko	Tagihan Bersih Laporan Posisi Keuangan	Tagihan Bersih TRA	Rata-Rata FKK	Tagihan Bersih
1	< 40%	496.868.350	2.503.470	2.503.470	487.536.109
2	40% - 70%	335.010.325	48.105.290	5.488.661	860.066.705
3	75%	606.470.236	3.476.692	347.669	305.469.988
4	85%	96.520.098	10.413.044	1.497.578	104.811.035
5	90% - 100%	269.974.756	49.489.813	2.749.434	1.580.870.523
6	105% - 130%	8.521.092	263.211	263.211	1.589.521.080
7	150%	39.713.993	1.316.326	263.265	37.826.302
8	250%	7.509.926	0	0	7.509.926
9	400%	0	0	0	0
10	1250%	0	0	0	0
11	Total Tagihan Bersih	1.860.588.776	115.567.846	13.103.288	4.974.611.648

## RISIKO KREDIT

### I. PENGUNGKAPAN INFORMASI KUALITATIF TERKAIT RISIKO KREDIT SECARA UMUM (CRA)

#### A. Model Bisnis yang tercermin dalam Komponen Profil Risiko Kredit Bank

Model bisnis untuk BRI secara individu tercermin dalam parameter/indikator yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit serta yang digunakan dalam penentuan besaran pencadangan risiko kredit, yang meliputi :

##### 1. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi

Dalam mengukur tingkat risiko konsentrasi kredit, BRI menggunakan parameter antara lain : Komposisi kredit yang diberikan terhadap total asset, saat ini sebesar 62,45% atau pada profil risiko Low; komposisi kredit non-korporasi (Micro, Consumer, Small, Medium) terhadap total kredit sebesar 81,95% pada profil risiko *Low to Moderate*; Komposisi kredit kepada 25 debitur (group) terbesar bukan bank diluar pihak terkait terhadap total kredit pada 13,36% atau profil risiko *Low*, serta komposisi kredit per-sektor ekonomi

##### 2. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan

Kualitas penyediaan dana tercermin pada indikator besarnya kredit kualitas rendah (LaR atau *Loan at Risk*) terhadap total kredit sebesar 12,54% dan terjaga pada tingkat risiko *low*. Besarnya kredit bermasalah terhadap total kredit (NPL) sebesar 3,12%. Kecukupan pencadangan tercermin pada rasio LaR coverage dan NPL coverage. Besarnya LaR coverage sebesar 53,59%, diatas *appetite* minimum 39,81%, sedangkan NPL coverage pada 215,27%.

##### 3. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana

Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana yaitu tercermin pada target pertumbuhan kredit tahunan serta target LDR atau *Loan to Deposit Ratio*. Penetapan target pertumbuhan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi likuiditas industri perbankan.

##### 4. Faktor eksternal

Beberapa faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas kredit antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat konsumsi, pertumbuhan export, tingkat suku bunga dan *unemployment rate*.

Model bisnis untuk BRI secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak tercermin dalam parameter/indikator yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit mencakup:

**1. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi**

Dalam mengukur risiko tingkat konsentrasi, Perusahaan Anak menggunakan parameter antara lain sebagai berikut : Komposisi kredit, pembiayaan dan investasi yang diberikan terhadap total asset; Komposisi kredit UMKM; Komposisi kredit, pembiayaan dan investasi kepada debitur besar bukan bank diluar pihak terkait; serta Konsentrasi kredit per-sektor industri.

**2. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan**

Kualitas penyediaan dana tercermin pada indikator antara lain : Rasio kredit, pembiayaan dan investasi kualitas rendah (*LaR/Loan at Risk*) terhadap total kredit, pembiayaan dan investasi; Rasio kredit, pembiayaan dan investasi bermasalah terhadap total kredit, pembiayaan dan investasi (NPL); serta Kecukupan pencadangan tercermin pada *LaR coverage*, *NPL coverage* serta besarnya CKPN atas kredit terhadap total kredit.

**3. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana**

Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana yaitu tercermin pada target pertumbuhan kredit tahunan serta target LDR atau *Loan to Deposit Ratio*. Penetapan target pertumbuhan kredit dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kondisi likuiditas industri perbankan.

**4. Faktor eksternal**

Beberapa faktor eksternal dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun kualitas kredit antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat konsumsi, pertumbuhan export, tingkat suku bunga, harga emas dan *unemployment rate*.

**B. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit**

1. Kriteria dan pendekatan yang digunakan oleh BRI secara individu untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit adalah sebagai berikut:

Penyusunan Kebijakan dan Prosedur harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
- b. Hierarki dan kewenangan

- c. Lingkup pengaturan yang jelas
- d. Direktif, aplikatif dan mengandung unsur pengendalian.
- e. Berorientasi pada efektivitas dan bisnis yang berkelanjutan.

Penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) harus sesuai dengan organisasi, sehingga penerapan KPB adalah sebagai berikut:

- a. Wajib digunakan, diterapkan dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh seluruh pekerja yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara konsekuen dan konsisten.
- b. Berlaku juga bagi unit kerja luar negeri, namun dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan peraturan perbankan setempat.
- c. Untuk dapat mendukung penerapan dan pelaksanaan KPB, selain memahami dan mematuhi KPB dengan sebaik-baiknya, setiap pejabat kredit juga wajib:
  - 1) Memahami dan mematuhi pedoman pelaksanaan masing-masing bidang bisnis serta peraturan perkreditan lain dibidangnya, termasuk perubahannya.
  - 2) Memahami dan mematuhi peraturan-peraturan maupun kebijakan dari regulator, mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan serta semua masalah yang berkaitan dengan perkreditan, baik yang bersifat local, regional, nasional maupun yang berlingkup internasional.

Penetapan Limit Risiko Kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Limit Risiko Kredit ditetapkan untuk suatu segmen bisnis (unit kerja dan individu pekerja), sektor industri, nasabah (debitur) atau *counterparty*, pihak terkait, sektor ekonomi atau bentuk-bentuk penggolongan lainnya.
- b. Limit Risiko Kredit ditetapkan pada level portofolio atau level secara keseluruhan atas seluruh produk dan aktivitas yang memiliki eksposur berisiko kredit meliputi: portofolio kredit, transaksi surat berharga, transaksi *trade finance*, dan produk-produk dan aktivitas-aktivitas lain yang mengandung Risiko Kredit.
- c. Limit Risiko Kredit ditetapkan setiap tahun sesuai *risk appetite* dan ketentuan yang berlaku.
- d. Penetapan limit dilakukan dengan menggunakan data historis dan memperhitungkan data rata-rata dan standar deviasi selama periode pengambilan data.
- e. Adapun untuk parameter yang belum tersedia data historis sebagai penunjang, maka dapat ditetapkan secara *expert judgment* dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), data eksternal, keahlian, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh pemutus dan ketentuan regulasi yang berlaku.
- f. Dalam penetapan limit risiko selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, juga dapat mempertimbangkan faktor *forward looking* seperti variabel makroekonomi, *risk issue*, dan faktor-faktor lainnya.

- g. Divisi dalam SKMR yang membidangi bersama dengan Unit Kerja Operasional merumuskan dan mengusulkan obyek dan dimensi Limit Risiko Kredit kepada Direksi atau RMC untuk diputus dan ditetapkan.
2. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit

Pengelolaan kebijakan dan prosedur harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip keselarasan
- b. Prinsip kesesuaian kewenangan
- c. Prinsip efektivitas dan efisiensi
- d. Prinsip keberlanjutan
- e. Prinsip penatakerjaan dan aksesibilitas yang baik

Pendekatan yang digunakan untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit adalah sebagai berikut:

- a. *Business process approach* dengan menyusun kebijakan dan prosedur didalam setiap bisnis proses pembiayaan.
- b. *Risk scoring approach* dengan menyusun perangkat analisis berdasarkan statistical method untuk menilai profil risiko calon debitur secara individual didalam memprediksi probability of default (PD).
- c. Proses pengukuran dan perhitungan risiko pembiayaan secara corporate dilakukan dalam bentuk pengukuran profil risiko dan pemantauan *Risk Appetite Criteria* (RAC).

Penetapan limit risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Limit risiko kredit ditetapkan untuk suatu segmen bisnis (unit kerja dan karyawan), sektor industri, nasabah atau counterparty, pihak terkait, sektor ekonomi atau bentuk-bentuk penggolongan lainnya.
- b. Limit risiko kredit ditetapkan sesuai risk appetite, portofolio, RKAP dan ketentuan regulator maupun internal yang berlaku.
- c. Penetapan limit dilakukan dengan menggunakan data historis dan memperhitungkan data rata-rata dan standar deviasi selama periode pengambilan data.
- d. Adapun untuk parameter yang belum tersedia data historis sebagai penunjang, maka dapat ditetapkan secara expert judgment dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), data eksternal, keahlian, pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh pemutus dan ketentuan regulasi yang berlaku.
- e. Dalam penetapan limit risiko selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, juga dapat mempertimbangkan faktor forward looking seperti variabel makro ekonomi, risk issue dan faktor-faktor lainnya. Direksi menandatangani besaran penetapan limit risiko dalam

dokumen pernyataan limit risiko (Risk Appetite Statement- RAS) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.

- f. Limit konsentrasi pembiayaan dikelola dengan menyusun Financing Portfolio Guidelines, limitasi pembiayaan heavy equipment mining, pengaturan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) dan penetapan Putusan Delegasi Wewenang Pembiayaan (PDWP).
  - g. Limit risiko kredit ditetapkan antara lain meliputi limit untuk kewenangan pengambilan keputusan pembiayaan yang disesuaikan dengan kompetensi pengambilan keputusan dan tingkat risikonya serta mempertimbangkan agar tidak ada conflict of interest dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, penetapan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan (BWMP) termasuk batas wewenang penanganan pembiayaan bermasalah serta pendelegasian kewenangan memutus pembiayaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan perusahaan.
3. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Efek untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit. Kebijakan Manajemen Risiko mengatur prinsip-prinsip manajemen risiko, antara lain berisi:
- a. Kebijakan pengelolaan risiko.
  - b. Tata kelola Manajemen Risiko.
  - c. Framework Manajemen Risiko.
  - d. Penerapan / Proses Manajemen Risiko.
  - e. Kriteria Risiko.
  - f. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
  - g. Kebijakan Kewenangan Pemberian Persetujuan.
  - h. Kebijakan Transaksi Perdagangan Efek.
  - i. Kebijakan Marjin.
  - j. Kebijakan Tradable shares.
  - k. Kebijakan Short Term Warehouse.
  - l. Kebijakan Non-Performing Asset.
  - m. SOP Transaksi Marjin (pembukaan rekening marjin sampai penutupan rekening marjin serta perpanjangan marjin).
  - n. SOP Transaksi perdagangan efek.
- Pelaksanaan penerapan manajemen risiko kredit tercermin dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat *due diligence* dan analisa risiko atas transaksi maupun produk sebelum dijalankan oleh Divisi Bisnis. Due Diligence dan analisa risiko tersebut dilakukan oleh Divisi Bisnis dan Divisi Risk Management yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Evaluasi Risiko (MER) yang menjadi dasar atas pengambilan keputusan yang signifikan oleh Direksi maupun Komisaris.
  - b. Pemberian limit kredit (marjin ataupun pembiayaan lainnya) kepada nasabah brokerage sesuai dengan latar belakang, profil keuangan nasabah dan riwayat transaksi. Persetujuan pemberian limit ini berdasarkan matriks kewenangan pemberian persetujuan sesuai dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah ditentukan.
  - c. Pembatasan saham-saham yang dapat dijamin dan ditransaksikan oleh nasabah brokerage. Pembatasan ini meliputi:
    - 1) Nilai saham yang diakui sebagai nilai portofolio nasabah dengan penentuan haircut saham berdasarkan aturan regulator dan penilaian ulang oleh Risk Management.
    - 2) Jenis-jenis saham marjin yang boleh ditransaksikan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bursa Indonesia setiap bulannya dan valuasi ulang oleh Risk Management sesuai Risk Appetite Perusahaan.
    - 3) Investment Universe (Bond Universe dan Equity Universe) ialah daftar efek yang telah memperoleh persetujuan Komite Pengelolaan Risiko (KPR) yang dapat menjadi underlying asset oleh Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio. Bank Universe ialah daftar Bank Counterparty yang telah memperoleh persetujuan Komite Pengelolaan Risiko (KPR) yang dapat digunakan untuk penempatan time deposit. Limit penempatan time deposit pada Bank Counterparty ditetapkan oleh Komite Pengelolaan Risiko (KPR) dan direview setiap 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Kriteria dan Pendekatan yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi untuk menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan menetapkan limit Risiko Kredit. Kebijakan Manajemen Risiko mengatur prinsip-prinsip manajemen risiko, antara lain berisi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, kepatuhan terhadap hierarki dan kewenangan, lingkup pengaturan yang jelas, direktif serta berorientasi pada efektifitas dan bisnis yang berkelanjutan. Penetapan limit risiko kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Limit risiko kredit ditetapkan untuk risiko yang berkaitan dengan reasuransi dan investasi.
  - b. Limit risiko kredit ditetapkan setiap tahun sesuai *Risk Appetite* dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Penetapan limit risiko menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode *regulatory, historical, expert judgment* dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dll.

### **C. Struktur dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta Fungsi Kontrol**

Untuk mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat bank dalam perkreditan seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Perkreditan lainnya dan/atau

satuan-satuan kerja, BRI serta Perusahaan Anak Bank dan Pegadaian juga memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK) yang merupakan perangkat perkreditan BRI.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat perkreditan secara umum adalah sebagai berikut:

### **1. Dewan Komisaris**

Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui RBB yang mencakup : rencana kredit tahunan, rencana pemberian kredit kepada pihak terkait, dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang disampaikan kepada OJK.
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian kredit
- c. Menyetujui Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
- d. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi atas:
  - 1) Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan
  - 2) Langkah-langkah perbaikan atas apabila pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana perkreditan yang ditetapkan.
  - 3) Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB

### **2. Direksi**

Tugas dan tanggungjawab Direksi sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan bertanggungjawab atas:
  - 1) Penyusunan KPB
  - 2) Penyusunan rancangan perkreditan yang tertuan di dalam RBB
  - 3) Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan oleh Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
  - 4) Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan audit intern
- b. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan sesuai konsekuen dan konsisten.
- c. Menetapkan anggota KKP dan Komite Kredit (KK)
- d. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris perihal perkembangan kualitas portolio secara keseluruhan dan Penyimpangan dalam pelaksanaan KPB.

### **3. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)**

Tugas dan tanggungjawab KKP sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan KPB khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur dalam PPKPB OJK.
- b. Mengawasi penerapan KPB dilaksanakan secara bertanggungjawab dan penuh kesinambungan.
- c. Melakukan review KPB secara berkala
- d. Melakukan evaluasi kebenaran atas pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana, proses pemberian kredit atau penyediaan dana, pelaksanaan ketentuan BMPK, penyisihan pencadangan, penyelesaian kredit bermasalah dan ketaatan perundang-undangan lainnya.
- e. Melakukan kajian efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
- f. Melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perihal Hasil pengawasan atas penerapan KPB dan Laporan hasil evaluasi.
- g. Memantau perkembangan kualitas portfolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

#### **4. Komite Kredit (KK)**

Tugas dan tanggungjawab KK sebagai perangkat perkreditan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat serta seksama.
- b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dalam permohonan kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
- c. Melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan kredit

#### **5. Satuan Kerja Perkreditan dan Pejabat kredit**

Satuan Kerja Perkreditan (SKP) adalah jajaran *Relationship Management* (RM) dan jajaran *Credit Risk Management* (CRM) yang berada di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit serta Unit Kerja BRI di luar negeri. Pejabat kredit terdiri dari pekerja kredit lini dan pekerja kredit support.

Untuk Perusahaan Pembiayaan, berdasarkan akuntabilitas perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari Bagian Enterprise Risk Management, Bagian Manajemen Risiko Operasional, *Modelling* dan Manajemen Portfolio serta Bagian Kebijakan dan Prosedur. SKMR bertanggung jawab atas tercapainya portfolio pembiayaan yang sehat, melakukan *review* kebijakan dan pedoman pembiayaan secara periodik, mendelegasikan wewenang memutus pembiayaan kepada pejabat jajaran *Credit Risk Management* sesuai dengan batas, mengesahkan *Financing Portfolio Guidelines* dan anggota Komite Pembiayaan.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan pembiayaan, struktur organisasi dan manajemen pembiayaan diatur untuk mendukung pemberian pembiayaan yang sehat dan penerapan manajemen risiko didalam proses bisnis pembiayaan melalui:

- a. Unit kerja yang terkait pembiayaan yang terdiri atas *Relationship Management* dan *Credit Risk Management*.

- b. Satuan Kerja Pembiayaan dan Pejabat Pembiayaan
- c. Komite Pembiayaan sebagai perangkat operasional yang bersifat kolegial dalam melakukan evaluasi dan putusan pembiayaan.
- d. Pejabat yang terkait dalam proses prakarsa dan putusan pembiayaan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan risiko kredit dan kompleksitas bisnis pada Perusahaan Pembiayaan dengan fokus pada pengelolaan risiko kredit, maka dilaksanakan dengan kelayakan calon nasabah ditentukan melalui *credit scoring*, menetapkan tingkat persetujuan dan batas wewenang memutus pembiayaan oleh Komite Pembiayaan yang tertuang pada Kebijakan Pembiayaan dan Operasional ULaMM/ULaMM Syariah dan Mekaar/Mekaar Syariah serta penetapan skema tingkat persetujuan dan batas wewenang memutus pembiayaan yang berjenjang.

Untuk Perusahaan Ventura, pembentukan Struktur Organisasi dengan mempertimbangkan kompleksitas proses bisnis dan operasional sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Ventura membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada dibawah supervisi Direktur Portofolio & Keuangan. Unit Kerja yang bersentuhan dengan risiko investasi adalah seluruh divisi yang berada di bawah Direktorat Investasi dan Kantor Cabang Pembiayaan Kupang yang berada di bawah supervise Direktorat Portofolio & Keuangan. Untuk mewujudkan kegiatan usaha yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern, maka Perusahaan membentuk komite untuk kegiatan investasi (baik deploy/divestasi).

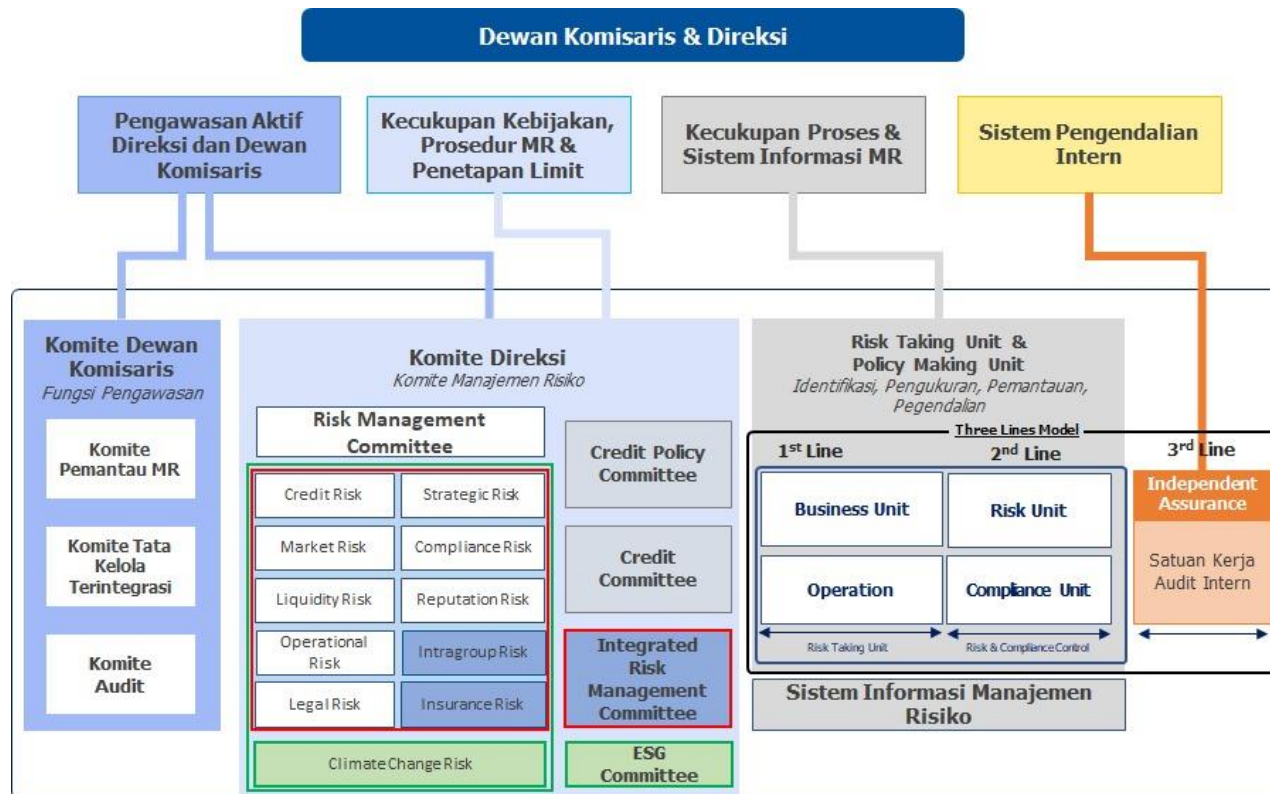
Untuk Perusahaan Efek, Divisi Manajemen Risiko merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko. Dalam pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan risiko, maka dibentuk Komite-Komite Eksekutif terkait, yang antara lain mencakup:

- a. Komite Pengelolaan Risiko yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan penyusunan/penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko, penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), penetapan kebijakan dan prosedur, penetapan/persetujuan Investment Universe, dan persetujuan atas limit-limit transaksi.
- b. Komite Investasi yang bertugas untuk membahas, mengevaluasi, merekomendasi, dan menetapkan jangkauan investasi, batasan investasi, jenis investasi, dan strategi investasi yang harus dilaksanakan oleh Tim Pengelola Investasi.

c. Komite Produk yang bertugas untuk melakukan persetujuan pembentukan produk, evaluasi produk yang sudah berjalan, mengusulkan pengembangan/penggabungan produk, dan mengajukan konsep pemasaran produk kepada Direksi.

Untuk Perusahaan Asuransi, untuk mengontrol pertumbuhan risiko kredit dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat dalam risiko kredit seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat-pejabat lainnya dan/atau satuan-satuan kerja, maka Perusahaan Asuransi memiliki Komite Investasi.

**D. Hubungan antara fungsi Manajemen Risiko Kredit, Pengendalian Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal**



Dalam implementasi Manajemen Risiko Kredit di BRI, Direktur Manajemen Risiko membawahi fungsi Manajemen Risiko Kredit sekaligus Unit Pengendali Risiko Kredit. Fungsi Manajemen Risiko Kredit merupakan bagian dari Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari:

1. Credit & Product Risk Policy Division berperan dalam penyusunan kebijakan perkreditan dan penyusunan model *Internal Risk Rating*.
2. Market, Portfolio & Enterprise Risk Division berperan dalam penyusunan kebijakan portfolio kredit, penyusunan limit risiko kredit, penyusunan kebijakan & perhitungan CKPN dan ATMR untuk risiko kredit serta monitoring portofolio, maupun Stress Test risiko kredit.

Unit Pengendali Risiko Kredit terbagi berdasarkan segmen bisnisnya yaitu:

1. Wholesale Credit Risk Analysis Division berperan mengendalikan risiko kredit pada segmen korporasi secara *transactional* basis.
2. Executive Risk Officer Team berperan dalam mengendalikan risiko kredit pada segmen Menengah secara *transactional* basis.
3. Credit Risk Analysis Regional Office berperan dalam mengendalikan risiko kredit pada segmen Menengah secara *transactional* basis.

Fungsi Kepatuhan dilaksanakan oleh Compliance Division dan Policy & Procedure Division memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, penyusunan Standard Operating Procedure, serta melaksanakan Uji Kepatuhan untuk memastikan BRI telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari peraturan perundangan.

Satuan Kerja Audit Intern sebagai *Independent Assurance* memiliki peran penting dalam menilai efektivitas implementasi manajemen risiko kredit, baik pada *transactional* basis maupun secara *portfolio* basis. Selain itu, SKAI juga masuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan sehingga rekomendasi hasil audit merupakan menjadi bagian dari perbaikan kebijakan kredit.

Pada Perusahaan Anak, implementasi *second line* dan *third line of defence* disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kompleksitas operasional yang terlihat dari struktur organisasi masing-masing Perusahaan Anak. Untuk Perusahaan Anak Bank, Pegadaian dan Perusahaan Pembiayaan, fungsi manajemen risiko berperan dalam memantau dan mengendalikan risiko secara agregat serta menyusun kebijakan & metodologi risiko kredit. Pengendalian terhadap kredit bermasalah (Kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet) dilakukan oleh jajaran Credit Risk Management (CRM) atau petugas jajaran RM (*Relationship Management*) yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah. Selain itu, fungsi kepatuhan memastikan *due diligence* atas pemberian kredit dengan putusan komite kredit dan Satuan Kerja Audit Intern berperan memastikan bahwa pemberian kredit telah memenuhi prinsip pemberian kredit yang sehat dan sesuai dengan Kebijakan perkreditan maupun Pedoman Pemberian Kredit.

Untuk Perusahaan Asuransi, fungsi *Risk Management* memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola penyusunan/evaluasi/penyempurnaan perencanaan dan strategi manajemen risiko serta kebijakan, metodologi, pedoman perangkat dan pengukuran manajemen risiko. Fungsi Kepatuhan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengelola dan evaluasi kegiatan, aktivitas operasional, kebijakan dan pedoman Perusahaan yang memadai sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi, serta mengelola seluruh kebijakan Regulator terimplementasi pada setiap Unit Kerja. Fungsi Audit Internal memiliki tanggung jawab dan kewenangan

untuk melakukan kegiatan audit intern berupa jasa Assurance dan jasa konsultasi sebagai *Strategic Business Partner* terhadap proses bisnis perusahaan. Dalam melakukan kontrol pertumbuhan risiko kredit dan penerapan unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan, maka disamping keterkaitan pejabat-pejabat dalam risiko kredit seperti Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat-pejabat lainnya dan/atau divisi-divisi, juga dibentuk suatu Komite Investasi untuk menentukan *investment policy* maupun putusan investasi kepada pihak terkait dan pihak ketiga dengan nominal dan jangka waktu tertentu.

Untuk Perusahaan Ventura, fungsi manajemen risiko investasi dibagi dalam dua bagian yaitu sebelum investasi dilakukan (*investment risk management*) dan setelah investasi dilakukan (*portfolio risk management*). Pada tahap *pre-investment*, tim investasi berkoordinasi dengan bagian manajemen risiko, kepatuhan, dan legal untuk memastikan seluruh tahapan investasi sudah *comply*. Selain SKMR BRI Ventures, terdapat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BRI Ventures yang berfungsi sebagai kontrol internal dan *third line defense* dalam penerapan manajemen risiko perusahaan. SKAI BRI Ventures berkontribusi dalam memberikan support pengendalian internal dan indikasi *fraud*. SKAI BRI Ventures juga secara berkala melakukan *risk based audit*. Dalam pelaksanaannya, proses audit juga dimonitor oleh tim SKAI BRI secara *offsite*. Apabila diperlukan, tim SKAI BRI dapat melakukan *joint-audit* secara *ad-hoc*. Hal ini ditujukan untuk menjaga efisiensi operasional di BRI Ventura tanpa menurunkan kualitas hasil audit.

**E. Cakupan dan Informasi utama dari pelaporan tentang eksposur Risiko Kredit dan fungsi Manajemen Risiko Kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris**

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BRI dan seluruh Perusahaan Anak yang membidangi risiko kredit menyusun laporan manajemen risiko dalam format yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara konsolidasian maupun secara terintegrasi. Pelaporan manajemen risiko kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pihak-pihak tertentu antara lain:

1. Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu maupun Konsolidasi
2. Laporan CKPN dan ATMR untuk Risiko Kredit
3. Laporan perkembangan pertumbuhan pinjaman
4. Laporan perkembangan kualitas kredit
5. Laporan perkembangan kredit yang direstrukturisasi
6. Laporan penggunaan anggaran penghapusbukuan (PH) dan realisasi pendapatan *recovery*
7. Laporan monitoring biaya CKPN maupun rasio pencadangan, misalnya *NPL Coverage* dan *LAR Coverage*

8. Hasil Stress Test Risiko Kredit baik secara portfolio maupun bagi nasabah besar

## II. PENGUNGKAPAN KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CR1)

(terlampir)

## III. PENGUNGKAPAN MUTASI KREDIT DAN SURAT BERHARGA YANG TELAH JATUH TEMPO (CR2)

(terlampir)

## IV. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT KUALITAS KREDIT ATAS ASET (CRB)

### a. Kualitatif

Cakupan dan definisi Tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai

Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi. Tagihan yang mengalami penurunan nilai merupakan tagihan yang mengalami suatu kondisi dimana terjadi peristiwa yang merugikan (bukti objektif) sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah kredit diberikan yang berdampak pada kesanggupan bayar debitur dimasa datang. Seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari masuk dalam tagihan yang mengalami penurunan nilai.

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

#### a. Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analisis sektor swasta dan akademisi terpilih. Pandangan dasar (*base case*) digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD)
- *Loss of Given Default* (LGD)
- *Exposure at Default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan *rating* yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif, kualitatif, dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. LGD juga diamati dengan mempertimbangkan jaminan tunai yang merupakan bagian integral dari aset keuangan terhutang serta biaya yang dikeluarkan dalam proses pemulihan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis.

**b. Kuantitatif**

(*terlampir*)

**V. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN TERKAIT PERLAKUAN TERHADAP ASET BERMASALAH (CRB-A)**

**a. Kualitatif**

1) Kualitas Aset:

- a) Aset bermasalah atau *non-performing* adalah aset yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Untuk kredit dengan eksposur diatas nilai tertentu, penilaian kolektibilitas dilakukan secara individu berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu ketepatan dalam membayar, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur.

- b) Kredit dan Surat Berharga yang telah jatuh tempo merupakan tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga atau debitur yang wanprestasi. Tagihan tersebut termasuk aset yang mengalami penurunan nilai dan telah dibentuk cadangan penurunan nilai (CKPN).
  - c) Aset *Performing* merupakan aset yang memiliki kualitas lancar dan dalam perhatian khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
  - d) Aset Restrukturisasi adalah aset dalam upaya perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Aset dapat direstrukturisasi apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Suatu aset restrukturisasi dapat keluar dari kategori tersebut, apabila dalam jangka waktu restrukturisasi, kondisi usaha debitur telah kembali normal sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai kondisi normal.
- 2) Segmentasi kredit:  
Pengkategorian segmen kredit berdasarkan jenis kredit dan besaran fasilitas kreditnya.

## **b. Kuantitatif**

(terlampir)

## **VI. PENGUNGKAPAN KUALITATIF TERKAIT TEKNIK MRK (CRC)**

Dalam menghitung ATMR risiko kredit dengan pendekatan standar, Bank mempertimbangan penggunaan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) sesuai dengan ketentuan OJK. Teknik MRK yang digunakan Bank adalah teknik MRK-Agunan dan teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit. Teknik MRK-Agunan yang digunakan adalah agunan berupa uang tunai (*cash collateral*) yang disimpan pada Bank dan emas yang disimpan pada Entitas Anak. Sedangkan teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit digunakan untuk kredit yang dijamin oleh asuransi kredit dari Perusahaan Asuransi berstatus BUMN. Kredit yang dijamin oleh perusahaan asuransi yang merupakan Anak Perusahaan Bank tidak diperhitungkan sebagai penjamin dalam teknik MRK karena merupakan pihak yang terafiliasi dengan Bank.

Kriteria agunan yang dapat diterima antara lain:

1. Agunan diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan serta barang jaminan berupa emas (entitas anak).
2. Penetapan nilai agunan harus didasarkan pada pertimbangan atas penilaian, pengikatan, penguasaan, pengamanan dan pemanfaatan.

3. Penilaian agunan harus dilakukan secara objektif, jujur, bertanggung jawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar.
4. *Review* agunan dilakukan untuk melihat kecukupan agunan dibandingkan dengan total kewajiban debitur, antara lain meliputi:
  - a. Kondisi agunan pada saat *review*
  - b. Nilai agunan
  - c. Pengamanan agunan (penyimpanan, pengikatan dan berlakunya agunan)
  - d. Informasi lain yang relevan dengan penilaian kecukupan agunan
5. Periode *review* agunan dilakukan sebagaimana dicantumkan dalam syarat dan ketentuan kredit, namun wajib dilakukan minimal sekali setahun bersamaan dengan *review* kredit sebagaimana diatur dalam masing-masing bidang bisnis. Periode *review* agunan dapat ditetapkan berbeda apabila diatur secara khusus oleh regulator (BI, OJK atau instansi terkait lainnya). Untuk kepentingan perhitungan ATMR, khusus kredit konsumtif beragun rumah tinggal maka wajib dilakukan valuasi agunan secara berkala minimal 30 (tiga puluh) bulan.

## VII. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF TERKAIT TEKNIK MRK (CR3)

(terlampir)

## VIII. PENGUNGKAPAN PENGGUNAAN PERINGKAT KREDIT EKSTERNAL (CRD)

Lembaga pemeringkat yang digunakan adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Moody's Investor Service, Standard and Poor's, Fitch Ratings dan PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Apabila terdapat Surat Berharga yang memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat, maka yang digunakan adalah peringkat yang paling buruk. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah Tagihan kepada Pemerintah, Tagihan kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan kepada Bank, Tagihan kepada Perusahaan Efek & Jasa Keuangan, dan Tagihan kepada Korporasi. Sedangkan tagihan yang lain menggunakan *unrated* (tanpa peringkat) karena tidak tersedianya data peringkat.

## IX. PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO KREDIT DAN DAMPAK TEKNIK MRK (CR4)

(terlampir)

## X. PENGUNGKAPAN EKSPOSUR BERDASARKAN KELAS ASET DAN BOBOT RISIKO (CR5)

(terlampir)

Tabel X. *Risiko Kredit* - Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1).

	Indonesia	a	b	c	d	e	f
		<i>Replacement cost (RC)</i>	<i>Potential future exposure (PFE)</i>	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih (1,4 x [RC + PFE])	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	519,035	1,327,579		1,4	2,585,260	1,528,042
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)						
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
5	VaR untuk SFT						
6	<b>Total</b>						<b>1,528,042</b>

Tabel Z. *Risiko Kredit* - Eksposur CCR berdasarkan portofolio dan bobot risiko berdasarkan pendekatan standar

Kategori Portofolio	Bobot Risiko										
	a	b	c			d	e	f	g	h	i
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	75%	100%	150%	Others	Total Tagihan Bersih
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral											-
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik						370,273					370,273
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional											-
Tagihan kepada Bank Lain			863,628	206,511		1,491	3,734	643			1,076,006
Tagihan kepada perusahaan sekuritas											-
Tagihan kepada Korporasi							139,766	999,214			1,138,980
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel											-
Tagihan aset lainnya											-
Total	-	-	863,628	206,511		371,764	143,500	999,856	-	-	2,585,260

Tabel AA. *Risiko Kredit* - Tagihan Bersih Derivatif Kredit

	a	b
	Proteksi yang dibeli	Proteksi yang dijual
<b>Notional</b>	0	0
<i>Single-name credit default swaps</i>	0	0
<i>Index credit default swaps</i>	0	0
<i>Total return swaps</i>	0	0
<i>Credit options</i>	0	0
Derivatif kredit lainnya	0	0
<b>Total notional</b>	0	0
<b>Nilai wajar</b>	0	0
Nilai wajar positif (aset)	0	0
Nilai wajar negatif (kewajiban)	0	0

**Tabel CC. Risiko Kredit** - Securitisation exposures in the banking book

**Analisa Kuantitatif:** Bank diharapkan menambahkan dengan penjelasan mengenai perubahan signifikan dan penyebab utama perubahannya.

		a	b	c	e	f	g	i	j	k
		Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) –antara lain	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
2	Kredit perumahan	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	10,839,223,926		
3	kartu kredit	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
4	eksposur ritel lainnya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
5	resekritisasi	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
6	Wholesale (total) – of which	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
7	kredit korporasi	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
8	kredit komersil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
9	sewa dan piutang	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
10	other wholesale	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			
11	resekritisasi	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil			



Tabel HH. Risiko Pasar - Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023				31 Desember 2022				
		Individual		Konsolidasian		Individual		Konsolidasian		
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Risiko Suku Bunga									
	a. Risiko Spesifik	4,142	51,773	10,667	133,342	3,696	46,204	9,774	122,180	
	b. Risiko Umum	108,043	1,350,542	112,655	1,408,185	78,487	981,082	83,582	1,044,769	
2	Risiko Nilai Tukar	156,540	1,956,750	249,105	3,113,812	167,272	2,090,904	284,579	3,557,241	
3	Risiko Ekuitas *)			24,074	300,921			35,329	441,608	
4	Risiko Komoditas *)									
5	Risiko Option	227	2,837	227	2,837	-	-	-	-	
	<b>Total</b>	268,952	3,361,902	396,728	4,959,097	249,455	3,118,190	413,264	5,165,798	

\*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

**Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar**

Perhitungan Risiko Pasar mengacu pada ketentuan mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK  
(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)**

**Nama Bank** : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Individu)  
**Bulan Laporan** : Desember 2023

<b>Analisa Kualitatif</b>	
1	<i>Interest Rate Risk in The Banking Book</i> (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi <i>Banking Book</i> yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI terjadi karena penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas. Risiko ini disebabkan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga <i>fixed</i> dan mempunyai <i>repricing maturities</i> lebih panjang.
2	Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite <i>Asset &amp; Liability Management</i> (ALCO) dan <i>Risk Management Committee</i> (RMC). ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah <i>balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management dan capital management</i> . RMC dilakukan secara regular setiap bulan dengan pembahasan update kondisi pasar, profil risiko pasar dan <i>risk issue</i> terkini.
3	BRI melakukan perhitungan IRRBB secara triwulanan dengan menggunakan metode <i>Economic Value of Equity</i> (EVE) dan <i>Net Interest Income</i> (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal Tier 1 BRI. Metode EVE ini sesuai dengan <i>guideline</i> dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun ke depan.
4	Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Parallel Up</i> (400 bps)</li> <li>b) <i>Parallel Down</i> (400 bps)</li> <li>c) <i>Steeper</i> (350 bps)</li> <li>d) <i>Flattener</i> (350 bps)</li> <li>e) <i>Short Rate Up</i> (500 bps)</li> <li>f) <i>Short Rate Down</i> (500 bps)</li> </ul>
5	Dalam perhitungan IRRBB, BRI menggunakan asumsi-asumsi utama permodelan dan parametrik sebagai berikut:

- a) Perhitungan arus kas, *instrument* dengan suku bunga *float* menggunakan *risk free* yang bersumber dari *Government Bonds IDR & Government Bonds USD*. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap *instrument*. Sedangkan *Instrument* dengan suku bunga *fix* menggunakan acuan *effective interest rate* sebagai dasar penentuan *cashflow*.
- b) *Account Non Maturity Deposit* (NMD) yang terdiri dari giro dan tabungan ditempatkan pada *time bucket overnight*, *time bucket 3 s.d 4 tahun* & *time bucket 4 s.d 5 tahun* sesuai dengan *caps* maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada *time bucket* terpanjang merupakan *core fund* BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada *non core fund* yang ditempatkan pada *time bucket overnight*.
- c) Penentuan *prepayment risk* berdasarkan data historis sesuai dengan segmen & produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan *baseline* persentase *prepayment* merupakan rasio total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut pada setiap segmen. Sedangkan dalam menentukan *early redemption*, metode yang dipakai menggunakan pendekatan historis s.d posisi laporan untuk menetapkan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan.
- d) Selain permodelan *prepayment risk* dan *early redemption*, BRI juga menetapkan permodelan internal untuk *account-account NPL*. NPL Ritel Komersial dengan plafond maksimal 5 miliar rupiah ditempatkan pada *time bucket 3.5 tahun*. Sedangkan NPL Menengah Korporasi dengan plafond di atas 5 miliar rupiah ditempatkan pada *time bucket 3 tahun*. Account NPL termasuk *non rate* dimana estimasi *cashflow* nya tidak memperhitungkan *interest*.
- e) Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Mata uang asing selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.

#### Analisa Kuantitatif

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <p>Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai <i>maturity overnight</i>. Sedangkan secara behavioural, BRI menempatkan giro dan tabungan pada <i>time bucket overnight</i>, <i>time bucket 3 s.d 4 tahun</i> dan <i>time bucket 4 s.d 5 tahun</i>. Penyebaran <i>Non Maturity Deposit</i> BRI sesuai jangka waktu posisi 31 Desember 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Giro</b>; <i>time bucket Overnight</i> (61,51%), <i>time bucket 3 s.d 4 tahun</i> (29,15%) dan <i>time bucket 4 s.d 5 tahun</i> (9,33%).</li> <li>b. <b>Tabungan</b>; <i>time bucket Overnight</i> (18,66%) dan <i>time bucket 4 s.d 5 tahun</i> (81,34%).</li> </ul> |
|---|--|

## LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

**Nama Bank** : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Individu)

**Bulan Laporan** : Desember 2023

Dalam Juta Rupiah Periode	Δ EVE		Δ NII	
	T	T - 1	T	T - 1
<i>Parallel Up</i>	(15.434.868)	(15.433.340)	(14.675.909)	(15.822.557)
<i>Parallel Down</i>	15.984.479	15.978.908	13.586.504	14.762.171
<i>Steeper</i>	(7.978.955)	(7.836.979)		
<i>Flattener</i>	4.246.597	4.110.512		
<i>Short Rate Up</i>	(3.317.921)	(3.427.258)		
<i>Short Rate Down</i>	3.330.907	3.440.991		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	15.434.868	15.433.340	14.675.909	15.822.557
Modal Tier 1( untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	240.117.433	235.188.160	102.831.737	101.016.362
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	<b>6,43%</b>	<b>6,56%</b>	<b>14,27%</b>	<b>15,66%</b>

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
UNTUK RISIKO SUKU BUNGA DALAM BANKING BOOK  
(INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK)**

**Nama Bank** : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)  
**Bulan Laporan** : Desember 2023

<b>Analisa Kualitatif</b>	
1	<i>Interest Rate Risk in The Banking Book</i> (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi Banking Book yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI terjadi karena penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas yang disebabkan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga <i>fixed</i> dan mempunyai <i>repricing maturities</i> lebih panjang.
2	Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite <i>Assets &amp; Liability Management</i> (ALCO) dan <i>Risk Management Committee</i> (RMC) Terintegrasi. ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah <i>balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management, dan capital management</i> . Sedangkan RMC Terintegrasi dilaksanakan secara <i>bank wide</i> dengan perusahaan anak untuk membahas <i>assessment</i> profil risiko pasar dan <i>risk issue</i> terkini.
3	BRI melakukan perhitungan IRRBB Konsolidasi secara semesteran dengan menggunakan <i>metode Economic Value of Equity</i> (EVE) dan <i>Net Interest Income</i> (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal Tier 1 BRI dan telah disesuaikan dengan <i>guideline</i> dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun.
4	Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB BRI adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Parallel Up (400 bps)</li> <li>b) Parallel Down (400 bps)</li> <li>c) Steepener (350 bps)</li> <li>d) Flattener (350 bps)</li> <li>e) Short Rate Up (500 bps)</li> <li>f) Short Rate Down (500 bps)</li> </ul>
5	a) Dalam perhitungan arus kas, <i>instrument</i> dari aset dan liabilitas dengan suku bunga float menggunakan <i>risk free</i> yang bersumber dari <i>Government Bonds</i> IDR dan <i>Government</i>

*Bonds* USD. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap segmen instrument. Instrument aset dan liabilitas dengan suku bunga fix menggunakan acuan *yield* yang dibebankan pada instrument sebagai dasar penentuan *cashflow*.

- b) *Account Non Maturity Deposit* (NMD) yaitu giro dan tabungan ditempatkan pada jangka waktu *overnight*, skala waktu 3 s.d 4 tahun & 4 s.d 5 tahun sesuai dengan *caps* maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada skala waktu terpanjang merupakan *core fund* BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada *non core fund* yang ditempatkan pada skala waktu *overnight*.
- c) Penentuan *prepayment risk* berdasarkan data historis sesuai dengan segmen & produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan *baseline* persentase *prepayment* merupakan rasio total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut per masing-masing segmen. Sedangkan dalam menentukan *early redemption*, menggunakan pendekatan historis dengan sumber data yang memadai dan pendekatan lainnya yang relevan. Persentase *baseline* yang digunakan dalam *early redemption* merupakan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan.
- d) Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Semua mata uang selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.

### Analisa Kuantitatif

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <p>Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai <i>maturity overnight</i>. Secara behavioural, BRI secara konsolidasi menempatkan giro dan tabungan posisi 31 Desember 2023 pada 3 <i>time bucket</i> terpisah yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Overnight (non corefund)</i>, Giro (61,53%) dan Tabungan (18,77%)</li> <li>b. 3 s.d 4 tahun (<i>corefund</i>), Giro (29,16%) dan Tabungan (0,03%)</li> <li>c. 4 s.d 5 tahun (<i>corefund</i>), Giro (9,31%) dan Tabungan (81,20%)</li> </ul> |
|---|---|

## LAPORAN PERHITUNGAN IRRBB

**Nama Bank** : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Konsolidasi)

**Bulan Laporan** : Desember 2023

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
	T	T – 1 (Jun)	T	T – 1 (Jun)
Parallel Up	-15,704,299	-14,649,811	-15,111,678	-13,396,951
Parallel Down	16,262,347	15,169,505	14,037,969	12,326,214
Steeper	-8,115,636	-7,433,348		
Flattener	4,317,594	3,897,117		
Short Rate Up	-3,377,911	-3,257,837		
Short Rate Down	3,391,191	3,270,707		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	15,704,299	14,649,811	15,111,678	13,396,951
Modal Tier 1( untuk Δ EVE) atau	243,313,025	230,762,254	99,302,625	98,333,615
Projected Income (untuk Δ NII)				
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau Projected Income (untuk Δ NII)	<b>6.45%</b>	<b>6.35%</b>	<b>15.22%</b>	<b>13.62%</b>

**Tabel NN. Risiko Likuiditas : Asset encumbrance -> BS**

**Analisa kualitatif:** Bank diharapkan menambahkan informasi berupa (1) perubahan signifikan nilai *encumbered* dan *unencumbered asset* dibandingkan pengungkapan sebelumnya; (ii) jika ada, definisi dari nilai *encumbered* dan/atau *unencumbered asset* yang dibagi berdasarkan tipe transaksi/klasifikasi; dan (iii) informasi relevan lainnya yang dibutuhkan untuk memahami konteks pengungkapan.

	a	b	c	d
	Encumbered assets	Optional Central bank facilities	Unencumbered assets	Total
The assets on the balance sheet would be disaggregated; there can be as much disaggregation as desired	10,620,502,011,914	366,501,006,698,010	30,858,125,237,476	407,979,633,947,400

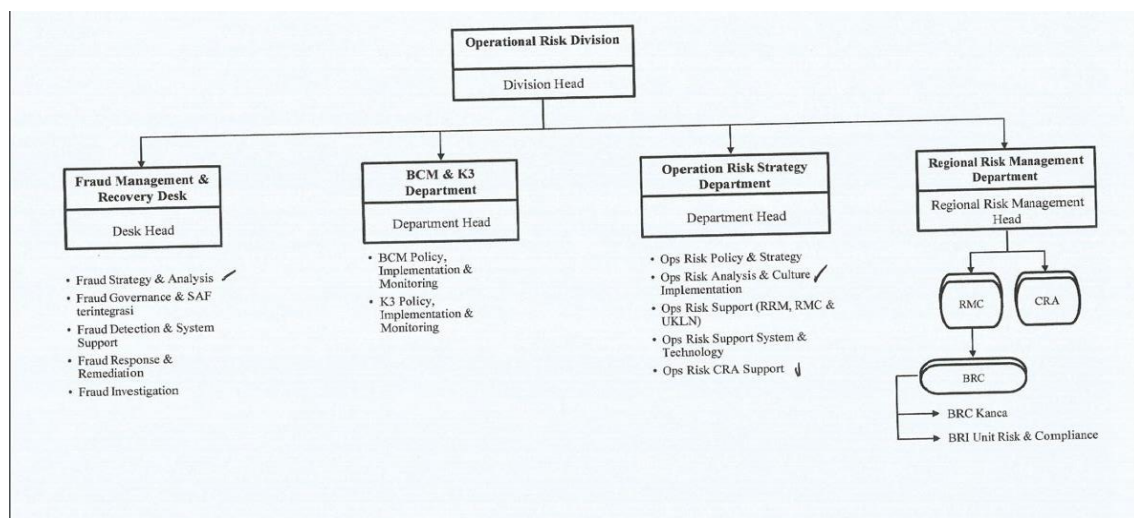
## ANALISIS KUALITATIF

1	<p>Penyusunan kerangka kerja manajemen risiko operasional BRI mengacu pada POJK Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum dan <i>best practices</i>. Dalam ketentuan internal BRI, kerangka kerja tersebut dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) yang diatur dalam SK Direksi No. KB.03-DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, mengatur prinsip-prinsip kebijakan manajemen risiko Bank. Khusus untuk manajemen risiko operasional, Bank menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional (P3MRO) dengan tetap mengacu pada KMR BRI yang diatur dalam Surat Edaran No. SE.58-DIR/ORD/11/2022 tanggal 22 November 2022 dengan cakupan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Framework</i> manajemen risiko operasional.</li> <li>- <i>Business continuity management</i>.</li> <li>- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</li> <li>- Strategi <i>anti fraud</i>.</li> <li>- Fungsi Manajemen Risiko (Fungsi MR) di Unit Kerja.</li> </ul> <p>Selain itu, penerapan manajemen risiko operasional juga diatur dalam bentuk Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK), dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) lainnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Edaran No. SE.17-DIR/MOP/03/2020 tentang Perangkat manajemen risiko operasional.</li> <li>b. Surat Edaran No. SE.04-DIR/CTR/01/2023 tentang Corporate Culture yang mencakup Budaya Risiko.</li> <li>c. Surat Edaran No. SE.40-DIR/PPM/11/2023 tentang Pengelolaan Produk yang mencakup Pengelolaan Risiko Produk.</li> <li>d. Surat Edaran No. SE.66-DIR/MPE/12/2022 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang mencakup Perhitungan ATMR Operasional</li> <li>e. Surat Edaran No. SE.50-DIR/MPE/12/2023 tentang Manajemen Kelangsungan Usaha yang mencakup Business Continuity Management (BCM).</li> <li>f. SOP No. SO.42-ORD/07/2022 tentang SOP Regional Risk Management.</li> </ol>
2	<p>Struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait risiko operasional di BRI dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan risiko operasional di perbankan dan lembaga jasa keuangan serta kompleksitas bisnis BRI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) yang fokus pada pengelolaan risiko operasional di BRI. SKMRO bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Manajemen Risiko dimana SKMRO terdiri dari <i>Digital Risk Division</i> dan <i>Operational Risk Division</i> yang merupakan pecahan dari Divisi DOR, dengan masing-masing pengesahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Digital Risk Division</i> dibentuk sesuai dengan SK Direksi No. 628-DIR/PPM/10/2021 tanggal 1 September 2021.</li> <li>2. <i>Operational Risk Division</i> dibentuk sesuai dengan SK Direksi No. 697-DIR/PPM/11/2021 tanggal 15 November 2021.</li> </ol> <p>Seiring dengan perkembangan transaksi dan layanan <i>digital</i> serta untuk mengantisipasi peningkatan ancaman <i>cyber</i>, maka Digital Risk Division memiliki tugas untuk mengelola risiko <i>digital</i>, meliputi penyusunan kebijakan, penerapan proses manajemen risiko, dan <i>monitoring</i> serta evaluasi risiko <i>digital</i> beserta pengendaliannya di seluruh aktivitas Bank.</p> <p><i>Operational Risk Division</i> fokus pengelolaan risiko bidang operasional yang mencakup pengembangan dan implementasi <i>framework</i> manajemen risiko operasional, penyusunan kebijakan dan implementasi <i>Business Continuity Management</i> (BCM) serta SMK3, dan pengendalian <i>fraud</i>.</p>

Implementasi manajemen risiko operasional diperkuat dengan pembentukan organisasi *Regional Risk Management (RRM) Department* sebagai bagian dari *Operational Risk Division*. *RRM Department* memiliki tugas utama untuk menjaga portofolio dan kualitas kredit serta memastikan pelaksanaan manajemen risiko operasional dan kepatuhan di tingkat *regional*. Memperhatikan hal tersebut, maka struktur organisasi *RRM Department* terdiri dari *RRM Head* yang mensupervisi *Risk Management and Compliance (RMC)* dan *Credit Risk Analyst (CRA)*. Sementara itu, *RMC* yang berkedudukan di *regional office* mensupervisi *Branch Risk and Compliance (BRC)* dan *BRI Unit Risk and Compliance (URC)* yang berkedudukan di Kantor Cabang dan *BRI Unit*.

Selain itu, untuk penguatan pelaksanaan GCG dan penerapan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud*, maka sesuai SK Direksi No. 697-DIR/PPM/11/2021 tanggal 15 November 2021, Bank membentuk *Fraud Risk Management and Recovery Desk* yang mempunyai tugas menyusun kebijakan strategi *anti fraud*, memastikan penerapan strategi *anti fraud* yang meliputi pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dengan tujuan untuk mencegah risiko kejadian *fraud* dan melakukan upaya *recovery* atas kerugian *fraud*.

Adapun struktur organisasi *Operational Risk Division* saat ini sebagai berikut :



Dalam rangka implementasi *Three Lines Model*, bentuk kolaborasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selaku *third line model* mempunyai arti penting dalam penerapan manajemen risiko operasional. SKAI berfungsi sebagai *enabler* yang bertugas melakukan *assurance* dalam penerapan manajemen risiko. Selain itu, SKAI juga berkontribusi dalam memberikan *support* berupa *tools* untuk mempermudah *RRM Team* dalam melakukan *testing control* dan *fraud detection*. Selanjutnya, *SKMRO* sebagai *second line* juga diminta untuk memberikan sumber data dan informasi berupa peta risiko untuk membantu SKAI dalam melaksanakan *risk based audit*.

3 Penjelasan sistem pengukuran untuk risiko operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung risiko operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk risiko operasional).

Sehubungan dengan kewajiban Bank memperkirakan beban modal untuk risiko operasional melalui perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan Pendekatan Standar sesuai dengan SEOJK No.6/SEOJK.03/2020, BRI melaksanakan pengukuran dan perhitungan risiko operasional yang menjadi bagian dari proses manajemen risiko operasional, yaitu identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan.

Proses manajemen risiko operasional dijalankan sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan dalam *framework* manajemen risiko operasional dan menggunakan perangkat sesuai dengan ketentuan regulator serta *best practices*. Proses pengukuran dan perhitungan risiko operasional dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut:

a. Penilaian *Risk and Control Self Assessment (RCSA)*

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/Desk Kantor Pusat BRI, *regional office*, kantor cabang khusus, UKLN, audit intern wilayah, *regional campus*, kantor cabang yang juga mewakili BRI Unit, kantor cabang pembantu dan sentra layanan BRI Prioritas.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* dan *control* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database (LED)*, Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator (KRI)* dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

b. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru (PBB)

Penerapan proses manajemen risiko atas setiap rencana penerbitan PBB di BRI dilakukan melalui pelaksanaan *Risk Self Assessment* PBB oleh *Product Owner* dan dimintakan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PBB kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk kemudian direkomendasikan kepada Direktur Manajemen Risiko BRI dalam rangka mendapatkan persetujuan.

c. Pencatatan Kerugian Risiko Operasional pada *Loss Event Database (LED)*

LED BRI mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss* termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada LED, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasis pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI telah menerapkan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III *Framework*. Ketentuan ATMR Risiko Operasional dengan pendekatan standar diatur melalui Surat Edaran Direksi No. SE.66-DIR/MPE/12/2022 Buku 2 tentang Perhitungan ATMR Operasional.

d. Pemantauan *Key Risk Indicator (KRI)*

KRI adalah perangkat Manajemen Risiko yang berupa indikator kuantitatif yang dapat memberikan informasi secara dini terhadap peningkatan atau penurunan risiko dan atau penurunan efektivitas kontrol terhadap *limit threshold* yang telah ditentukan. KRI dapat bersifat *leading* maupun *lagging*. Pemantauan risiko melalui KRI bertujuan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait pengendalian risiko sehingga dapat mencegah atau meminimalisir dampak kerugian.

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan audit internal, *risk owner* dan unit kerja terkait lainnya. KRI BRI antara lain tercermin dalam laporan profil risiko *bankwide* dan profil risiko *regional office* yang di-*monitor* secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

e. *Risk Assessment Plan (RAP)*

RAP merupakan bentuk aktivitas penyusunan *risk strategy* yang dilakukan oleh RRM dengan *output* berupa daftar risiko utama, prioritas Unit Kerja berdasarkan risiko dan rencana kegiatan pengawalan risiko.

f. Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB)

BRI melaksanakan PRAB sebagai implementasi dari *Business Continuity Management (BCM)* guna mengidentifikasi ancaman gangguan/bencana baik internal maupun eksternal berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut serta pengendalian / kontrol yang dilakukan untuk mengurangi dampak gangguan/bencana.

PRAB bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan (ER Plan)* dan kebijakan *Business Continuity Plan (BC Plan)* untuk Unit Kerja Kritis.

4	<p>Pengelolaan risiko operasional dilaporkan secara berkala kepada manajemen, pemimpin unit kerja, dan pihak lain yang berkepentingan sebagai alat monitoring. ORD Division menyampaikan laporan risiko operasional baik yang bersifat <i>mandatory</i> maupun kepentingan laporan internal. Adapun ruang lingkup dan bentuk laporan pengelolaan risiko operasional, antara lain:</p> <p>a. Profil Risiko Operasional Bank</p> <p>Profil risiko operasional Bank disampaikan kepada Regulator, Direksi, dan Komisaris secara triwulanan yang dikoordinasikan oleh MPE Division. Profil risiko operasional tersebut mencakup parameter-parameter risiko yang menjadi fokus pemantauan eksposur risiko operasional Bank. Laporan profil risiko operasional Bank juga disampaikan pada <i>Risk Management Committee (RMC)</i> dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).</p> <p>b. Profil Risiko Regional</p> <p>Profil risiko regional berisi parameter dari 7 (tujuh) jenis risiko, salah satunya adalah risiko operasional. Penyusunan profil risiko operasional tersebut dikoordinasikan oleh RRM dan disampaikan kepada <i>Regional Chief Executive Officer (RCEO)</i> melalui forum <i>Governance, Risk, and Compliance (GRC)</i> setiap bulan.</p> <p>c. <i>Operational Risk News (OPEN)</i></p> <p>OPEN disampaikan kepada Direksi dan Komisaris secara bulanan. Ruang lingkup OPEN yaitu laporan profil risiko operasional, pencapaian risk appetite statement (RAS), kejadian <i>human error</i> dan kejadian fraud, serta perbaikan kontrol yang dilaksanakan, kegiatan forum manajemen risiko, aktivitas BCM dan K3, aktivitas <i>regional risk management, risk assessment</i> atas Produk Bank Baru (PBB), RRM SMART, dan informasi kejadian eksternal.</p> <p>d. Laporan analisa risiko BRC/URC</p> <p>Laporan analisa risiko BRC/URC memuat daftar kelemahan kontrol yang masih terjadi di Unit Kerja sesuai hasil <i>verification</i> yang dilakukan oleh BRC/URC. Laporan ini disampaikan oleh BRC/URC kepada Pemimpin Unit Kerja yang diselenggarakan di Forum MR Unit Kerja setiap bulan. Selain itu, atas hasil <i>verification</i> BRC/URC dengan indikasi fraud, laporan disampaikan RCEO dan ORD Division untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.</p>
5	<p>Proses mitigasi risiko merupakan bagian dari proses manajemen risiko yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan dalam rangka mencegah kejadian risiko dan meminimalkan dampak risiko. Langkah-langkah mitigasi risiko disesuaikan dengan hasil analisa terhadap penyebab kejadian atau potensi risiko. Sesuai dengan hal tersebut, maka mitigasi risiko secara umum dikelompokkan dalam 3 (tiga) sub, yaitu:</p> <p>a. <i>People</i></p> <p>Mitigasi pada aspek <i>people</i> dilakukan dari sisi kuantitas maupun kualitas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan dan mereviu kebutuhan formasi pekerja untuk melaksanakan proses bisnis di Unit Kerja.</li> <li>• Menetapkan persyaratan, mekanisme, serta <i>background checking</i> dalam proses rekrutmen pekerja.</li> <li>• Melakukan pemenuhan formasi pekerja di Unit Kerja.</li> <li>• Meningkatkan kapabilitas pekerja antara lain dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan pelatihan pekerja sesuai dengan <i>level</i> jabatan.</li> <li>- Mereviu kurikulum dan metode pendidikan.</li> <li>- Memberikan sertifikasi untuk pekerja dengan spesialis tertentu.</li> </ul> </li> </ul>

- Mendorong implementasi budaya risiko melalui program-program internalisasi budaya risiko, antara lain:
  - *Culture Activation Program (CAP)*.  
Setiap unit kerja telah menetapkan CAP untuk membentuk perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai KPI secara *prudent* melalui aktivitas yang telah ditetapkan pada CAP.
  - Membangun *Risk Awareness* Pekerja di Unit Kerja.  
SKMR secara rutin menyampaikan media *risk awareness* baik dalam bentuk surat, media infografis, webinar, *podcast*, *e-learning*, akun media sosial resmi Bank dan email/WA/sms *blast*.
  - *Empowering Risk Officer*.  
Diperlukan keterlibatan *Risk Officer* sebagai Tim Penggerak Transformasi dalam menginternalisasi dan memastikan penerapan budaya risiko telah terlaksana. Sehingga dilakukan penguatan fungsi MR melalui penyesuaian operasional prosedur serta *upgrading* pengetahuan dan *technical skills* melalui pendidikan/sosialisasi.
  - *Early Detection*.  
Penerapan budaya risiko perlu didukung oleh *tools Early Warning System* yang dapat membantu memitigasi maupun mengoreksi kejadian risiko secara lebih dini.
  - *Business Process Review*.  
Aktivitas budaya risiko tercermin melalui pelaksanaan operasional prosedur perbankan secara harian. Sehingga diperlukan reviu kecukupan kontrol atas operasional prosedur tersebut.

b. *Process*

Mitigasi risiko pada aspek *process*, yaitu:

- Menyusun kebijakan dan standar prosedur operasional (SOP) untuk setiap produk dan aktivitas Bank yang didalamnya memuat *business process*, *internal control*, dan tugas dan tanggung jawab pekerja sebagai *maker*, *checker*, *signer*. Setiap *draft* kebijakan dan SOP sebelum dilakukan pengesahan wajib mendapatkan penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- Mitigasi risiko juga dilakukan dengan cara transfer risiko kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi yang menanggung kerugian Bank atau kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja yang tentunya telah mempertimbangkan azas bonafiditas dan integritas dari penyedia jasa tersebut yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) di setiap kerjasama dengan pihak ketiga.

c. *Technology*

Pada prinsipnya pengendalian risiko *digital* erat kaitannya dengan upaya Bank untuk mengamankan aset yang dimiliki, termasuk memberikan perlindungan terhadap data/informasi nasabah. Pengelolaan risiko *digital* pada aktivitas pengelolaan TI/layanan TI meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan layanan perbankan elektronik/digital.
- Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan infrastruktur (*computing*, *network*, *satellite*) dan sekuriti TI.
- Pengembangan, pembaharuan, dan penghapusan layanan internal Bank.
- Pengadaan penyedia jasa TI.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyedia jasa TI oleh Bank.</li><li>• Aktivitas operasional TI.</li><li>• Pengembangan dan/atau reuiu <i>rules Fraud Detection System (FDS)</i>.</li></ul> |
|--|

Selanjutnya untuk penguatan kontrol risiko digital, setiap pengembangan aplikasi didampingi oleh *Digital Risk Division*.

## PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) RISIKO OPERASIONAL

Sesuai dengan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020, Perhitungan ATMR Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Standar per Januari 2023 sudah diimplementasikan.. Berikut merupakan tabel perhitungan ATMR operasional dengan Pendekatan Standar sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual**

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2023					
		Indikator Bisnis (IB)	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO)	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	ATMR Risiko Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	74.092.568	10.663.885	3.219.807	0,74	7.921.723	99.021.545
Total		<b>74.092.568</b>	<b>10.663.885</b>	<b>3.219.807</b>	<b>0,74</b>	<b>7.921.723</b>	<b>99.021.545</b>

Ket:

(3), (4), (5), (7), (8) dalam satuan (Rp. Juta)

**Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Konsolidasi**

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2023					
		Indikator Bisnis (IB)	Komponen Indikator Bisnis (KIB)	Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO)	Faktor Pengali Kerugian Intern (FPKI)	Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO)	ATMR Risiko Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	81.866.229	11.829.934	5.433.202	0,81	9.618.943	120.236.798
Total		<b>81.866.229</b>	<b>11.829.934</b>	<b>5.433.202</b>	<b>0,81</b>	<b>9.618.943</b>	<b>120.236.798</b>

Ket:

(3), (4), (5), (7), (8) dalam satuan (Rp. Juta)

Memperhatikan ketentuan publikasi perhitungan ATMR pada SEOJK tersebut di atas, berikut pengungkapan data kuantitatif yang dipergunakan dalam perhitungan ATMR Risiko Operasional menggunakan Pendekatan Standar:

**Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Kerugian Risiko Operasional (KRO) Individual**

(Rp. Juta)

Tahun Pembukuan Kerugian	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Ratas 10 Tahun
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	345,901.08	1,245,247.09	353,001.55	88,936.24	29,799.73	48,278.16	20,331.16	2,272.00	5,761.52	7,009.59	214,653.8
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	26	15	15	13	3	7	11	1	2	2	10
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	345,901.08	1,245,247.09	353,001.55	88,936.24	29,799.73	48,278.16	20,331.16	2,272	5,761.52	7,009.59	214,653.80

**Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Kerugian Risiko Operasional (KRO) Konsolidasi**

(Rp. Juta)

Tahun Pembukuan Kerugian	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Ratas 10 Tahun
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan (tanpa pengecualian)	604,146.99	1,810,637.66	835,527.90	95,729.10	34,940.85	50,778.16	20,331.16	157,272	5,761.52	7,009.59	362,213.49
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional	36	19	26	16	4	8	11	2	2	2	13
Jumlah kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah terjadinya kerugian risiko operasional yang dikecualikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kerugian operasional bersih setelah memperhitungkan nilai pemulihan dan kerugian risiko operasional yang dikecualikan	604,146.99	1,810,637.66	835,527.90	95,729.10	34,940.85	50,778.16	20,331.16	157,272	5,761.52	7,009.59	362,213.49

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Indikator Bisnis (IB) Individu

(Rp. Juta)

No.	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	2022	2021	2020
<b>1</b>	<b>Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)</b>	<b>37,298,600.60</b>		
1.1	Pendapatan Bunga	124,066,051.00	120,166,772.00	110,319,213.00
1.2	Beban Bunga	27,358,663.00	27,783,201.00	38,467,571.00
1.3	Aset Produktif	1,809,218,606.00	1,629,187,461.00	1,463,203,257.00
1.4	Pendapatan Dividen	1,540,279.00	36,791.00	32,522.00
<b>2</b>	<b>Komponen Jasa (KJ)</b>	<b>28,481,221.00</b>		
2.1	Pendapatan Jasa dan Komisi	18,469,908.00	16,548,485.00	15,183,058.00
2.2	Beban Jasa dan Komisi	0.00	0.00	0.00
2.3	Pendapatan operasional lainnya	15,716,073.00	10,367,605.00	9,158,534.00
2.4	Beban operasional lainnya	4,712,281.00	5,354,902.00	3,410,208.00
<b>3</b>	<b>Komponen Keuangan (KK)</b>	<b>8,312,746.67</b>		
3.1	Laba Rugi Bersih Trading Book	4,297,084.00	1,268,299.00	2,717,830.00
3.1	Laba Rugi Bersih Banking Book	4,685,297.00	7,239,544.00	4,730,186.00
<b>4</b>	<b>IB</b>	<b>74,092,568.27</b>		

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Indikator Bisnis (IB) Konsolidasi

(Rp. Juta)

No.	Indikator Bisnis (IB) dan komponen IB	2022	2021	2020
<b>1</b>	<b>Komponen Bunga, Sewa, dan Dividen (KBSD)</b>	<b>38,185,439.37</b>		
1.1	Pendapatan Bunga	152,159,090.00	143,556,049.00	117,041,182.00
1.2	Beban Bunga	33,281,734.00	34,469,089.00	41,549,743.00
1.3	Aset Produktif	1,912,808,100.00	1,677,360,092.00	1,495,471,279.00
1.4	Pendapatan Dividen	90,630.00	37,761.00	1,039.00
<b>2</b>	<b>Komponen Jasa (KJ)</b>	<b>35,031,300.33</b>		
2.1	Pendapatan Jasa dan Komisi	19,635,398.00	17,659,598.00	15,095,127.00
2.2	Beban Jasa dan Komisi	4,108.00	431.00	492.00
2.3	Pendapatan operasional lainnya	25,468,282.00	17,751,339.00	9,484,157.00
2.4	Beban operasional lainnya	14,484,024.00	13,547,138.00	4,094,544.00
<b>3</b>	<b>Komponen Keuangan (KK)</b>	<b>8,649,489.33</b>		
3.1	Laba Rugi Bersih Trading Book	4,375,089.00	1,614,895.00	3,033,699.00
3.1	Laba Rugi Bersih Banking Book	4,736,406.00	7,318,726.00	4,869,653.00
<b>4</b>	<b>IB</b>	<b>81,866,229.03</b>		

Tabel 2.D. *Umum* - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (L1)

(dalam jutaan Rupiah)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko					
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal	
<b>ASET</b>								
1. Kas	31,603,784	938	32,169,703					
2. Penempatan pada Bank Indonesia	150,797,288	-	150,802,707					
3. Penempatan pada bank lain	38,637,594	1,888,898	39,512,149					
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	911,683	-	-	2,585,260				
5. Surat berharga yang dimiliki	364,682,750	20,269,851	296,328,506		2,177			
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	20,303,958	-	-	19,079,459				
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	33,595,231	-	-	33,350,175				
8. Tagihan akseptasi	10,217,408	-	10,217,408					
9. Kredit yang diberikan	1,197,752,706	-	1,274,510,285					
10. Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	13,668,220	-						
11. Piutang Sewa Pembiayaan	55,008,321	-						
12. Penyertaan modal	7,305,491	5,464	7,527,309					
13. Aset keuangan lainnya	21,900,160	2,634,101	17,409,327					
14. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		-	-	63,526,814				
a. Surat berharga yang dimiliki	- 2,405,426	- 14,857						
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	- 81,017,973	-	- 63,521,233					
c. Lainnya	- 4,959,749	- 900	- 5,581					
15. Aset tidak berwujud	806,416	-						
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-						
16. Aset tetap dan inventaris	81,463,777	1,280,544	58,457,583					
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	- 21,785,658	- 632,129						
17. Aset non produktif			59,347					
a. Properti terbengkalai	17,356	-						
b. Agunan yang diambil alih	59,347	-	59,347					
c. Rekening tunda	-	-						
d. Aset antarkantor	-	-						
18. Aset lainnya	46,444,346	4,711,745	37,121,266					
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1,965,007,030</b>	<b>30,143,655</b>	<b>1,860,588,776</b>	<b>55,014,894</b>	<b>2,177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Tabel 2.D. *Umum* - Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Kategori Risiko (L1)

(dalam jutaan Rupiah)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko					
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>								
1.	Giro	346,124,372	-					
2.	Tabungan	527,945,550	-					
3.	Deposito	484,258,839	-					
4.	Uang Elektronik	518,049	-					
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	69,254	-					
6.	Liabilitas kepada bank lain	11,958,319	-					
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	925,210	-					
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	19,079,458	-					
9.	Liabilitas akseptasi	10,217,408	-					
10.	Surat berharga yang diterbitkan	49,637,581	-					
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	99,331,907	-					
12.	Setoran jaminan	12,713	-					
13.	Liabilitas antarkantor	-	-					
14.	Liabilitas lainnya	98,456,228	18,931,267					
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1,648,534,888</b>	<b>18,931,267</b>	-	-	-	-	-
<b>EKUITAS</b>								
15.	Modal disetor							
a.	Modal dasar	15,000,000	677,059					
b.	Modal yang belum disetor -/-	- 7,422,050	-					
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	- 3,614,321	-					
16.	Tambahan modal disetor							
a.	Agio	75,853,127	5,244,441					
b.	Disagio -/-	-	-					
c.	Dana setoran modal	-	-					
d.	Lainnya	2,100,831	-					
17.	Penghasilan komprehensif lain							
a.	Keuntungan	20,344,735	262,574					
b.	Kerugian -/-	- 4,610,188	- 6,664					
18.	Cadangan							
a.	Cadangan umum	3,022,685	1,169,801					
b.	Cadangan tujuan	-	-					
19.	Laba/rugi							
a.	Tahun-tahun lalu	150,588,874	2,847,055					
b.	Tahun berjalan	60,099,863	1,018,119					
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-	-					
	<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>	<b>311,363,556</b>	<b>11,212,385</b>	-	-	-	-	-
20.	<b>Kepentingan minoritas (minority interest)</b>	<b>5,108,586</b>	<b>-</b>					
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>316,472,142</b>	<b>11,212,385</b>	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1,965,007,030</b>	<b>30,143,652</b>	-	-	-	-	-

Tabel 2.E. *Umum* - Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standar Akuntansi Keuangan dengan Nilai Eksposur sesuai dengan Ketentuan OJK (L12)

(dalam jutaan Rupiah)

		a	b	c	d	e
		Total	Item sesuai :			
			Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar
1	Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel L11)	1,915,605,847	1,860,588,776	2,177	55,014,894	-
2	Nilai tercatat liabilitas sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada tabel L11)	-	-	-	-	-
3	Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	1,915,605,847	1,860,588,776	2,177	55,014,894	-
4	Nilai rekening administratif	206,077,978	206,077,978			
5	Perbedaan valuasi	-				
6	Perbedaan karena netting rules, selain dari yang termasuk pada baris 2.	-				
7	Perbedaan provisi	-				
8	Perbedaan karena adanya prudential filters	-				
..	.....					
	Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-				

**Tabel I. Permodalan - Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)**

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			
No.	Pertanyaan	Informasi Kuantitatif/Kualitatif	Informasi Kuantitatif/Kualitatif
1	Penerbit	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2	Nomor identifikasi	ISIN Code: ID1000118201 Short Code: BBRI	ISIN Code: IDA000133300 Short Code: BBRI04SB
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A
5	setelah masa transisi	CET 1	Tier 2
6	Apakah instrumen eligible untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Konsolidasi dan Individu	Konsolidasi dan Individu
7	Jenis Instrumen	Saham Biasa	Obligasi Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	80,209,581	458,333
9	Nilai par dari instrumen	7,577,950	500,000
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Ekuitas	Liabilitas
11	Tanggal penerbitan	10/11/2003	06/07/2023
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Perpetual	Dengan jatuh tempo
13	Tanggal jatuh tempo	Tidak Ada Tanggal Jatuh Tempo	06/07/2028
14	Eksekusi call option atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak	Tidak
15	Tanggal call option, jumlah penarikan dan persyaratan call option lainnya (bila ada)	-	-
16	Subsequent call option	-	-
	Kupon / dividen	-	-
17	Dividen/ kupon dengan bunga tetap atau floating	-	Fixed
18	Tingkat dari coupon rate atau index lain yang menjadi acuan	-	6.45%
19	Ada atau tidaknya dividend stopper	Tidak	Tidak
20	Fully discretionary; partial atau mandatory	-	Mandatory call by OJK
21	Apakah terdapat fitur step up atau insentif lain	-	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	-	Kumulatif
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	-	Tidak dapat dikonversi
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger point-nya	-	-
25	Jika dapat dikonversi apakah seluruh atau sebagian	-	-
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya	-	-
27	Jika dapat dikonversi; apakah mandatory atau optional	-	-
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	-	-

**Tabel I. Permodalan - Fitur Utama Instrumen Permodalan dan Instrumen TLAC-Eligible (CCA)**

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			
No.	Pertanyaan	Informasi Kuantitatif/Kualitatif	Informasi Kuantitatif/Kualitatif
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan issuer of instrument it converts into	-	-
30	Fitur write-down	-	Ya
31	Jika terjadi write-down, sebutkan trigger-nya	-	1. Rasio modal inti utama (CET 1) Bank induk secara konsolidasi $\leq$ 5,125% 2. Terdapat rencana otoritas untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank induk yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan 3. Terdapat perintah dari OJK untuk melakukan <i>write down</i> .
32	Jika terjadi write-down, apakah penuh atau sebagian	-	Penuh
33	Jika terjadi write down; permanen atau temporer	-	Permanen
34	Jika terjadi write down temporer, jelaskan mekanisme write-up	-	Perintah OJK
34a	Tipe subordinasi	-	Surat Berharga Subordinasi
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	-	Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun
36	Apakah terdapat fitur yang non-compliant	-	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang non-compliant	-	Tidak

## Pengungkapan Kualitatif Mengenai Struktur Permodalan dan Kecukupan Permodalan

### a. Modal Disetor

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*) dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003. Selanjutnya BRI melakukan *stock split* dengan rasio 1:2 tanggal 11 Januari 2011 sehingga jumlah saham tercatat sebesar 24.669.162.000 lembar saham dengan porsi kepemilikan pemerintah sebesar 14.000.000.000 lembar saham dan publik sebesar 10.669.162.000 lembar saham. Pada tanggal 10 November 2017, BRI kembali melakukan *stock split* dengan rasio 1:5 sehingga jumlah saham diterbitkan tercatat sebesar 123.345.810.000 dengan porsi kepemilikan pemerintah sebesar 70.000.000.000 lembar saham dan publik sebesar 53.345.810.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- per lembar saham.

#### Penerbitan Saham Baru

Pada tanggal 27 September 2021, BRI melakukan *Rights Issue* atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I sebanyak 28.213.191.604 lembar saham. Setelah *Right Issue*, jumlah saham beredar BRI bertambah menjadi 151.559.001.604 lembar saham dengan porsi kepemilikan pemerintah sebesar 80.610.976.876 lembar saham dan publik sebesar 70.948.024.728 lembar saham dengan nilai nominal Rp50,- per lembar saham.

Saham biasa bersifat perpetual (tidak ada jatuh tempo), tidak memiliki fitur *call option* maupun *write down*. Pada laporan KPMM, saham biasa dicatat sebagai komponen modal inti utama (CET 1).

### b. Obligasi Subordinasi

Sebagai bagian dari strategi bank dalam penguatan struktur permodalan dan pemenuhan kewajiban atas regulasi POJK 14/POJK.03/2017 bahwa Bank BRI sebagai bank sistemik wajib memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, pada tanggal 6 Juli 2023 Bank BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023 sebesar Rp500.000,- juta dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Obligasi Subordinasi ini mendapatkan predikat idAA dari lembaga pemeringkat Pefindo dan diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 6.45% yang bersifat tetap hingga jatuh tempo. Pelunasan Obligasi Subordinasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 6 Juli 2028.

Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (Tier 2) mengacu pada Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Umum. Obligasi Subordinasi ini dapat di-*write down* dalam hal Perseroan telah ditetapkan oleh OJK dalam kondisi Peristiwa Terganggu Kelangsungan Usaha atau *Point of Non-Viability*, dan OJK telah memerintahkan Perseroan untuk melakukan *write down* tanpa kompensasi. Dalam hal terjadi likuidasi pada Perseroan, pemegang Obligasi Subordinasi mendapat prioritas paling akhir dari kreditur lainnya, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan.

Dana hasil penerbitan Obligasi Subordinasi digunakan oleh Perseroan untuk mendukung peningkatan Aset Produktif yang terkategori inklusif mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PBI RPIM).

Table LIQA – Manajemen Risiko Likuiditas

<b>1. Tata Kelola Risiko</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.</li><li>• Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) terkait risiko likuiditas telah dilakukan sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan.</li><li>• BRI secara berkala melakukan review terhadap <i>Risk Appetite Statement</i> dan parameter limit terhadap risiko untuk level korporasi (<i>bank wide</i>) yang ditetapkan dalam Surat Edaran tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.</li><li>• Strategi manajemen risiko likuiditas searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai dengan RBB 2022 – 2024 bahwa BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah ditetapkan secara tepat waktu serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.</li><li>• Dalam pengelolaan risiko likuiditas, <i>Treasury Business Division</i> bertanggung jawab untuk mengelola likuiditas nasional, sedangkan <i>Market, Portfolio &amp; Enterprise Risk Division</i> bertanggung jawab dalam menyusun dan melakukan <i>review</i> kebijakan manajemen risiko likuiditas.</li></ul>
<b>2. Strategi Pendanaan</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Diversifikasi Pendanaan</b> Dilakukan dengan memperhatikan karakteristik sumber dan jangka waktu pendanaan serta Rencana Bisnis Bank (RBB), dengan mempertimbangkan <i>counterparty</i>, kondisi keberadaan jaminan, jenis instrumen, jenis mata uang, serta lokasi geografis pasar sumber pendanaan.</li><li>• <b>Stabilisasi Pertumbuhan Dana</b> Merupakan pemeliharaan stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK) agar <i>trend</i> pertumbuhan positif, antara lain melalui strategi <i>pricing</i>, penerbitan dan/atau pengembangan produk simpanan, peningkatan pemasaran berkualitas yang menunjang stabilitas pertumbuhan dana, serta melakukan <i>review</i> kebijakan pengembangan dan pemasaran produk.</li><li>• <b>Evaluasi dan Analisis Strategi Pendanaan</b> Kegiatan ini dilakukan secara berkala dalam rapat ALCO / rapat terkait lainnya dengan memperhatikan perubahan factor internal maupun eksternal. <i>Treasury Business Division, Asset &amp; Liabilities Management Desk</i> bersama-sama dengan divisi terkait melakukan identifikasi, pemantauan, dan evaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemampuan BRI dalam memperoleh pendanaan, termasuk alternatif sumber dana yang dapat memperkuat kapasitas untuk bertahan pada kondisi krisis.</li><li>• <b>Memelihara Akses Pasar</b> Pemeliharaan akses pasar rupiah dan valuta asing ini meliputi: memperluas pasar untuk penjualan aset atau meningkatkan jumlah fasilitas siaga dengan/tanpa agunan, aktif bertransaksi di pasar yang sejalan dengan strategi pendanaan, dan memelihara hubungan baik dengan penyedia dana sehingga dapat melakukan diversifikasi sumber dana dengan baik.</li></ul>

### 3. Proses Manajemen Risiko

- Kegiatan identifikasi risiko likuiditas dilakukan oleh setiap unit kerja operasional dengan melakukan identifikasi terhadap risiko likuiditas yang berasal dari produk dan aktivitas perbankan yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan kewajiban maupun rekening administratif serta risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas (misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional), baik untuk eksposur risiko saat ini maupun yang akan timbul di masa yang akan datang.
- Pengukuran risiko likuiditas antara lain dilakukan secara berkala dengan menggunakan proyeksi arus kas, profil maturitas, rasio likuiditas dan *stress testing* likuiditas.
- Pemantauan dan pengendalian hasil pengukuran risiko dilakukan oleh *Treasury Business Division* (contoh: pemantauan GWM, evaluasi pencapaian *cash ratio* nasional secara triwulanan, pelaporan LHBU dan LBBU) dan *Market, Portfolio & Enterprise Risk Division* (contoh: *Liquidity Coverage Ratio*, *Net Stable Funding Ratio*) untuk memonitor kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan risiko likuiditas disajikan dalam bentuk laporan berkala (*dashboard* Risiko Likuiditas) yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BRI. Terhadap hasil pemantauan yang menunjukkan indikasi risiko likuiditas berpotensi meningkat, dilakukan rekomendasi mitigasi eksposur risiko likuiditas serta putusan tindak lanjut pengendaliannya.
- Dilakukan penyusunan *dashboard* profil risiko likuiditas secara berkala atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan strategi bisnis. Teknologi Sistem Informasi yang digunakan untuk menyediakan informasi terkini dan tepat waktu mengenai likuiditas di BRI adalah BI-RTGS, BRINets, BRISIM, *Treasury and Market Risk System*, SKNBI, Swift, Portal LHBU dan LBBU, serta aplikasi lainnya yang dikembangkan untuk monitoring aset dan kewajiban BRI.

### 4. Contingency Funding Plan

- *Contingency Funding Plan* (Rencana Pendanaan Darurat) adalah rencana dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada likuiditas guna memastikan kemampuan BRI memperoleh sumber pendanaan yang dibutuhkan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.
- *Contingency Funding Plan* telah diatur dan disesuaikan pada Surat Edaran Nomor: SE.68-DIR/MPE/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Manajemen Risiko Likuiditas, Buku 5 *Early Warning Indicators* dan *Contingency Funding Plan* yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pengujian *Contingency Funding Plan*, dan *Management Action Contingency Funding Plan*. Uji Coba CFP dilakukan secara regular minimal 1 tahun sekali yang di koordinatori oleh ALM Desk sebagai Sekretaris ALCO.
- Pengujian rencana pendanaan darurat dilakukan dengan metode *walk on paper based*, dimana seluruh unit kerja terkait dengan pendanaan darurat (Tim Manajemen Krisis Likuiditas) berkumpul untuk menjalankan skenario pengujian di atas kertas tanpa melakukan transaksi di pasar keuangan.
- *Market, Portfolio & Enterprise Risk Division* melakukan monitoring terhadap parameter-parameter dalam *Contingency Funding Plan* yang tertuang dalam dashboard likuiditas harian.

## 5. Stress Testing Risiko Likuiditas

- Pelaksanaan *stress testing* dilakukan untuk mengukur kemampuan dan ketahanan BRI memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis (*stress condition*).
- *Stress Testing* risiko likuiditas dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan internal BRI dan/atau permintaan regulator. *Stress Testing* juga dilaporkan secara berkala kepada direksi melalui *Risk Management Commitee* (RMC).
- Pelaksanaan *stress testing* dilakukan dengan menggunakan skenario-skenario *stress test* yang dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek bisnis dan tingkat risiko yang dikelola oleh BRI.
- Hasil *stress test* menunjukkan implikasi setiap skenario yang digunakan untuk menunjukkan daya tahan likuiditas BRI diantaranya dinyatakan sebagai jumlah hari (*Liquidity Surviving Days*).

## 6. Konsentrasi Pendanaan

- BRI menetapkan Limit Rasio 50 Deposan terbesar terhadap dana pihak ketiga dengan limit >20,56% - 23,00% pada profil risiko *moderate*, > 25,44% pada profil risiko *high*.
- BRI menetapkan limit parameter Loan to Deposit Ratio (LDR) Rupiah dengan limit 89,14% - 93,40% pada profil risiko *moderate* dan >97,66% pada profil risiko *high*.
- BRI menetapkan limit parameter Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dengan limit 87,35% - 90,43% pada profil risiko *moderate* dan >93,51% pada profil risiko *high*.

## 7. Maturity Profile

- Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui liquidity gap analysis, yang merupakan proyeksi kelebihan dan kekurangan likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.
- BRI menetapkan limit maturity profile < 1 tahun (Asset jatuh tempo < 1 tahun/liabilitiy jatuh tempo < 1 tahun) dengan limit 68,87% - 84,21% pada profil risiko *moderate to high* dan <53,52% pada profil risiko *high*.
- *Maturity Profile* dilaporkan secara berkala dengan pembagian *bucket* :
  - a. ≤ 1 minggu,
  - b. >1 -2 minggu,
  - c. >2 minggu – 1 bulan,
  - d. >1 – 3 bulan,
  - e. >3 – 6 bulan,
  - f. >6 -12 bulan,
  - g. >12 bulan.

RR. Risiko Hukum - Pengungkapan Kualitatif Umum

No	Parameter Risiko	Keterangan	Bobot	Uker	Satuan	Threshold					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Low	Low To Moderate	Moderate	Moderate to High	High				
5	Risiko Hukum													
5.1	Faktor Litigasi		60%											
5.1.1	Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank akibat dari gugatan dibandingkan dengan modal Bank	Estimasi kerugian yang mungkin dialami oleh Bank yang didasarkan pada besarnya nilai gugatan materiil pada setiap gugatan baru yang diajukan oleh pihak lain kepada bank, pada setiap periode tertentu (Bulan), dibandingkan dengan posisi modal bank pada periode bulan sebelumnya.	15%	HXM	Prosentase	$\leq 0,377%$	$0,377% < X \leq 0,511%$	$0,511% < X \leq 0,645%$	$0,645% < X \leq 0,779%$	$0,779% < X$	0.053%	0.0262%	0.0236%	0.0333%
5.1.2	Besarnya kerugian yang dialami oleh Bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal Bank.	Jumlah kerugian dari putusan Inkrach	15%	HXM	Prosentase	$\leq 0,03%$	$0,03% < X \leq 0,04%$	$0,04% < X \leq 0,04%$	$0,04% < X$		0	0	0	0
5.1.3	Dasar dari gugatan yang terjadi dari pihak yang tergugat/menggugat bank dalam suatu gugatan yang diajukan serta tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan													
5.1.3.1	Dasar dari gugatan yang terjadi dari pihak yang tergugat/menggugat bank		40%											
5.1.3.1.1	Dasar dari gugatan yang terjadi dari pihak yang tergugat/menggugat bank dalam aktivitas perkedatan (lelang agunan)	Akumulasi gugatan triwulanan	60%								59	52	91	80
5.1.3.1.1.1	Gugatan Lelang Agunan akibat kelemahan perjanjian	Akumulasi seluruh jumlah gugatan pada setiap tuntutan hukum berkaitan dengan lelang, yang timbul karena lemahnya perjanjian kredit berikut pengikatan agunannya atau aspek hukum lainnya diluar prosedur lelang. Penghitungan perkara dilakukan baik terhadap Perkara Baru maupun perkara Inkrach. (Triwulanan)	20%	HXM	Nilai	$\leq 100$ gugatan	$\leq 130$ gugatan	$\leq 150$ gugatan	$\leq 150$ gugatan	$> 150$ gugatan	9	2	5	1
5.1.3.1.1.2	Gugatan Lelang Agunan akibat penundaan lelang	Akumulasi jumlah gugatan yang dalam tulisannya mempermudah proses atau prosedur lelang agunan, yang timbul sehubungan dengan permintaan penundaan lelang atas agunan kredit yang bermasalah. (Triwulanan)	80%	HXM	Nilai	$\leq 50$ gugatan	$\leq 90$ gugatan	$\leq 110$ gugatan	$\leq 130$ gugatan	$\leq 130$ gugatan	50	50	86	79
5.1.3.1.2	Dasar dari gugatan yang terjadi dari pihak yang tergugat/menggugat bank dalam aktivitas perkedatan (non lelang agunan)	Akumulasi jumlah gugatan yang berkaitan dengan perjanjian kredit diluar lelang agunan. (Triwulanan)	20%	HXM	Nilai	$\leq 25$ gugatan	$\leq 40$ gugatan	$\leq 55$ gugatan	$\leq 70$ gugatan	$> 70$ gugatan	12	12	12	17
5.1.3.1.3	Dasar dari gugatan yang terjadi dari pihak yang tergugat/menggugat bank dalam aktivitas operasional	Akumulasi jumlah gugatan dalam periode satu bulan yang timbul sehubungan dengan tuntutan hukum yang berkaitan dengan bisnis operasional perbankan. (Triwulanan)	10%	HXM	Nilai	$\leq 10$ gugatan	$\leq 15$ gugatan	$\leq 20$ gugatan	$\leq 25$ gugatan	$> 25$ gugatan	9	3	3	6
5.1.3.1.4	Dasar dari gugatan yang terjadi dari pihak yang tergugat/menggugat bank dalam aktivitas support dan SDM	Akumulasi jumlah gugatan dalam periode satu bulan yang timbul sehubungan dengan tuntutan hukum yang berkaitan dengan bisnis support dan SDM. (Triwulanan)	5%	HXM	Nilai	$\leq 10$ gugatan	$\leq 15$ gugatan	$\leq 20$ gugatan	$\leq 25$ gugatan	$> 25$ gugatan	8	2	2	1
5.1.3.1.5	Dasar dari gugatan yang terjadi dari pihak yang tergugat/menggugat bank dalam aktivitas lainnya (IT, treasury, TF)	Akumulasi jumlah gugatan yang berkaitan dengan aspek hukum yang bersifat non operasional dan non perkedatan dalam bidang bisnis IT, Treasury, Trade Finance dan Bisnis Internasional. (Triwulanan)	5%	HXM	Nilai	$\leq 5$ gugatan	$\leq 10$ gugatan	$\leq 15$ gugatan	$\leq 20$ gugatan	$> 20$ gugatan	0	0	0	1
5.1.3.2	Tindakan dari manajemen atas suatu gugatan yang diajukan	Langkah langkah yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam mengatasi gugatan yang timbul: Mengumpulkan dokumen dan informasi yang akurat Meminimalisir dampak gugatan terhadap keberlangsungan bisnis bank Menunjuk pengacara rekanan apabila diperlukan Mengalokasikan biaya untuk penanganan gugatan Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga (seperti penegak hukum) Metode perhitungan: Memastikan langkah langkah sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi sesuai dengan tingkat kepentingan.	10%	HXM	Kualitatif	Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Kurang Memadai	Tidak bisa diatasi	Sangat Memadai	Sangat Memadai	Sangat Memadai	Sangat Memadai
5.1.4	Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul terhadap modal Bank										0	0	0	0
5.1.4.1	Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama	Akumulasi jumlah gugatan yang timbul karena adanya keragaman materi gugatan akibat penggunaan standar perjanjian yang sama (Triwulanan)	5%	HXM	Nilai						0	0	0	0
5.1.4.2	Estimasi total kerugian yang mungkin timbul terhadap modal bank	Perbandingan besarnya total nilai gugatan materiil pada setiap gugatan yang disebabkan oleh penggunaan standar perjanjian yang sama dibandingkan dengan modal bank dalam periode satu bulan.	5%	HXM	Prosentase	$\leq 0,1%$	$\leq 0,2%$	$\leq 0,3%$	$\leq 0,4%$	$> 0,4%$	0	0	0	0
5.2	Faktor Kelemahan Perikatan (Di luar lelang Agunan)		20%											
5.2.1	Jumlah perjanjian yang tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian	Jumlah perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian	15%	HXM	Nilai	$\leq 5$ gugatan	$\leq 10$ gugatan	$\leq 15$ gugatan	$\leq 20$ gugatan	$> 20$ gugatan	0	0	0	0
5.2.2	Jumlah perjanjian yang terdapat kelemahan klausul perjanjian dan/ atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati	Jumlah perjanjian yang berasal dari perjanjian yang memuat klausul tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati	15%	HXM	Nilai	$\leq 5$ gugatan	$\leq 10$ gugatan	$\leq 15$ gugatan	$\leq 20$ gugatan	$> 20$ gugatan	0	0	0	0
5.2.3	Jumlah perjanjian dalam suatu transaksi yang kompleks yang menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum	Jumlah gugatan yang timbul dari perjanjian yang memuat istilah-istilah yang sulit dipahami atau dalam pelaksanaannya tidak lazim bagi masyarakat umum	15%	HXM	Nilai	$\leq 5$ gugatan	$\leq 10$ gugatan	$\leq 15$ gugatan	$\leq 20$ gugatan	$> 20$ gugatan	0	0	0	0

RR. Risiko Hukum - Pengungkapan Kualitatif Umum

No	Parameter Risiko	Keterangan	Bobot	Uker	Satuan	Threshold					TW I	TW II	TW III	TW IV
						Low	Low To Moderate	Moderate	Moderate to High	High				
5.2.4	Jumlah perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan baik keseluruhan maupun sebagian	Jumlah gugatan yang timbul dari perjanjian yang baik sebagian maupun keseluruhan ketentuannya sulit atau tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak	15%	HKM	Nilai	≤5 gugatan	≤10 gugatan	≤15 gugatan	≤20 gugatan	>20 gugatan	0	0	0	0
5.2.5	Jumlah keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang ditubuhkan oleh bank dengan pihak ketiga	Jumlah gugatan yang timbul akibat dokumen pendukung terkait perjanjian yang dibuat oleh bank dengan pihak ketiga tidak ditubuhkan dengan baik/hilang.	15%	HKM	Nilai	≤5 gugatan	≤10 gugatan	≤15 gugatan	≤20 gugatan	>20 gugatan	0	0	0	0
5.2.6	Jumlah pengimanan dan review dari penggunaan standar perjanjian oleh bank dari atau pihak independen	Jumlah gugatan yang timbul terkait perjanjian yang dibuat oleh bank dengan pihak ketiga yang tidak dilakukan pengimanan atau review secara berkala	15%	HKM	Presentase	≤5 gugatan	≤10 gugatan	≤15 gugatan	≤20 gugatan	>20 gugatan	0	0	0	0
5.2.7	Jumlah penggunaan pilihan hukum Indonesia atas perjanjian yang diadakan oleh bank dan juga penggunaan forum penyelesaian sengketa	Jumlah gugatan yang timbul berkaitan dengan penggunaan pilihan hukum Indonesia atau lembaga penyelesaian sengketa Indonesia sebagai pilihan penyelesaian perselisihan dalam perjanjian	10%	HKM	Kualitatif	Seluruh sengketa atas perjanjian menggunakan pilihan Hukum Indonesia dan menggunakan forum penyelesaian sengketa di Indonesia	Sebagian besar sengketa atas perjanjian menggunakan pilihan Hukum Indonesia dan menggunakan forum penyelesaian sengketa di Indonesia	Sebagian sengketa atas perjanjian menggunakan pilihan Hukum Indonesia dan menggunakan forum penyelesaian sengketa di Indonesia	Perbandingan antara jumlah sengketa atas perjanjian menggunakan pilihan Hukum dan forum penyelesaian sengketa di Indonesia, dengan hukum luar negeri sama banyaknya	Sebagian kecil sengketa atas perjanjian menggunakan pilihan Hukum Indonesia dan menggunakan forum penyelesaian sengketa di Indonesia	0	0	0	0
5.3	Faktor ketahanan/perubahan perundang-undangan		15%											
5.3.1	Jumlah dan nilai nominal dari total produk bank yang belum diatur oleh peraturan perundangan-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan modal bank	Perbandingan antara akumulasi nilai perjanjian yang bersifat kompleks dan belum ada peraturan yang mengatur secara khusus terkait transaksi dimaksud dengan posisi modal bank	60%	HKM	Presentase	≤ 0.5%	≤ 0.75%	≤ 1%	≤ 1.25%	> 1.25%	0	0	0	0
5.3.2	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian yang biasa digunakan oleh bank masih mengacu pada perjanjian yang belum terkini walaupun telah ada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya.	presentasi perjanjian dengan metode sampling terhadap perjanjian yang telah sesuai dengan best practice atau perundang-undangan maupun ketentuan lainnya yang berlaku	40%	HKM	Kualitatif	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian telah sangat memadai karena seluruhnya telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian telah memadai karena sebagian besar telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian kurang memadai karena sebagian kecil telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian tidak memadai karena belum mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian tidak memadai karena seluruhnya telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian telah memadai karena seluruhnya telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian telah memadai karena seluruhnya telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian telah memadai karena seluruhnya telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya	Penggunaan best practice atau suatu standar perjanjian telah memadai karena seluruhnya telah mengacu pada perubahan best practice atau perundang-undangan maupun hal lainnya

# NARASI KPMR

## TW IV tahun 2023

---

### Risiko Hukum

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah **Satisfactory**

#### 1) Tata Kelola Risiko Hukum Melalui Organisasi Manajemen Risiko Hukum

- a) Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait risiko hukum sangat memadai dan telah sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan.
- b) Review terhadap *risk appetite statement* dan parameter limit terhadap risiko untuk level korporasi (*bank wide*) telah ditetapkan dalam Surat Edaran NOSE: SE.29-DIR/MPE/05/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- c) Budaya manajemen risiko hukum diinternalisasi dengan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah beserta Uker binaan, dimana *Legal Officer* dibantu *Associate Legal Officer* Kanwil mengkoordinasikan risiko hukum yang terdapat di masing-masing wilayah binaannya.
- d) Komite di bawah komisaris telah mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
  - Risk Management Committee Oktober Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023 terkait Update Monthly Credit Portofolio Risk, Pembahasan Risk Issue Digital Risk dan Credit Risk Policy, Rekomendasi dan Putusan RMC.
  - Risk Management Committee November Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 terkait Laporan Profil Risiko, Mandatory Report & Monitoring, Risk Issue, Rekomendasi dan Putusan RMC.

(sumber: *Market and Portofolio Enterprise Risk Division*)

- e) Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara umum memadai dengan dilaksanakannya forum-forum yang dilakukan secara berkala. Forum tersebut yaitu *Risk Management Committee* yang didalamnya membahas antara lain profil risiko hukum dan *risk issue* bidang hukum.

#### 2) Kerangka Manajemen Risiko

- a) Tersedia fungsi manajemen risiko hukum bersifat independen, dengan adanya *Legal Officer* di Kantor Pusat serta *Legal Officer* dan *Associate Legal Officer* di Kantor Wilayah.
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi manajemen risiko hukum diantaranya adalah penyampaian advis hukum, pemberian bantuan penanganan perkara dan pembinaan ke Unit Kerja binaan baik yang dilakukan oleh Legal Division maupun seluruh *Legal Officer* Kantor Wilayah Selindo.
- c) Monitoring penanganan perkara, termasuk penggunaan biaya perkara yang dilakukan melalui laporan perkara yang disampaikan kepada Kantor Pusat setiap bulan oleh Bagian Hukum Kantor Wilayah.
- d) Kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko hukum antara lain:
  1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)
  2. Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko

3. Kebijakan tentang penulisan komparasi Dasar Pendirian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
4. Kebijakan tentang Surat Kuasa Notaril Direksi BRI kepada Pinwil BRI atau Pemangku Jabatan Pinwil BRI atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinwil
5. Kebijakan tentang Surat Kuasa Notaril Direksi BRI kepada Pinca BRI atau Pemangku Jabatan Pinca BRI atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinca
6. Kebijakan tentang laporan adanya perkara/sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan/ lembaga di luar pengadilan
7. Kebijakan tentang Penanganan Permasalahan Hukum
8. Buku saku hukum bidang Perkreditan, Operasional, Agunan, Treasury, Bisnis Internasional dan Investment Services.
9. Surat-surat mengenai mekanisme pengendalian risiko hukum yang disampaikan kepada Unit Kerja terkait.
10. Legal Manual bidang perkreditan, Legal Manual Bidang Operasional, Legal Manual Penanganan Perkara (Perdata, Pidana), Legal Manual Permasalahan Hukum, Legal Manual Internasional, Treasury & Investment Services, Legal Manual Kepailitan & PKPU, Legal Manual Kegiatan Usaha.
11. Proses penyusunan ketentuan-ketentuan baru mengenai pengendalian risiko hukum, antara lain: SOP Penanganan Fraud ke Saluran Hukum, SE Penggunaan Jasa Advokat/Penasihat Hukum dalam Penanganan Permasalahan dan Pemberian Pendapat Hukum, SE Penggunaan Biaya Penanganan Permasalahan Hukum, SOP Gugatan Sederhana, SE Bantuan Pelindungan Hukum bagi Pekerja, dan SE Bantuan Pelindungan Hukum bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

### 3) Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Penilaian Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum

- a) Proses manajemen risiko hukum telah mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Proses manajemen risiko hukum tersebut dilakukan unit kerja dan dikonsolidasikan oleh Legal Division selaku koordinator dari risiko hukum, diantaranya:
  - 1) Melaksanakan pembinaan/penyuluhan hukum baik regular maupun tematik kepada unit-unit kerja BRI secara berkala sesuai jadwal dan target yang ditetapkan melalui media *online meeting*.
  - 2) Melaksanakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa-peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan melalui surat selindo yang ditujukan kepada seluruh Unit Kerja BRI Selindo.
  - 3) Membuat/merevisi ketentuan/pedoman berimplikasi hukum dan membuat kompilasi SK/SE/Surat Selindo yang dikeluarkan oleh Legal Division.
  - 4) Membuat surat risk awareness atas risiko hukum yang disampaikan kepada Unit Kerja terkait.
  - 5) Meningkatkan pengetahuan bidang hukum bagi pekerja BRI melalui pembuatan pedoman-pedoman berupa buku saku hukum bidang operasional, buku saku hukum bidang perkreditan dan pembuatan PKS & MoU, pembinaan dan penyuluhan hukum
  - 6) Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Kanwil.
  - 7) Melakukan kegiatan pendampingan kepada seluruh jajaran unit kerja BRI.
  - 8) Memberikan/ menghadiri penanganan permasalahan hukum bagi BRI di pengadilan (saluran hukum) maupun di luar pengadilan.

- 9) Berkoordinasi dengan pihak ketiga: Pengacara, Kepolisian, Kejaksaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan hukum.
  - 10) Meminta Second Opinion kepada konsultan hukum yang kompeten apabila diperlukan
  - 11) Menyelenggarakan penyuluhan hukum terhadap permasalahan hukum yang actual untuk meningkatkan pemahaman aspek hukum.
  - 12) Penyampaian sharing materi hukum yang update melalui media komunikasi visual seperti infografis, dsb.
  - 13) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang merupakan program Sinergi Legal BRI Group
  - 14) Melaksanakan Workshop, In House Training, Diskusi, dll untuk terus memperbaharui Pengetahuan Hukum pekerja BRI dengan narasumber eksternal yang expert di bidangnya.
- b) Legal Division BRI memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara kualitas memadai dan mampu dalam menghadapi perkara-perkara Hukum. Setiap pekerja memiliki *background* Pendidikan Ilmu Hukum, dibekali pendidikan dasar penanganan permasalahan hukum (dhi. Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan mendapatkan pengembangan pengetahuan bidang hukum melalui kegiatan seminar, *In House Training*, sertifikasi, dan kuliah umum dengan mengundang ahli dibidang terkait yang diselenggarakan untuk *Legal Officer* Selindo serta sertifikasi bidang hukum. Adapun dari sisi kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) **Legal Division BRI terdapat kekurangan sejumlah 29 orang pekerja** dari keseluruhan formasi yang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 262a-DIR/CDS/05/2021 tentang Penetapan Formasi Jabatan Legal Division.
- c) Untuk mendukung pengelolaan risiko hukum, Legal Division berkoordinasi dengan Divisi terkait telah mengembangkan aplikasi DELEGASI (Data dan Informasi Legal Terintegrasi) untuk melakukan mitigasi risiko hukum dan penyusunan perkara yang dilakukan oleh Legal Division.

#### 4) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dilakukan secara berkala terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko hukum telah dilaksanakan secara Triwulanan.

## 1. Risiko Reputasi

a. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah **Satisfactory**

### 1) Tata Kelola Risiko

- a) Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) terkait risiko reputasi telah memadai serta sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis BRI secara keseluruhan.
- b) *Review* terhadap *Risk Appetite Statement* dan parameter limit risiko untuk level korporasi (*bank wide*) telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor SE. 39-DIR/EMP/07/2020 tanggal 13 Juni 2019 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Banking Rating*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- c) Budaya manajemen risiko reputasi BRI secara berkala diinternalisasi melalui berbagai media komunikasi seperti aplikasi digital office, social media, dll. Selain itu, Kantor Wilayah memiliki unit kerja yang berfungsi mengelola risiko reputasi yaitu Bagian Operasional, Jaringan, Layanan dan *Performance Management*, serta Bagian Logistik dan Umum.
- d) Dewan Komisaris memiliki Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- e) Komite Pemantau Manajemen Risiko telah mengadakan pertemuan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali selama triwulan I s/d triwulan IV tahun 2023 yang membahas terkait risiko-risiko yang mungkin terjadi di ruang lingkup perusahaan.
- f) Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi secara umum memadai dengan terselenggaranya forum bersama secara berkala. Forum tersebut antara lain *Risk Management Committee*. Profil risiko reputasi dan *risk issue* terkait risiko reputasi merupakan materi yang rutin dibahas dalam forum tersebut.
- g) Sebagai bentuk dasar ketentuan dalam pengelolaan Sosial Media di BRI, maka Divisi CSC menerbitkan SE. 12 – DIR/CSC/03/2022 Tanggal 17 Maret 2022 tentang Pengelolaan Media Sosial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### 2) Kerangka Manajemen Risiko

- a) Strategi manajemen risiko reputasi searah dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai dengan RBB 2023-2025. Strategi dalam menjaga risiko reputasi BRI diantaranya:
  - i. Melakukan *monitoring* atas pemberitaan negatif untuk menentukan rekomendasi strategi tindaklanjut tepat.
  - ii. Mengelola media sosial Twitter dan Instagram untuk memberikan tanggapan atas komentar pengguna medsos yang dianggap valid.
  - iii. Melakukan sinergi pengelolaan komunikasi BRI Group bersama dengan perusahaan-perusahaan Anak.
  - iv. Menjalin dan menjaga hubungan baik dengan media diantaranya dengan rutin menyelenggarakan Pemred Gathering.
  - v. Melakukan survey *Corporate Image*.
- b) Terdapat unit kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola nasabah dan para *stakeholder* lain dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Peran utama *public relation* BRI harus memadai dalam penanganan publikasi negatif, baik yang berskala lokal maupun nasional.
- c) Dalam rangka pengendalian risiko reputasi di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan

risiko reputasi antara lain dilakukan dengan penerbitan *Top Risk Issue* secara triwulanan, untuk meningkatkan *risk awareness*.

- d) Kecukupan perangkat organisasi ditetapkan secara struktural. Sesuai Surat Edaran Direksi BRI Nose: S.08-DIR/SKP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dijelaskan bahwa juru bicara Perusahaan selain Direktur Utama/Wakil Direktur Utama dan/atau Anggota Direksi lainnya ditetapkan sebagai berikut:
- i. *Division Head Corporate Secretary*;
  - ii. *Department Head Corporate Communication Department – Corporate Secretary Division*;
  - iii. *Division Head* di Kantor Pusat;
  - iv. Regional CEO;
  - v. Pemimpin Cabang; dan
  - vi. Pejabat lainnya yang ditunjuk dan mendapat izin dari Direksi dan/atau Pejabat yang menjadi atasannya.

Selain itu, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: 278-DIR/CDS/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 Tentang Organisasi, Formasi Jabatan dan Deskripsi Jabatan *Corporate Secretary Division, Corporate Communication Departement* bertanggung jawab pula terhadap aktivitas kehumasan, termasuk namun terbatas pada:

- i. Pengkomunikasian informasi kepada pihak eksternal yang berkepentingan secara langsung atau melalui media cetak/elektronik.
  - ii. Pengelolaan isu-isu yang diperkirakan berdampak negatif terhadap Perusahaan.
- e) BRI telah memiliki kebijakan, prosedur dan limit risiko reputasi diantaranya melalui:
- i. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: PP: 39-DIR/EMP/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Prosedur Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
  - ii. Surat Edaran Direksi BRI Nose. S.08-DIR/SKP/06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
  - iii. Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 09 -DIR/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Corporate Governance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  - iv. Juklak Nomor JL.42-KPD/09/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Panduan Penyampaian Informasi dan Komunikasi kepada Pihak Media.
  - v. Upaya sosialisasi *risk awareness* hingga penerapan praktik GCG dikomunikasikan melalui media sosial & *press release* untuk memitigasi risiko reputasi yang muncul telah dilakukan.
  - vi. Pembentukan *social media troopers* dan peningkatan *corporate image* BRI memanfaatkan media sosial.
  - vii. Koordinasi dengan unit kerja untuk penyusunan *standby statement* oleh Divisi Corporate Secretary dalam menghadapi insiden yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi.

### 3) **Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen**

- a) Proses manajemen risiko reputasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko reputasi, meliputi:
- i. Kegiatan identifikasi risiko reputasi secara berkala oleh *Corporate Secretary Division* dengan melihat jumlah pemberitaan negatif terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa, baik cetak maupun elektronik, *call center* dan *rating* perusahaan.
  - ii. Pengukuran risiko reputasi menggunakan perangkat profil risiko yang dilakukan secara

bulanan. Pemberitaan negatif dan keluhan nasabah yang berpotensi negatif ditindaklanjuti oleh beberapa divisi diantaranya yaitu Divisi *Corporate Secretary Division* dan *Service & Contact Center Division*, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

- iii. Penerbitan ketentuan yang mengatur etika berkomunikasi di media sosial untuk Pekerja BRI.
  - iv. Pengukuran risiko reputasi untuk memperkirakan tingkat kerawanan (*vulnerabilities*) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses identifikasi, pengukuran risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi menggunakan beberapa parameter sesuai dengan limit yang ditetapkan dalam Laporan Profil Risiko Reputasi.
  - v. Pemantauan risiko oleh *Corporate Secretary Division* dilakukan secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan negatif di media massa dan menuangkannya dalam Laporan Profil Risiko Reputasi.
  - vi. Pemantauan risiko reputasi di Kantor Wilayah oleh Bagian ONS – Seksi Layanan dilakukan secara berkala setiap tahun terhadap kualitas layanan di Kanca, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing. Selain itu, dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
  - vii. Pengendalian risiko reputasi BRI dengan penerbitan kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta koordinasi antara *Corporate Secretary Division*, Divisi Layanan dan unit kerja terkait penyelesaian pemberitaan negatif dan keluhan nasabah sesuai SLA yang telah ditetapkan.
- b) Kecukupan sistem informasi manajemen risiko reputasi telah tersedia secara berkala atau sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, Kanca, KCP dan Kantor Kas BRI wajib menggunakan aplikasi CHS (*Complain Handling System*) untuk melakukan eskalasi laporan/pengaduan nasabah ke Kantor Pusat.
  - c) Formasi Pekerja terpenuhi dan secara rutin dilakukan pendidikan sesuai kompetensi untuk mendukung efektifitas pengelolaan risiko reputasi. Hal tersebut meliputi staf *Corporate Communication Department – Corporate Secretary Division* untuk Kantor Pusat dan *Service Ambassador (SA)* di setiap Kantor Wilayah yang melakukan eskalasi kepada Divisi Layanan Kantor Pusat. Namun untuk fungsi kehumasan di Kantor Wilayah belum terakomodir dengan cukup.
  - d) Terdapat aplikasi BRIpedia yang dapat dipergunakan dalam rangka melakukan pencarian ketentuan internal BRI.
  - e) Terdapat *Infographic* Transformasi Budaya *Customer Centric* dalam rangka pemahaman seluruh Pekerja BRI terkait transformasi budaya kerja.
  - f) Terdapat imbauan terkait larangan memberikan cendera mata/buah tangan/souvenir.

#### 4) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

- a) Audit Intern melakukan evaluasi dan menilai kecukupan pelaksanaan manajemen risiko reputasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan evaluasi dan menilai kecukupan sistem pengendalian intern atas manajemen risiko reputasi.
- b) Pelaksanaan audit wajib dilakukan secara berkala berdasarkan prosedur yang berlaku. Setiap kaji ulang independen harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan memadai.

Terhadap hasil *self assessment*, risiko inheren reputasi berada pada peringkat risiko *low*. Sedangkan dalam pelaksanaan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko reputasi, masih memadai (*Satisfactory*).

## **A. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan**

Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan di BRI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Cakupan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi kepatuhan diantaranya adalah:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk sistem ketentuan dan pedoman internal BRI;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI;
6. Melakukan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur Kepatuhan didukung oleh Compliance Division yang merupakan organisasi Satuan Kerja Kepatuhan yang terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak profesional dan objektif. Disamping fungsi kepatuhan, Compliance Division juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance serta Anti Money Laundering & Counter Financing of Terrorism (AML CFT).

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan di BRI antara lain mencakup kebijakan Tata Kelola, Tata Kelola Terintegrasi, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Whistleblowing System, Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

## **B. Strategi dan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan**

Strategi penerapan manajemen risiko kepatuhan di BRI dilakukan melalui penguatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Sistem Informasi yang handal dan proses manajemen risiko kepatuhan yang menyeluruh.

1. Penguatan Sumber Daya Manusia  
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang dibekali dengan pengembangan kompetensi yang memadai serta mendapatkan pendidikan dan sertifikasi yang sesuai dengan level jabatan. Sepanjang tahun 2023, pekerja di jajaran satuan kerja kepatuhan secara reguler telah mengikuti program pendidikan guna pengembangan kompetensi, antara lain:
  - Pelaksanaan training, *short course*, seminar dan/atau workshop dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
  - Pelaksanaan workshop terkait penguatan budaya kepatuhan kepada jajaran fungsi kepatuhan Regional.
2. Infrastruktur Sistem Informasi  
Compliance Division mempunyai sistem informasi dalam rangka pengelolaan manajemen risiko kepatuhan yang lebih baik antara lain GCG Online System 2.0., Aplikasi

*Whistleblowing System*, Aplikasi *Compliance Reminder*, Sistem Analisa dan Dampak dalam rangka pengujian kepatuhan di BRIPEDIA, sistem pelaporan terkait APU PPT antara lain yaitu Aplikasi Penilaian *Risk Based Approach* (RBA), Sistem Anti Money Laundering (AML) dan *Countering Financial Terrorism* (CFT), Aplikasi pelaporan *Suspicious Transaction Report* (STR) online, *Integrated AML CFT Screening* (*Watchlist Screening* pada Platform Pembukaan Rekening & Transaksi), *Artificial Intelligence for Monitoring Transaction System through Graph Technology*, RBA Bankwide, RBA Customer, Sipesat *Reporting Tools*.

3. Proses Manajemen Risiko kepatuhan yang menyeluruh  
Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan di BRI dilakukan melalui beberapa metode antara lain:
- Penyusunan dan internalisasi program budaya kepatuhan di seluruh unit kerja.
  - Identifikasi dan monitoring potensi risiko kepatuhan.
  - Pengujian kepatuhan atas rencana kebijakan, perjanjian kerja sama, putusan kredit dan rencana kebijakan lainnya.
  - Penyusunan dan distribusi Resume dan Analisa Dampak terhadap ketentuan eksternal terbaru.
  - Tanggapan kepatuhan kepada Divisi terkait mengenai rencana kebijakan, Perjanjian Kerja Sama dan Perijinan Produk Bank.
  - Implementasi dan monitoring Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
  - Pemantauan kepatuhan bank atas komitmen kepada Regulator.
  - Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait.

### **C. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.**

Pelaksanaan evaluasi terhadap pengendalian dan pengelolaan manajemen risiko kepatuhan dilakukan baik oleh pihak internal dan pihak eksternal. Evaluasi dari pihak internal dilakukan oleh Direksi melalui *Risk Management Committee*, kaji ulang independen oleh Satuan Kerja Audit Internal serta laporan-laporan yang telah disampaikan. Disamping itu, Dewan Komisaris melalui Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala melakukan pengawasan terhadap manajemen risiko kepatuhan sesuai prinsip pengawasan yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi oleh pihak eksternal dilaksanakan oleh regulator secara periodik sesuai dengan ketentuan regulator (semesteran) berdasarkan laporan Fungsi Kepatuhan yang telah disampaikan.

**REGISTER LAPORAN FAKTA MATERIAL TAHUN 2023**

No.	Kode Form	Kode Emiten	Nomor Surat	Perihal
1	E019	BBRI	B.36.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengakhiran Periode Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan Perseroan (Buyback)
2	E019	BBRI	B.37.e-CSC/CSM/CGC/01/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A
3	E019	BBRI	B.40.e.CSC/CSM/CGC/02/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Pembelian Kembali Saham
4	E019	BBRI	B.294-DIR/FMA/02/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan
5	E019	BBRI	B.68.e-CSC/CSM/CGC/03/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Perubahan Kepemilikan Saham pada PT Asuransi BRI Life
6	E019	BBRI	B.93.e-CSC/CSM/CGC/04/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Informasi atau Fakta Material Penambahan Modal pada PT BRI Ventura Investama
7	E019	BBRI	B.125.e-CSC/CSM/CGC/05/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018
8	E019	BBRI	B.161.e-CSC/CSM/CGC/07/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A
9	E019	BBRI	B.237.e-CSC/CSM/CGC/11/2023	Laporan Informasi atau Fakta Material Laporan Kesiapan Dana Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D

B. Format Laporan

LAPORAN SUKU BUNGA DASAR KREDIT

(efektif % per tahun)

No	Komponen <sup>1)</sup>	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah ( <i>Prime Lending Rate</i> )				
		Berdasarkan Jenis Kredit				
		Kredit Korporasi <sup>2)</sup>	Kredit Ritel <sup>2)</sup>	Kredit Mikro <sup>3)</sup>	Kredit Konsumsi <sup>2)</sup>	
				KPR	Non KPR <sup>4)</sup>	
<b>1</b>	<b>Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)</b>	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
	1.1. Biaya Dana	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56
	1.1.1. Biaya Dana Pihak Ketiga	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44
	1.1.2. Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.1. Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.2. Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Indonesia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.3. Biaya Dana Surat Berharga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.4. Biaya Dana Pinjaman yang Diterima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.5. Biaya Dana Liabilitas Antar Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.2.6. Biaya Dana Liabilitas Keuangan Permodalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1.3. Biaya Dana Lainnya	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	1.1.3.1. Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	1.1.3.2. Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2. Biaya Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3. Biaya Regulasi	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
	1.3.1. Biaya Giro Wajib Minimum (GWM)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	1.3.2. Biaya Premi Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	1.4. HPDK Lainnya	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	1.4.1. Biaya Kas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	1.4.2. Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Biaya Overhead</b>	1.07	3.85	7.03	3.01	3.01
	2.1. Biaya Tenaga Kerja	0.51	1.85	2.97	1.44	1.44
	2.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	0.04	0.16	0.04	0.13	0.13
	2.3. Biaya Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4. Biaya Sewa	0.04	0.14	0.30	0.12	0.11
	2.5. Biaya Promosi dan Pemasaran	0.17	0.60	0.17	0.47	0.47
	2.5.1. <i>Cash Back</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.2. Hadiah	0.10	0.36	0.12	0.28	0.28
	2.5.3. Iklan dan Promosi	0.07	0.24	0.05	0.19	0.19
	2.5.4. <i>Sponsorship/Entertainment</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.5. Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	0.03	0.11	0.02	0.08	0.08
	2.7. Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	0.07	0.24	0.28	0.19	0.19
	2.8. Biaya Overhead Lainnya	0.21	0.75	3.21	0.58	0.59
	2.8.1. Biaya Barang/Jasa dan Administrasi	0.13	0.47	3.20	0.37	0.37
	2.8.2. Lainnya	0.08	0.28	0.01	0.21	0.22
<b>3</b>	<b>Marjin Keuntungan (<i>Profit Margin</i>)</b>	3.91	1.38	3.95	1.22	2.72
	<b>Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (1+2+3)</b>	8.00	8.25	14.00	7.25	8.75
	<b>Estimasi Premi Risiko</b>	1.00	4.18	4.28	2.77	0.74
	<b>Suku Bunga Kredit (SBDK + Estimasi Premi Risiko)</b>	9.00	12.43	18.28	10.02	9.49

**Tabel II Risiko Pasar - Pengungkapan Kualitatif Umum**

<b>1. Penerapan Manajemen Risiko Pasar</b>
<p>a. Dewan Komisaris dan Direksi yang berperan sebagai <i>Governing Body</i> pada kerangka <i>Three Lines Model</i> bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko pasar di BRI telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko.</p> <p>b. Dalam menjalankan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, terdapat komite di bawah komisaris yang secara berkala melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses penerapan manajemen risiko pasar melalui Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko.</p> <p>c. Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Pelaksanaan tugas direksi dalam tata kelola manajemen risiko dilakukan melalui pelaksanaan <i>Risk Management Committee (RMC)</i> dan <i>Assets &amp; Liability Committee (ALCO)</i> yang dilakukan secara reguler. RMC dan ALCO memberikan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.</p> <p>d. Dalam pengelolaan manajemen risiko pasar, BRI mempunyai unit kerja yang terdiri dari <i>front office (Treasury Business Division)</i>, <i>middle office (Market, Portfolio &amp; Enterprise Risk Division)</i> dan <i>back office (Payment &amp; Operation Division)</i>. <i>Front office</i> bertugas melakukan transaksi instrumen keuangan, dan melakukan pengembangan strategi bisnis. <i>Middle office</i> menetapkan kebijakan dan melakukan monitoring limit risiko pasar, melakukan validasi hasil perhitungan valuasi/<i>mark to market (MTM)</i>. <i>Back office</i> melakukan <i>settlement</i> transaksi instrumen keuangan dan secara harian melakukan perhitungan valuasi/<i>mark to market (MTM)</i>.</p>
<b>2. Pengelolaan Portfolio Trading Book dan Banking Book</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Strategi pengelolaan <i>trading book</i> dan pengelolaan posisi <i>banking book</i> BRI tercermin pada Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Pengelolaan posisi <i>trading</i> dan <i>banking book</i> ditetapkan secara berkala dalam ALCO maupun forum Manajemen Risiko (RMC).</li><li>• Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) antara lain dengan menetapkan <i>mark to market</i> pada akhir hari, menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran <i>standardized</i> secara bulanan dan pengukuran <i>internal model (VaR)</i>, melakukan <i>backtesting</i>, melakukan analisa sensitivitas suku bunga setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan pengelolaan <i>profil maturity</i> surat berharga.</li><li>• Analisa dampak perubahan suku bunga dilakukan melalui perhitungan <i>Interest Rate Risk in The Banking Book</i> dengan metode <i>Economic Value of Equity (EVE)</i> dan <i>Net Interest Income (NII)</i> sesuai dengan SEOJK No 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.</li></ul>

### 3. Mitigasi Risiko Pasar

- a. Direksi telah menetapkan Kode Etik Pasar (*Market Code of Conduct*) sebagai norma moral professional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya.
  - b. Proses manajemen risiko pasar BRI telah memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pasar. Proses tersebut tercermin dalam aktivitas yang dilakukan unit kerja *front office*, *middle office*, dan *back office*.
  - c. Penetapan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Pasar yang sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank.
  - d. Pengukuran risiko pasar dilakukan oleh *Market, Portfolio & Enterprise Risk Division* secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) baik dalam bentuk laporan berkala maupun dashboard profil risiko pasar secara harian.
  - e. Dalam monitoring limit transaksi, telah ditetapkan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang terdapat pada :
    - i. Penetapan Limit Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Aset Keuangan Terkait Aktivitas Treasury Kantor Pusat
    - ii. Penetapan Limit Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Aset Keuangan Terkait Aktivitas Treasury KCLN (Singapore, New York, Timor Leste & Taipei)
- BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury and market risk*, dimana sistem ini menjadi salah satu perangkat dalam identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko pasar.
  - Sistem pengendalian intern dievaluasi dan dinilai oleh audit intern dan disesuaikan dengan ketentuan minimal 1 (satu) tahun sekali.
  - Pelaksanaan audit wajib dilakukan secara berkala kepada masing-masing bagian (*front*, *middle*, dan *back office*) oleh audit intern berdasarkan prosedur yang berlaku dan setiap hasil kaji ulang independen telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan memadai.

**Umum – Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA) – FMA**

<b>a. Perbedaan antara nilai tercatat dalam Publikasi Laporan Keuangan dan nilai tercatat Menurut Kontraktual</b>
Perbedaan antara nilai tercatat dalam Publikasi Laporan Keuangan dan nilai tercatat menurut kontraktual setiap aset dan liabilitas keuangan disebabkan oleh perbedaan tujuan penggunaan data aset dan liabilitas keuangan antara kepentingan pelaporan sesuai standar akuntansi dan negosiasi bisnis. Prinsip tersebut juga diterapkan pada anak perusahaan BRI
<b>b. Metodologi valuasi, deskripsi proses verifikasi harga independent, dan prosedur untuk penyesuaian valuasi atau reserves</b>
Penilaian/valuasi merupakan komponen penting yang dibutuhkan untuk mengelola hampir semua risiko perbankan termasuk risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Proses valuasi dilakukan atas seluruh posisi trading book termasuk efek-efek yang dimiliki Grup dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (fair-value-to-other comprehensive income). Terdapat tingkatan metode penilaian untuk instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian adalah sebagai berikut: • Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; • Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga); • Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi). Verifikasi sumber harga pasar dilakukan secara sampling untuk setiap jenis instrumen dalam posisi terbuka dan tidak harus dilakukan pada waktu yang sama. Metode sampling dilakukan secara acak (random sampling). Verifikasi setidaknya dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model valuasi. Penyesuaian valuasi tidak diperlukan karena nilai tercatat sesuai kerangka risiko pasar menggunakan sumber dari nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan.

## Manajemen Risiko – Pendekatan Manajemen Risiko Bank (OVA)

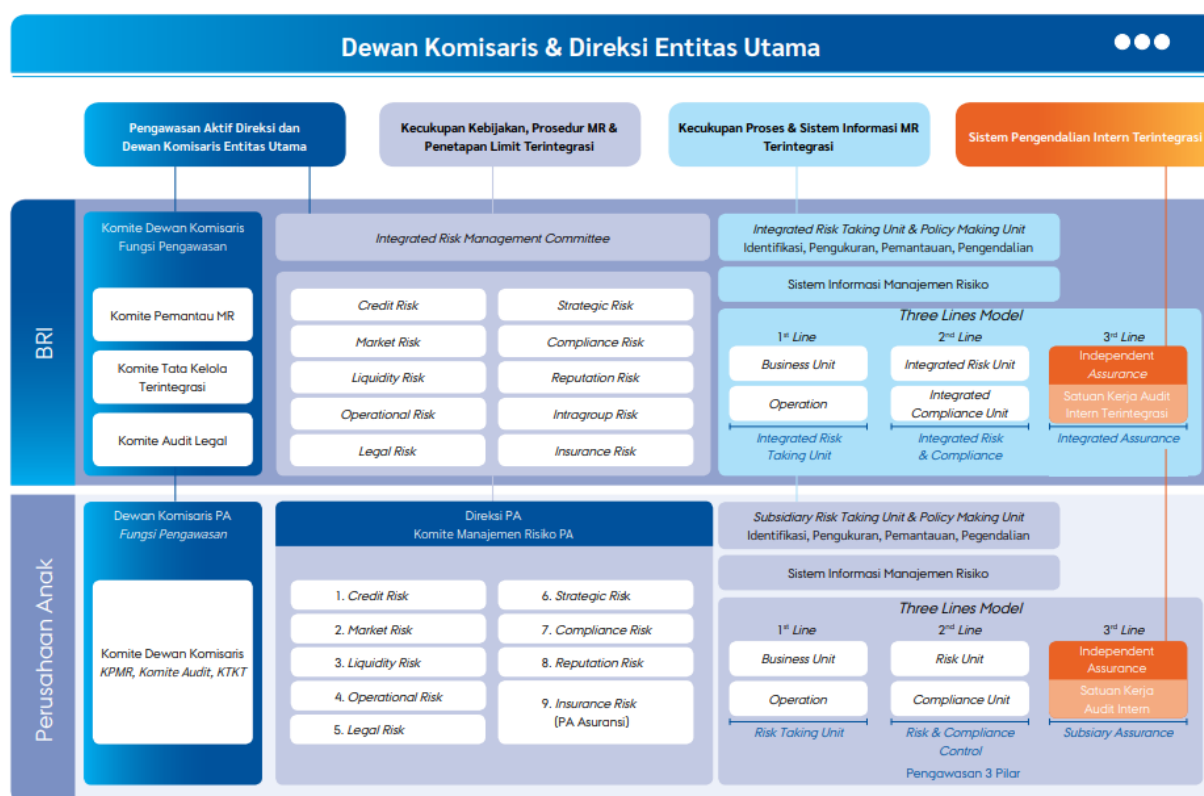
### a. Model bisnis dan interaksi dengan profil risiko

Profil Risiko Bank ditetapkan untuk memberikan gambaran atas penilaian risiko-risiko yang melekat dalam aktivitas bisnis dan operasional BRI beserta kualitas penerapan manajemen risikonya baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Model bisnis Bank tercermin dalam profil risiko melalui penetapan dan pengukuran atas parameter-parameter profil risiko. Bank secara rutin melakukan evaluasi atas penetapan limit Risiko dan ambang batas (*threshold*) manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha, eksposur risiko, dan/atau Profil Risiko secara signifikan.

Dalam rangka menghitung tambahan modal sesuai Profil Risiko, Bank menerapkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. ICAAP merupakan proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.

### b. Struktur dan Tata Kelola Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko BRI yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan modal dan pengelolaan risiko dalam operasional dan bisnis yang meliputi seluruh jajaran organisasi BRI dan anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Secara sederhana, kerangka kerja manajemen risiko BRI dan terintegrasi dengan Perusahaan Anak digambarkan sebagai berikut:



Kerangka kerja tata kelola manajemen risiko terintegrasi di atas mengacu kepada POJK No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Kerangka kerja dan tata kelola Manajemen Risiko yang digunakan oleh KK BRI terdiri dari 4 (empat) pilar utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pilar 1 : Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Pilar 2 : Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit terintegrasi.
3. Pilar 3 : Kecukupan proses dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi; dan
4. Pilar 4 : Sistem pengendalian intern terintegrasi yang menyeluruh.

Dalam pelaksanaan Pilar ke-1 dan Pilar ke-2 Manajemen Risiko Terintegrasi, Direksi dan Dewan Komisaris pada masing-masing entitas KK BRI dibantu oleh Komite Manajemen Risiko di bawah Direksi dan Komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan Pilar ke-3, masing-masing entitas KK BRI harus menerapkan model tata kelola risiko 3 (tiga) lini atau *three lines model* yaitu :

1. lini pertama sebagai unit pemilik Risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis yang terdiri dari *Core Risk Taking Unit* maupun *Supporting Risk Taking Unit*;
2. lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memitigasi Risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan Manajemen Risiko; dan
3. lini ketiga sebagai fungsi Audit Intern merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh perusahaan.

Dalam pelaksanaan Pilar ke-4 yaitu Sistem pengendalian intern terintegrasi, SKAIT dan SKAI Perusahaan Anak sebagai *Independent Assurance* memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan ketiga pilar Manajemen Risiko Terintegrasi. Terakhir, dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sinergi antar organ pengelola risiko entitas utama dan organ pengelola risiko perusahaan anak.

### c. Code of Conduct

BRI memiliki kebijakan *Code of Conduct* (Kode Etik) yang tertuang pada ketentuan *Good Governance*. Prinsip Kode Etik di BRI adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Komitmen dan Keteladanan Pemimpin  
Komitmen dari pemimpin dicerminkan dari kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik melalui Surat Pernyataan Kode Etik. Disamping itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga menjadi teladan bagi seluruh Insan BRILiaN dalam mempedomani serta mengimplemetasikan Kode Etik.
2. Prinsip Transparansi  
Prinsip Transparansi tercermin dari keterbukaan dan publikasi yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan, implementasi dan pelanggaran Kode Etik yang terjadi di BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Prinsip Pertanggungjawaban  
Tanggung jawab BRI sebagai Bank atas implementasi Kode Etik antara lain dicerminkan dari hubungan BRI dengan nasabah, pesaing, mitra kerja, regulator, *stakeholder* serta masyarakat dan lingkungan. Adapun tanggung jawab untuk memenuhi Kode Etik bagi Insan BRI terdokumentasi dalam Surat Pernyataan Kode Etik serta penerapan perilaku yang sesuai dengan Kode Etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Prinsip Pengendalian  
Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dilaporkan melalui sarana pelaporan *Whistleblowing System* (WBS). Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran Kode Etik tersebut terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Disiplin BRI.
5. Prinsip Pengawasan  
Terhadap implementasi kebijakan Kode Etik di BRI dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kebijakan Kode Etik di BRI telah dipahami oleh insan BRI serta diimplementasikan dengan baik, sehingga dapat selalu menjadi pedoman bagi insan BRI. Adapun terhadap kebijakan Kode Etik senantiasa dilakukan perbaikan sesuai dengan kondisi terkini.

Komitmen Kode Etik berlaku bagi seluruh Insan BRI di seluruh jenjang organisasi. Penerapan Kode Etik secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Seluruh Insan BRI wajib membuat Surat Pernyataan Kode Etik setiap tahun.

Publikasi dan transparansi Kode Etik Perusahaan dilakukan melalui *website* BRI yang mencakup dan tidak terbatas pada kebijakan serta implementasi kode etik di BRI, sesuai ketentuan yang berlaku serta sistem kepatuhan BRI disertifikasi/diaudit/diverifikasi oleh pihak ketiga baik internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inisiatif penguatan implementasi budaya risiko searah dengan *destination statement, culture milestone & risk focus* dimulai dengan *Diagnostic & Measurement* melalui profil risiko, Risk Appetite Statement (RAS), Hasil Verifikasi dari Branch Risk & Compliance (BRC) dan Unit Risk & Compliance (URC) yang ada di Unit Kerja, *Employee Engagement Survey, Barometer Culture, Whistleblowing System (WBS)*, dan *Risk Culture Maturity*. Selanjutnya dilakukan penetapan inisiatif yang selaras dengan aspirasi Perusahaan yang dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh lini dan penguatan internalisasi budaya melalui aktivasi *culture program, employee engagement* melalui komunikasi pada berbagai *channel* dan menyediakan guideline perilaku menjawab kelemahan *risk culture*.

#### **d. Ruang Lingkup dan Fitur Utama Sistem Pengukuran Risiko**

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya melalui pengembangan model seperti *Internal Risk Rating, Value at Risk, Portfolio Management, Stress Testing, Economic Value of Equity*, model *impairment* dan model lainnya yang mendukung dalam pengambilan keputusan.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BRI

Dalam rangka penyesuaian antara penerapan Basel II, III dan Enterprise Risk Management (ERM), BRI terus melaksanakan Implementasi Basel sesuai dengan acuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) maupun best practices lainnya, yang meliputi area di Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (Interest Rate Risk in The Banking Book), Risiko Operasional, Pengelolaan Modal dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Stress Testing serta Recovery dan Resolution Plan.

#### **e. Pelaporan Informasi Risiko yang Diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi**

Deskripsi proses pelaporan informasi risiko yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi, khususnya terkait dengan ruang lingkup dan isi dan laporan eksposur risiko.

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BRI dan seluruh Perusahaan Anak menyusun laporan manajemen risiko dalam format yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara konsolidasian maupun secara

terintegrasi. Pelaporan manajemen risiko kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pihak-pihak tertentu antara lain:

1. Laporan pemantauan *Risk Appetite Statement*, Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank secara Individu maupun Konsolidasi,
2. Laporan kecukupan pencadangan (CKPN)
3. Laporan ATMR untuk Risiko Kredit, Pasar dan Operasional
4. Laporan perkembangan pertumbuhan pinjaman
5. Laporan perkembangan kualitas kredit
6. Laporan perkembangan kredit yang direstrukturisasi
7. Laporan penggunaan anggaran penghapusbukuan (PH) dan realisasi pendapatan *recovery*
8. Laporan monitoring biaya CKPN maupun rasio pencadangan, misalnya *NPL Coverage* dan *LAR Coverage*
9. Hasil Stress Test Risiko Kredit baik secara portfolio maupun bagi nasabah besar, Stress Test Risiko Pasar maupun Likuiditas.
10. Laporan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
11. Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in The Banking Book*).
12. Laporan *Recovery & Resolution Plan*.

#### f. Stress Test

Informasi kualitatif terkait *stress test* (yaitu portofolio dari stress test, scenario dan metodologi yang digunakan, serta penggunaan stress test dalam manajemen risiko).

Untuk menilai kecukupan tingkat ketahanan permodalan dan kecukupan likuiditas bank dalam menghadapi perubahan dan *shock* pada kondisi makroekonomi, maka BRI melakukan stress test. Tujuan *stress test* bagi BRI adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana, strategi dan metodologi stress test.
2. Mengidentifikasi pengaruh terutama yang berdampak signifikan terhadap portofolio BRI.
3. Mengestimasi potensi kerugian BRI pada kondisi pasar yang tidak normal dan cenderung ekstrim.
4. Mengukur sensitivitas kinerja dan kondisi keuangan BRI terhadap perubahan faktor risiko.
5. Memastikan BRI memiliki ketahanan dalam tekanan krisis ekonomi.

Cakupan stress test yang diterapkan di BRI meliputi *scenario stress test* dan *sensitivity stress test*. *Scenario stress test* mencakup risiko kredit, pasar dan likuiditas. Dalam *scenario stress test* ini, risiko kredit dan pasar masuk dalam *solvency Stress Test* yang menilai tingkat ketahanan permodalan Bank yang tercermin pada Laporan Keuangan Bank meliputi neraca, laba/rugi dan rasio keuangan, sedangkan risiko likuiditas diperhitungkan melalui metodologi tersendiri diluar *Solvency Stress Test*. *Sensitivity stress test* dilakukan untuk melengkapi analisis *scenario stress test* yang meliputi risiko kredit, nilai tukar dan risiko suku bunga. *Stress test* di BRI dilaksanakan secara individu maupun secara konsolidasi bersama dengan Perusahaan Anak. Pelaksanaan stress test BRI Group merupakan salah satu pengelolaan risiko terintegrasi, dimana hasilnya disampaikan kepada manajemen BRI, manajemen Perusahaan Anak serta regulator untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan atas strategi pengelolaan risiko perusahaan dalam skenario pemburukan ekonomi.

BRI sebagai salah satu Bank *Domestic-Systemically Important Banks* (D-SIB atau Bank Sistemik) di Indonesia, maka memiliki kewajiban untuk menyusun analisis *stress test* yang merupakan bagian dari penyusunan *Recovery Plan* untuk disampaikan kepada Direksi maupun Otoritas Jasa Keuangan. BRI juga berpartisipasi dalam *Joint Stress Test* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.

**g. Strategi dan proses untuk mengatur, melindungi nilai dan memitigasi risiko yang muncul dari model bisnis Bank.**

Proses manajemen risiko pasar dilakukan sesuai dengan prinsip penerapan manajemen risiko yang diatur dalam kebijakan umum manajemen risiko dan didasarkan pada *Three Lines Model* dimana Dewan Komisaris dan Direksi berperan sebagai *governing body* dan *Three Lines of Defense* yang terdiri dari Unit Kerja Operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern. Pengawasan Aktif Direksi dilakukan secara berkala dalam komite direksi seperti Forum *Risk Management Committee*, Forum *Assets & Liabiliy Management Committee*, *Business Performance Review*, dan Rapat Direksi. Sedangkan Pengawasan oleh komisaris dilakukan melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala (harian dan bulanan) baik itu oleh Unit Kerja Operasional maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan tools yang telah ditetapkan untuk memitigasi risiko yang akan muncul dari aktivitas bisnis.

BRI menetapkan kebijakan lindung nilai untuk mengurangi risiko yang timbul atau diperkirakan akan timbul akibat fluktuasi harga di pasar keuangan. Hal-hal yang ditetapkan terkait lindung nilai mencakup ketentuan umum, teknik transaksi lindung nilai, batasan transaksi lindung nilai dan instrument lindung nilai

### **Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk* (CCRA)**

*Counterparty credit risk* adalah risiko kredit yang timbul dari jenis transaksi secara umum memiliki karakteristik:

- a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
- b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
- c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
- d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu:
  - 1) jika nilai wajar kontrak bernilai positif maka bank terekspos risiko kredit dari pihak lawan; atau
  - 2) jika nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terkespos risiko kredit dari bank.

Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dapat terjadi akibat transaksi repo, transaksi reverse repo dan transaksi derivatif.

Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), BRI menggunakan pendekatan standar untuk perhitungan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).

# **PENERAPAN TATA KELOLA DALAM PEMBERIAN REMUNERASI BAGI BANK UMUM SESUAI POJK 45/POJK.03/2015**

## **PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN REMUNERASI (HCS)**

**Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:**

1. Latar belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.

2. Pelaksanaan kaji ulang/ evaluasi atas kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaharunya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan.

## **CAKUPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN IMPLEMENTASINYA PER UNIT BISNIS, PER WILAYAH DAN PADA PERUSAHAAN ANAK ATAU KANTOR CABANG YANG BERLOKASI DI LUAR NEGERI**

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perseroan mengadakan peninjauan terhadap Tunjangan Premium apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perseroan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak.

## **REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN RISIKO**

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan *Corporate Band* dan/ atau *Job Grade* Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah *midpoint* (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/eksposur risiko Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perusahaan akan menanggungkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variabel.

## PENGUKURAN KINERJA DIKAITKAN DENGAN REMUNERASI

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

### 1. Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja.

Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perseroan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.

### 2. Metode remunerasi individu dengan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.

Dalam pemberian kompensasi variabel bagi Pekerja, besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja tergantung dari pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja dan kinerja individu dimana masing-masing komponen tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.

### 3. Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai.

Pada awal tahun Perusahaan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak akan memperoleh kompensasi variabel.

## PENYESUAIAN REMUNERASI DIKAITKAN DENGAN KINERJA DAN RISIKO

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

### 1. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
- b. Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah setinggi-tingginya 20% dari tantiem.

### 2. Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa:

- a. Terbukti secara hukum terdapat penyalahgunaan jabatan dan atau wewenang dan atau melakukan tindak pidana oleh MRT yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
- b. *Restatement* laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
- c. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk atau pengaturan lain yang diatur Kementerian BUMN.
- d. RUPS Tahunan memutuskan menolak pertanggung jawaban Direksi dan atau Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk Tahun buku yang diputuskan dalam RUPS Tahunan.
- e. Pertimbangan lain dipandang penting oleh RUPS.

## NAMA KONSULTAN EKSTERN DAN TUGAS KONSULTAN TERKAIT KEBIJAKAN REMUNERASI

Salah satu prinsip remunerasi Perseroan adalah kompetitif secara eksternal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

## REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL

1. Bentuk dan alasan pemilihan remunerasi yang bersifat variabel.  
Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu:
  - Insentif Jangka Pendek.  
Insentif Jangka Pendek merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun kepada Tenaga Pemasar. Insentif Jangka Pendek bertujuan untuk mendorong motivasi Tenaga Pemasar, memberikan reward secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.
  - Bonus.  
Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.
2. Alasan perbedaan pemberian remunerasi yang bersifat variabel (Direksi, Dewan Komisaris dan Pekerja).
  - a. BRI menerapkan konsep Kelompok Jabatan dalam pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Pekerja, yang terdiri dari Support, Bisnis, Pembina Pemasar, dan Pembina Pemasar. Pemberian remunerasi bersifat variabel akan berbeda antara kelompok jabatan, yang menyesuaikan dengan besaran konstanta per kelompok jabatan dimaksud.
  - b. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
    - Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
    - Tenaga Pemasar sebagai lini utama penggerak bisnis Perusahaan.
    - Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
    - Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Faktor penyebab perbedaan pemberian kompensasi yang bersifat variabel berdasarkan pertimbangan pencapaian kinerja dan kompetensi termasuk pencapaian kinerja unit kerja dan kinerja perusahaan.

## JABATAN DAN JUMLAH PIHAK YANG MENJADI MATERIAL RISK TAKERS

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang ditetapkan berdasarkan jumlah manajemen pada periode tahun laporan adalah sebagai berikut:

1. Senior Executive Vice President (SEVP) (6 orang)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Achmad Royadi	SEVP	Material Risk Taker
2	Triswahju Herlina	SEVP	Material Risk Taker

3	Muhammad Candra Utama	SEVP	(Akan menjadi) Material Risk Taker. Belum menerima Variable Pay sebagai SEVP 2023
4	Aestika Oryza Gunarto	SEVP	(Akan menjadi) Material Risk Taker. Belum menerima Variable Pay sebagai SEVP 2023
5	I Nyoman Sugiri Yasa	SEVP	(Akan menjadi) Material Risk Taker. Belum menerima Variable Pay sebagai SEVP 2023
6	Steven Augustino Yudiyantho	SEVP	(Akan menjadi) Material Risk Taker. Belum menerima Variable Pay sebagai SEVP 2023

### SHARES OPTION YANG DIMILIKI PEJABAT EKSEKUTIF

BRI memiliki program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham dengan harga khusus, dimana program dimaksud dimulai pada tahun 2020 dengan waktu eksekusi saham hingga 30 November 2021.

Nama Pejabat Eksekutif (SEVP)	Jumlah Saham yang dimiliki	Jumlah Opsi		Harga Opsi	Jangka Waktu (Exercise)
		Yang ditawarkan (Lembar Saham)	Yang dieksekusi (Lembar Saham)		
Ahmad Royadi	290.400	290.400	290.400	2.240	Sampai dengan 30/10/2021
Triswahyu Herlina	290.400	290.400	290.400	2.240	Sampai dengan 30/10/2021

### JUMLAH PENERIMA DAN JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DIJAMIN TANPA SYARAT

Pada Tahun 2023 terdapat remunerasi bersifat variable yang dijamin tanpa syarat berupa appreciation bonus. Seluruh pekerja Tetap mendapatkan appreciation bonus untuk kinerja Tahun 2022 dengan rincian:

Variable	Jumlah Pekerja	Total Bonus
Appreciation Bonus Tahun 2022	60.362	Rp 590.371.220.821,80

### JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan (tahun buku 2023)	
		Tunai (Rp Juta Nett)	Saham (lembar saham)
1	SEVP	2.405	Tidak terdapat pemberian remunerasi dalam bentuk saham di Tahun 2023
2	Dewan Komisaris	12.676*	1.197.600**
3	Direksi	-	14.522.365

\* Untuk Komisaris Independen

\*\* Untuk Komisaris Non Independen

**JUMLAH TOTAL REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL YANG DITANGGUHKAN YANG DIBAYARKAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN**

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan (tahun 2023)	
		Tunai dalam Juta Rupiah ( <i>Unlock</i> ) 2023	Lembar Saham ( <i>Unlock</i> ) 2023
1	Dewan Komisaris	1.822*	280.400**
2	Direksi	-	4.304.601
3	SEVP	845	Tidak terdapat pemberian remunerasi dalam bentuk saham di Tahun 2023

\* Untuk Komisaris Independen

\*\* Untuk Komisaris Non Independen

**INFORMASI KUANTITATIF**

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	12.413			
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	11.154.964 lembar saham			
<b>Jumlah</b>				

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT